

Kiai

dan TRANSFORMASI
SOSIAL
Dinamika Kiai Dalam Masyarakat

Dalam studi - studi sosial tentang pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia menunjukkan bahwa kiai adalah tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi sentral mereka terkait dengan kedudukannya sebagai orang yang terdidik dan kaya di tengah masyarakat. Sebagai elit terdidik kiai juga seringkali memberikan pengetahuan tentang agama Islam kepada para penduduk desa dan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional adalah sarana penting untuk melakukan *transfer of knowledge* atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa pada umumnya. Di sisi lain para kiai menjadi patron, kepada siapa banyak penduduk desa bergantung. Posisi sentral kiai dapat di lihat dalam pola patronasi atau ketergantungannya dalam masyarakat. Keterlibatan KH. Moh. Khafifi Mustaqim sebagai kiai kampung mempunyai peran serta dalam tranformasi sosial (*social transformation*) sangatlah penting karena dalam konteks sosial kiai dipandang sebagai seorang yang dipercaya dan disegani dalam masyarakat. Kiai merupakan sektor kepemimpinan Islam yang dianggap paling dominan selamanya berabad-abad kiai telah memainkan peranan yang menentukan dalam proses perkembangan sosial (*social*), kultur (*culture*), keagamaan (*religion*) dan pendidikan (*education*) dalam periode sekarang pun kiai telah mewujudkan vitalitasnya dalam kepemimpinan Islam.



TANGGA ILMU

Krapyak Kulon RT 03 No. 100
Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Telp/SMS : 0878-3951-5741/0822-2720-8293
email : penerbittanggailmu@gmail.com



Dr. M. Hadi Purnomo, M.Pd

KIAI DAN TRANSFORMASI SOSIAL
Dinamika Kiai dalam Masyarakat



Dr. M. Hadi Purnomo, M.Pd

Kiai

dan TRANSFORMASI
SOSIAL
Dinamika Kiai Dalam Masyarakat



Kiai DAN TRANSFORMASI SOSIAL
Dinamika Kiai Dalam Masyarakat

Dr. M. Hadi Purnomo, M.Pd

Edisi Revisi

Kiai DAN TRANSFORMASI SOSIAL Dinamika Kiai Dalam Masyarakat



KIAI DAN TTRANSFORMASI SOSIAL

Dinamika Kiai Dalam Masyarakat

Penulis:

Dr. M. Hadi Purnomo, M.Pd

Editor:

Asnawan

Desain Cover & Layout:

Mashudi/Udien

Cetakan Ke-I April 2010

Cetakan Edisi Revisi April 2016

Penerbit:

Absolute Media

Gedongan No. 50 RT 04/RW 02 Purbayan Kotagede Yogyakarta 55173

Tlp: (0274) 8398116, 087839515741

Email: absolutemedia09@yahoo.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. M. Hadi Purnomo, M.Pd

KIAI DAN TTRANSFORMASI SOSIAL

Dinamika Kiai Dalam Masyarakat

Yogyakarta Absolute Media, 2016

x + 134 hlm, 14,8 x 21 cm

ISBN: 978-602-96063-1-7

KATA PENGANTAR

Dalam tilikan sejarah pesantren dan kiai adalah dunia yang tak ada hentinya untuk dipelajari dan digali. Sebagian orang mengatakan bahwa ia bagaikan mata air yang terus memancarkan kesejukan, mengalir dan mengalir seakan tak mengenal musim dan juga sebagian lagi mengatakan ia laksana bintang– bintang yang jauh tak tercapai, tapi enak dipandang karena suatu bangsa patut bersyukur, jika di dalamnya masih terdapat bintang-bintang, apalagi yang kejora yaitu seorang kiai. Hal tersebut adalah bagian dari karakter utama yang melekat dalam pandangan hidup kiai-kiai di Nusantara. Cita-cita sosialnya para kiai untuk mengubah (*change*) kondisi masyarakat menuju tatanan yang lebih baik secara moral, ekonomi dan politik sosial.

Cita-cita yang dibungkus lewat pendidikan (*tarbiyah*) dan sosialisasi nilai-nilai Islam (*dakwah*) itu terinspirasi dan merujuk kepada apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dan para ulama terdahulu, termasuk Walisongo. Di masa lalu para pemimpin Islam selalu menampilkan watak Islam yang transformatif Islam dihadirkan sebagai sumber nilai yang menjadi landasan etis untuk

melakukan transformasi sosial secara menyeluruh (Muhaimin, 2007:31)

Kalau ditinjau dari perspektif pendidikan pondok pesantren merupakan cikal bakal sistem pendidikan Nasional, ini seiring dengan dinamika perkembangan zaman antara sistem yang dikembangkan oleh pemerintah dengan sistem perkembangan pendidikan pesantren memiliki beragam perbedaan. Jadi banyak pula para pemikir diantara intelektual dan pemikir keagamaan yang menganggap bahwa kegiatan mereka (kiai) harus bebas dari politik (kekuasaan) walaupun pengertian diatas tidak ada kaitannya dengan politik, Pemikiran seseorang sering menjadi bahasan yang cukup penting didiskusikan dan diaplikasikan dalam realitas sosial karena pemikiran adalah hasil pruduk dari keadaan (*condition*) yang ada di sekitar manusia dimana dia berada.

Dalam studi - studi sosial tentang pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia menunjukkan bahwa kiai adalah tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi sentral mereka terkait dengan kedudukannya sebagai orang yang terdidik dan kaya di tengah masyarakat. Sebagai elit terdidik kiai juga seringkali memberikan pengetahuan tentang agama Islam kepada para penduduk desa dan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional adalah sarana penting untuk melakukan *transfer of knowledge* atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa pada umumnya. Di sisi lain para kiai menjadi patron, kepada siapa banyak penduduk desa bergantung. Posisi sentral kiai dapat di lihat dalam pola patronasi atau ketergantungannya dalam masyarakat. Peran serta kiai dalam tranformasi sosial (*social transformation*) sangatlah penting karena dalam konteks sosial kiai dipandang sebagai seorang yang

dipercaya dan disegani dalam masyarakat. Kiai merupakan sektor kepemimpinan Islam yang dianggap paling dominan selamanya berabad-abad kiai telah memainkan peranan yang menentukan dalam proses perkembangan sosial (*social*), kultur (*culture*), keagamaan (*religion*) dan pendidikan (*education*) dalam periode sekarang pun kiai telah mewujudkan vitalitasnya dalam kepemimpinan Islam.

Sementara kiai, menurut Zamakhasari Dhofier adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya. Istilah kiai memiliki makna yang tidak tunggal dalam berbagai hal, nama kiai terikat terhadap berbagai status. Salah satunya adalah kiai sebagai tokoh agama, dalam pengertian ini, kiai merupakan figur penting dalam struktur masyarakat Islam di Indonesia. Terlepas dari hal ini tidak kala pentingnya peran KH. Moh. Khafifi Mustaqim sebagai agen perubahan di masyarakat yang secara singkat dipaparkan dalam buku yang sangat sederhana ini. *Selamat membaca!!!*

Jember, 18 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ___v

DAFTAR ISI ___vii

BAB I

PENDAHULUAN ___1

BAB II

KIAI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL ___13

- A. Pengertian Kiai ___13
- B. Pengertian Ulama ___21
- C. Fungsi Kiai ___31
- D. Klasifikasi Kiai dalam Masyarakat ___40
- E. Pengertian Transformasi Sosial ___42

BAB III

KIAI SEBAGAI AKTOR DALAM TRANSFORMASI SOSIAL ___55

- A. Kiai dan Agama Islam ___56
- B. Kiai dan Nahdlatul Ulama (NU) ___58
- C. Kiai dan Pesantren Sebagai Pusat Peradaban ___70
- D. Kiai dan Pemberdayaan Masyarakat ___78

BAB IV

PONDOK PESANTREN DI SITUBONDO PEMIKIRAN KH. MOH.

KHAFIFI MUSTAQOM ___ 85

- A. Sejarah Pondok Pesantren ___ 85
- B. Profil Pondok Pesantren Misykatul Ulum ___ 97
- C. KH. M. Khafifi Mustaqim dan Transformasi Sosial ___ 106

BAB V

PENUTUP ___ 121

DAFTAR PUSTAKA ◆ 125

TENTANG PENULIS ◆ 133

Bab I

PENDAHULUAN

Pesantren dan kiai adalah dunia yang tak habis-habisnya untuk dipelajari dan digali. Sebagian orang mengatakan bahwa ia bagaikan mata air yang terus memancarkan kesegaran, mengalir dan mengalir seakan tak mengenal musim dan juga sebagian lagi mengatakan ia laksana bintang– bintang yang jauh tak tercapai, tapi enak dipandang karena suatu bangsa patut bersyukur, jika di dalamnya masih terdapat bintang-bintang, apalagi yang kejora yaitu seorang kiai.¹

¹ Zainal Arifin Thoha, *Runtuhnya Singgasana Kiai NU Pesantren dan Kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usai*, (Yogyakarta: Kutub, 2003) hal 171

Hal tersebut adalah bagian dari karakter utama yang melekat dalam pandangan hidup kiai-kiai di Nusantara. Cita-cita sosialnya para kiai untuk mengubah (*change*) kondisi masyarakat menuju tatanan yang lebih baik secara moral, ekonomi dan politik sosial.

Cita-cita yang dibungkus lewat pendidikan (*tarbiyah*) dan sosialisasi nilai-nilai Islam (*dakwah*) itu terinspirasi dan merujuk kepada apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dan para ulama terdahulu, termasuk Walisongo. Di masa lalu para pemimpin Islam selalu menampilkan watak Islam yang transformatif Islam dihadirkan sebagai sumber nilai yang menjadi landasan etis untuk melakukan transformasi sosial secara menyeluruh.²

Kalau ditinjau dari perspektif pendidikan pondok pesantren merupakan cikal bakal sistem pendidikan Nasional,³ ini seiring dengan dinamika perkembangan zaman antara sistem yang dikembangkan oleh pemerintah dengan sistem perkembangan pendidikan pesantren memiliki beragam perbedaan. Jadi banyak pula para pemikir diantara intelektual dan pemikir keagamaan yang menganggap bahwa kegiatan mereka (kiai) harus bebas dari politik (kekuasaan) walaupun pengertian diatas tidak ada kaitannya dengan politik⁴, Pemikiran seseorang sering menjadi bahasan yang cukup penting didiskusikan dan diaplikasikan dalam realitas sosial karena pemikiran adalah hasil produk dari keadaan (*condition*) yang ada di sekitar manusia dimana dia berada.

² A Muhaimin Iskandar, *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia*, (Yogyakarta, KLIK R, 2007) hal 31-32

³ Uraian lebih jelas tentang bagaimana peran pondok pesantren dalam sistem Pendidikan Nasional, Lihat Abd A'la, *Pembaharuan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006)

⁴ Syaiful Muzani, *Spiritualitas Baru Agama dan Aspirasi Rakyat*, (Pustaka Pelajar, 1994) hal 175

Dalam studi - studi sosial tentang pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia menunjukkan bahwa kiai adalah tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi sentral mereka terkait dengan kedudukannya sebagai orang yang terdidik dan kaya di tengah masyarakat. Sebagai elit terdidik kiai juga seringkali memberikan pengetahuan tentang agama Islam kepada para penduduk desa dan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional adalah sarana penting untuk melakukan *transfer of knowledge* atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa pada umumnya. Di sisi lain para kiai menjadi patron, kepada siapa banyak penduduk desa bergantung. Posisi sentral kiai dapat di lihat dalam pola patronasi atau ketergantungannya dalam masyarakat.⁵

Peran serta kiai dalam transformasi sosial (*social transformation*) sangatlah penting karena dalam konteks sosial kiai dipandang sebagai seorang yang dipercaya dan disegani dalam masyarakat. Kiai merupakan sektor kepemimpinan Islam yang dianggap paling dominan selamanya berabad-abad kiai telah memainkan peranan yang menentukan dalam proses perkembangan sosial (*social*), kultur (*culture*), keagamaan (*religion*) dan pendidikan (*education*) dalam periode sekarang pun kiai telah mewujudkan vitalitasnya dalam kepemimpinan Islam.

Sementara kiai, menurut Zamakhasari Dhofier adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-

⁵ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2004) hal 01

kitab klasik kepada santrinya.⁶ Istilah kiai memiliki makna yang tidak tunggal dalam berbagai hal, nama kiai terikat terhadap berbagai status. Salah satunya adalah kiai sebagai tokoh agama, dalam pengertian ini, kiai merupakan figur penting dalam struktur masyarakat Islam di Indonesia. Posisi penting kiai di Indonesia tidak terlepas dari karakteristik pribadinya yang sarat dengan berbagai nilai lebih. Pada diri kiai melekat kuat otoritas karismatik karena ketinggian ilmu agamanya. Kesalehan dan juga kepemimpinan. Kondisi inilah yang menjadikan kiai diposisikan oleh masyarakat sebagai *uswatun hasanah*, atau contoh panutan yang baik dalam lingkungan masyarakatnya.⁷

Perubahan dalam masyarakat terus mengalami peningkatan entah dari perubahan itu pada peningkatan masyarakat itu sendiri atau bahkan pada perubahan yang negatif oleh karena itu, masyarakat sebagai orang yang butuh motivasi dan bimbingan (*guidence*) serta pemahaman tentang bidang-bidang aqidah, syari'ah, ahlak, pergaulan, kebudayaan, dan dakwah dari seorang tokoh agama yakni kiai.⁸

Dinamika dan kiprah kiai dalam ranah sosial sangat memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat dan fenomena yang telah terjadi merupakan sebuah fakta sosial bahwa kiai memiliki peranan yang cukup luas kiai tidak hanya cukup berkiprah dalam bidang agama saja, tetapi juga mencakup bidang-

⁶ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hal55

⁷ Lihat Ali Maschan Moesa, *Agama Dan Demokrasi : Komitment Muslim Tradisional Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*, (Surabaya: Pustaka Da'i Muda 2002) hal 211

⁸ Abdul Muchit Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran Refleksi 65 th Ikut NU*, (Khalista: Surabaya , 2006) hal 71

bidang yang lain baik sosial, politik, ekonomi, budaya dan organisasi. Namun demikian terdapat beragam pilihan sikap diantara para kiai satu dengan kiai lainnya dan sebenarnya hal seperti itu merupakan hal yang wajar manakala antara satu kiai dengan kiai yang lainnya memiliki perbedaan pilihan dan sikap dalam berbagai aspek.⁹

Satu aspek yang sangatlah penting yang juga jarang diperhatikan oleh para peneliti dan bahwasanya kiai tidak hanya mengajarkan ilmu ilmunya pada santrinya akan tetapi juga bagaimana seorang kiai juga memberikan kontribusi pemikirannya kepada masyarakat dengan demikian pola interaksi seorang kiai tidaklah harus eksklusif melainkan inklusif yang nantinya akan memberi keterbukaan pada masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi.

Salah satu aspek yang menegaskan atau memperkokoh posisi kiai dalam struktur sosial kemasyarakatan adalah bidang pengabdian. Pada aspek ini, seorang kiai memiliki totalitas pengabdian. Ada kiai yang mengabdikan hidupnya di Mesjid, di Madrasah, di Pesantren, dan disekolah dengan sistem kelas. Namun demikian sebetulnya kiai mengabdikan hidupnya di pesantren memiliki dimensi otoritas dan karismatik yang paling besar dibandingkan dengan kiai yang mengabdikan dalam bidang yang lainnya. Kiai yang menjadi fokus penelitian ini adalah kiai pesantren.

Kiai pesantren adalah figur dengan kapasitas pribadi yang sarat dengan bobot kualitatif jadi dengan bobot kualitatiflah ini yang menjadikan sosok seorang kiai pesantren sebagai rujukan

⁹ Achmat Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hal 05

masyarakat. Masyarakat kemudian menjadikan kiai pesantren sebagai sebagai figur yang menjadi tempat untuk konsultasi dalam bidang rohani dan juga dalam bidang-bidang kehidupan yang profan dan terkecuali dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Kiai dan perubahan sosial sangatlah erat karena perubahan selalu dinamis dan juga dalam berbagai perspektif perubahan. Kiai selalu berupaya dalam melakukan transformasi sosial guna mengemban tugas sebagai seorang pemimpin yang ditokohkan oleh masyarakat sepanjang zaman, walaupun banyak yang beranggapan bahwa para pemikir dalam masyarakat adalah sebagai suatu sistem yang dinamis yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya tapi kiai merupakan bagian dari pemikir Islam yang harus ditiru dan ditokohkan.

Seiring dengan dinamika dan perkembangan zaman dan juga sosial politik yang terus berkembang, sehingga terjadi pergeseran juga dalam kiprah dan peran kiai. Era reformasi misalnya menunjukkan intensifikasi terhadap peran tersebut. Dalam analisis yang dilakukan oleh salah satu pemikir Islam Azyumardi Azra, realitas sekarang ini ditengarai sebagai era kebangkitan “Islam Politik” yaitu suatu era dimana segenap elemen masyarakat Islam memiliki peluang yang sangat luas untuk berkiprah di dunia kekuasaan (politik).¹⁰

Persentuhan kiai dengan kekuasaan, sebagaimana dikemukakan oleh Donald Eugene Smith, didasarkan atas keyakinan bahwa dalam ajaran Islam, antara agama dengan kekuasaan disatukan secara tuntas. Hal ini terbukti dalam sejarah pribadi Nabi

¹⁰ Azyumardi Azra, *Islam Di tengah Arus Transisi Menuju Demokrasi*, dalam Abdul Mun'in DZ (ed) *Islam di tengah arus transisi*, (Jakarta: Kompas, 2000) hal xv

Muhammad dan para khalifa penggantinya. Muhammad di samping pemuka agama juga pemimpin politik. Disamping para sahabat pada waktu itu sebagai pendamping rasul yang memahami tentang agama juga mereka sebagai khalifa yang kalau pada masa sekarang diidentifikasi presiden.¹¹

Fenomena kiai pesantren terjun ke wilayah politik bukan hal tabu akhir-akhir ini hal semacam itu sudah menjadi tradisi ke kalangan pengasuh pondok pesantren, artinya banyak kiai pesantren yang semestinya tugas pokoknya adalah mendidik dan mengasuh santri, lalu berbelok dan memsuki dunia yang berbeda dengan habitatnya. Sehingga hal ini menarik diteliti, sejauh ini menurut penulis, kajian dan penelitian secara khusus dilakukan terhadap persoalan tersebut belum dilakukan akan tetapi kajian tentang kiai dan politik secara umum sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Akan tetapi peneliti akan lebih fokus untuk membahas tentang kiai dan transformasi sosial, walaupun beberapa studi tentang kiai dan perubahan sosial telah dilakukan oleh para peneliti yaitu:

1. Clifford Geertz seorang antropolog yang merintis penelitian dengan tema Abangan, santri dan Priyayi dalam masyarakat Jawa dengan meminjam istilahnya Wolf. Melihat bahwa kiai di Jawa menempati posisi sebagai pialang budaya (*cultural Broker*). Pada masa sesudah kemerdekaan, telah menjadi perubahan peran para kiai. Dari seorang komunikator yang menghubungkan dunia Islam yang berpusat di Mekah dengan para petani di Jawa di pedesaan. Berubah peran menjadi seorang politisi yang mengageni pemerintah pusat desa.

¹¹ Lihat Choirul Anam, *Pertumbuhan dan perkembangan NU*, (Surabaya: Bisma Satu, 1999) hal130

Geertz berhasil menarik perhatian banyak ahli karena berhasil mengangkat kiai kepada posisi istimewa.¹² Titik tekan pada penelitian Geertz adalah identifikasi antropologi terhadap keberadaan masyarakat muslim di daerah Mojokuto, dalam penelitiannya, Geertz merumuskan adanya trikotomi dalam masyarakat Mojokuto, yaitu santri abangan dan Priyayi, dalam kerangka penelitiannya ini, Geertz menguraikan tentang signifikansi peran kiai dalam kontruksi sosiologis-antropologis masyarakat Jawa ketika itu. Pada titik inilah antropologi ini telah membuka peranan bagi penelitian terhadap peranan kiai pada mas-masa berikutnya.

2. Bertolak dari konsep kiai sebagai mediator, antropolog Jepang Hirokko Horikoshi juga melakukan penelitian lapangan di Jawa Barat. Fokus penelitiannya adalah tentang peran kiai (ajeng) dalam proses perubahan sosial. Dalam kerangka penelitiannya ini, posisi kiai ditempatkan sebagai posisi penghubung. Dalam posisi penghubung, para kiai yang cakap mampu memasuki permainan kekuasaan yang begitu rumit dengan sistem luar yang dominan, hanya saja. Keberhasilan seorang kiai dalam memainkan perannya, menurut Hirokko Horikoshi sangat tergantung pada kualitas dan kharismatik mereka.¹³ Oleh karena itu, kiai dengan sisi karismatik yang besar memiliki peranan yang cukup besar dalam melakukan transformasi dalam perubahan sosial. Sedangkan kiai dengan sisi karismatik yang kurang besar,

¹² Clillifort Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983)

¹³ Hirokko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987) hal 211-236

peranannya juga tidak terlalu besar, maka besar kecilnya peranan kiai dalam proses perubahan sosial bergantung kepada besar kecilnya karisma yang dimilikinya.

3. Niehof (1979) seorang Antropolog, menyebutkan bahwa seluruh pemimpin lokal di pedesaan Madura adalah para kiai yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Madura, kiai menempatkan posisi yang cukup dalam melakukan berbagai strateginya dalam masyarakat.
4. Dhofier dalam desertasinya yang berjudul *The Pesantren Tradisional a Study of the role of the kiai in Maetenance of the Traditional Ideology of Islam in Java* (1980) membahas secara rinci tentang usaha –usaha yang dilakukan oleh para kiai untuk memelihara apa saja yang disebutnya sebagai tradisi pesantren. Dari penelitian yang dilakukannya, Dhofier telah memberi sumbangan besar bagi kajian tentang peran kiai dalam penelitian tersebut diungkapkan tentang adanya berbagai macam jaringan yang sengaja diciptakan oleh para kiai sebagai upaya mempertahankan tradisi pesantren. Jaringan yang dimaksud antara lain berupa jaringan transmisi ilmu, hubungan saling memasok santri di antara pesantren tertentu, jaringan kekerabatan antara yang muncul melalui sistem perkawinan endogamis. Di samping itu, uraian-uraiannya yang rinci tentang nilai-nilai, pandangan hidup dan elemen-elemen dalam kehidupan pesantren, sangat menolong kita mengenal anatomi kehidupan pesantren yang sangat rumit.¹⁴

¹⁴ Zamakhsari Dhafier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982)

5. Endang Turmudzi dalam bukunya "*Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*" melakukan kajian terhadap peran sosial politik di daerah Jombang Jawa Timur. Penelitiannya ini memetakan tentang beberapa tipologi kiai, yaitu kiai politik, kiai pesantren, kiai panggung, dan kiai tarekat. Tipologi kiai di buat berdasarkan realitas peranan kiai dalam masyarakat dan realisasinya dalam kehidupan secara luas, termasuk dalam relasi agama dan politik. Penelitian ini yang dilakukan oleh Endang Turmudzi ini, dan juga penelitian Sukamto, menunjukkan kesamaan tentang meluasnya tipologi dan katagoresasi kiai. Dr. KH. Mustain Romly yang menjadi tokoh utama dalam penelitian ini yang di lakukan oleh Endang Turmudzi dan Sukamto merupakan contoh kiai dengan keempat tipologi yang melekat dalam dirinya. Beliau adalah seorang kiai pesantren karena manjadi pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Paterongan Jombang, seorang kiai tarekat karena beliau adalah seorang Mursyid Tarekat seorang kiai politisi karena beliau juga anggota legeslatif golongan karya, sekaligus seorang kiai panggung yang aktif mengisih ceramah di berbagai daerah.
6. Ali Maschan Moesa tidak kala pentingnya melakukan penelitian dalam disertannya yang berjudul *Nasionalisme Kiai: Kontruksi Sosial Berbasis Agama* Ali Maschan Moesa menggambarkan tentang Nasionalisme Kiai yang cukup universal, Nasionalisme kiai dalam pemahaman kiai adalah rasa keterkaitan (*al ashabiyah*) sekelompok orang yang ada dalam geokrafis tertentu, yang memiliki kesamaan tujuan untuk membangun suatu sistem tatanan kehidupan, dalam kontruksi kiai negara bangsa (*nation state*) dan Nasionalisme

kiai tidak hanya berhenti dalam Proklamasi Kemerdekaan 1954 kan tetapi terus-menerus untuk dipertahankan tentang nasionalisme Indonesia yang hanya cocok untuk perjuangan melawan eksistensi kolonial.¹⁵

7. Abdur Rozaki seorang peneliti muda yang dalam penyelesaian tersisnya melakukan penelitian tentang kiai di Pulau Madura yang berjudul “*Manabur Karisma Menui Kuasa Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*”, dalam buku tersebut diuraikan bahwa adanya relasi kekuasaan di dalam tata pergaulan sosial masyarakat Madura, bahwa dua kekuatan sosial masyarakat Madura dengan cara masing-masing membangun relasi kuasa atas masyarakat. Kiai mambangun relasi kuasa melalui proses kultural dengan melakukan Islamisasi di dalam masyarakat. Perannya tidak terlepas dari mendirikan Mesjid, Surau dan Pondok Pesantren, melalui media itulah kiai juga melakukan transfer pengetahuan, sosiologi, keagamaan. Namun dibalik kekuatan kiai dalam masyarakat dalam mengembangkan kultur keagamaan (*religion culture*) di dalam masyarakat terdapat kekuatan lain yakni tumbuhnya kekuatan sosial Blater.¹⁶
8. Ahmat Patoni dalam bukunya “*Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*”, menggambarkan bagaimana seorang kiai pesantren adalah membimbing dan membina pesantren disamping peran pokok terdapat fenomena kiai terjun dalam partai politik. Dan berpolitik yang strategi yang digunakan

¹⁵ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta LKIS, 2007)

¹⁶ Lihat Abdur Rozaki, *Manabur Karisma Menui Kuasa Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004)

kiai adalah dengan mendidik masyarakat dengan bertindak sebagai *guide* dan melakukan kontrol. Peran kiai dalam partai politik yang diungkapkan Ahmad Patoni dalam penelitiannya adalah *pertma*, kiai sebagai aktor, dalam hal ini kiai terjun langsung dan kiai menjadi anggota tim sekses sekaligus sebagai juru kampanye dalam partai tertentu. *Kedua*, kiai sdebagai pendukung pada peran ini kiai mendukung terhadap partai tertentu namun tidak berada dalam garis besar partai tersebut. *Ketiga*, kiai sebagi partisipan pada peran ini kiai hanya memberikan restu terhadap calon tertentu. Dan tidak terlibat dalam aksi dukungan, atau menjadi tim sukses.¹⁷

Hasil-hasil studi di atas tidak ada yang secara spisifik menguraikan tentang dinamika peran kiai pesantren dalam perunahan sosial pada akhir-akhir ini. Kajian ini penting untuk dilakukan mengingat ada banyak implikasi dan aspek signifikan yang dapat ditelusuri dan dikembangkan. Kerangka pemahaman terhadap persoalan ini, dapat ditelusuri juga dari perspektif sejarah. Sebab kiai sangat berperan dalam perubahan di masyarakat.

¹⁷ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Bab II

KIAI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL

A. Definisi Kiai

Kata Kiai merupakan kata yang sudah cukup akrab di dalam masyarakat Indonesia. Kiai adalah sebutan bagi *alim ulama*¹⁸ Islam. Kata ini merujuk kepada figur tertentu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam ilmu-ilmu agama Islam karena kemampuannya yang tidak diragukan lagi, dalam struktur masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, figur kiai memperoleh pengakuan akan posisi pentingnya di masyarakat.

Menurut Dhofier Perkataan ‘kiai’ dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga gelar yang berbeda, diantaranya:

¹⁸ Sebutan kiai yang biasanya digunakan pada orang yang ahli agama dan mempunyai pondok pesantren serta santri biasanya dalam masyarakat Jawa sangat menjadi kebiasaan bagi tokoh agama Islam disebutnya kiai

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap kramat. Misalnya "kiai garuda kencana" dipakai untuk sebutan kreta emas yang ada di Kraton Yogyakarta.
2. Gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya.
3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik pada santrinya.¹⁹

Gelar kiai juga diberikan oleh masyarakat kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dibidang agama serta memimpin pondok pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Namun dalam perkembangannya sebutan kiai juga diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan atau keahlian dibidang ilmu Agama Islam, ataupun tokoh masyarakat walaupun tidak memimpin atau memiliki serta memberikan pelajaran di pondok pesantren.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kiai dijelaskan bisa berarti, 1) Sebutan bagi alim ulama (cerdik pandi dalam beragama Islam); 2) Alim ulama; 3) Sebutan bagi guru ilmu gaib (dukun dan sebagainya); 4) Kepala distrik (di Kalimantan Selatan); 5) sebutan yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah (senjata, gamelan, dan sebagainya); 6) Sebutan samaran untuk harimau (jika orang melewati hutan).²¹

¹⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994) hal 55

²⁰ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: LSIK, 1999) hal 144

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990) hal 437

Kajian awal terhadap posisi kiai dalam masyarakat Indonesia dilakukan oleh Zamakhsari Dhofier. Menurut Zamakhsari Dhofier, kiai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya. Dhofier yang meneliti di pesantren Tebuireng Jombang dalam rangka penulisan disertasi tersebut menemukan banyak aspek yang belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.²²

Namun demikian, gelar kiai sebenarnya tidak hanya melekat kepada ahli agama, atau melekat terhadap pemangku pondok pesantren. penelitian yang dilakukan oleh Dhofier menemukan bahwa kata kiai ternyata memiliki konotasi makna yang lebih luas lagi. Ditinjau secara Etimologis, perkataan kiai berasal dari bahasa Jawa. Kata ini, demikian Dhofier, merujuk pada tiga gelar. *Pertama*, kiai merupakan sebutan untuk benda-bendapusaka atau barang-barang terhormat. Adapun yang termasuk dalam kategori ini, misalnya kiai pleret, yaitu gelar nama sebuah tombak dari keraton Surakarta, atau kiai garuda kencana yang merupakan nama kereta emas di Keraton Yogyakarta.

Dalam tradisi Jawa, ada banyak benda yang dilekatkan dengan nama kiai. Di Keraton Surakarta, hewan peliharaan keraton (kerbau) yang dikeramatkan oleh masyarakatpun diberi gelar Kiai slamet. *Kedua*, gelar kiai ditujukan kepada orang tua atau tokoh masyarakat. Gelar ini melekat terkait dengan posisinya sebagai figur yang terhormat dimata masyarakat. Jadi, gelar ini diberikan oleh masyarakat karena penghormatan yang diberikan kepada sang tokoh. biasanya gelar kiai disingkat menjadi Ki. Transfigurasi dari gelar kiai menjadi Ki berasal dari tradisi kerajaan jawa dimasa lalu.

²² Lihat Zamakhsyari Dhofier hal 55

Maka masyarakat Jawa cukup akrab dengan macam Ki ageng, Ki temanggung, Ki gedé, Ki buyut, dan sebagainya. Pemberian gelar Ki bukan semata-mata penghormatan, tetapi mempunyai makna pengakuan. Mereka yang mempunyai gelar Ki dinilai sebagai seorang ahli ilmu dan sebagai orang yang memiliki "Nilai Lebih" dalam sebuah bidang tertentu. Pemberian gelar tersebut juga bukan karena permintaan, tetapi timbul secara alami berdasarkan keikhlasan pandangan masyarakat umumnya.

Berdasarkan deskripsi diatas maka merupakan hal yang wajar dan tidak salah jika masyarakat memberi pengakuan kepada seseorang dan menganugerahkan gelar kiai untuk *di-khitab-kan* (disandingkan, bukan menyandingkan diri) kepada seseorang yang dinilai pantas untuk menyandang gelar tersebut. Hal ini merupakan manifestasi pengakuan kepada individu yang dinilai memiliki nilai lebih dalam bidang ilmu atau pengetahuan tentang *religions* (Agama Islam) dan mengajarkannya, serta mengajak masyarakat untuk mengamalkannya.

Namun demikian, seorang pengamat asal perancis, Andree Feillard, memiliki perspektif yang berbeda. Kiai dalam makna spesifik, yakni seorang dengan kapasitas keilmuan agama yang tidak diragukan lagi, kini telah mengalami pergeseran posisi. Feillard menyatakan bahwa sekarang kata kiai memang masih digunakan oleh masyarakat sebagai ekspresi rasa hormat. Namun demikian, kata kiai telah mengalami disorientasi, karena banyak dari mereka yang belum masuk kriteria untuk didebut sebagai kiai, ternyata telah menyandang gelar kiai. Misalnya orang muda yang belum tentu mempunyai pengetahuan agama yang benar.²³

²³ Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara* (Yogyakarta, LKiS, 1999), hal 356

Jika kita cermati dan komparasikan dengan realitas yang ada dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat, nampaknya apa yang dinyatakan oleh Feillard ini tidak sepenuhnya benar sehingga tidak bisa digeneralisasi bahwa kenyataannya semacam itu. Pernyataan Feillard mungkin memang terjadi, terutama pada daerah yang telah mengalami pergeseran peran kiai. Tetapi itupun tidak pada semua daerah. Sebab, tidak semua daerah telah terjadi pergeseran rasa hormat terhadap kiai.

Ketiga gelar kiai diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli dalam bidang ilmu-ilmu agama islam selain itu, kiai juga harus memiliki pesantren serta mengajarkan kitab kuning.²⁴

Ibarat dua sisi mata uang jika melihat hubungan antara pesantren dan kiai. Keduanya satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Takmungkinan ada pesantren tanpa ada kiai, begitu pula sebaliknya, keberadaan kiai mesti memiliki pesantren posisi kiai dalam pesantren adalah posisi yang sangat menentukan. Kiai – Ulama adalah penentu langkah pergerakan pesantren dan Ia juga sebagai pemimpin dalam masyarakat.²⁵

Prof H. Aboebakar Atjeh menyebutkan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang disebut ulama yaitu: 1) Pengetahuannya, 2) kesalehannya, 3) keturunannya, dan 4) jumlah muridnya.²⁶ Maka dari hal tersebut kiranya seorang kiai harus mempunyai kreteria yang bisa menambah khasanah intelektual

²⁴ Achmat Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), hal 23

²⁵ Team, *Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005), hal 06

²⁶ NU Majalah Khittah, *Meraih Keteladan Ulama*, (Jember, PC Lajnah Ta'lif Wa Nasr NU Jember, 2007), hal 08

keagamaanya bertambah dan selalu menjadi rujukan oleh masyarakat.

Pembagian atau katagorisasi kiai yang dilakukan Dhofier ternyata tidak mampu sepenuhnya mengawadahi luasnya penggunaan kiai. Dalam perkembangan sosial sekarang ini, gelar kiai ternyata tidak hanya diletakkkn kepada pemimpin pesantren, tetapi juga sering dianugrahkan kepada figur ahli agama, ataupun ilmuan Islam yang tidak memimpin atau memiliki pesantren. Dan figur kiai pun berbeda-beda level atau tingkatan karismanya.²⁷

Pemahaman semacam ini menunjukkan bahwa kiai tidak hanaya merujuk kepada seorang ahli agama yang menjadi pondok pimpinan pesantren dan mengajarkan kitab kuning akan tetapi lebih dari itu, kiai juga berperan besar dalam melakukan tranformasi sosial terhadap dunia pesantren dan juga masyarakat sekitar.

Peran yang paling penting dari kiai, menurut Hiroko Hirikoshi, adalah melakukan peran ortodoksi tradisional, yaitu sebagai penggerak keimanan dengan cara mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan yang memelihara amalan-amalan keagamaan ortodoksi dikalangan umat Islam.²⁸ Tetapi diluar peran yang terpenting ini kiai, khususnya kiai pesantren juga memiliki peran-peran yang lain lebih luas lagi.

Kedudukan seorang kiai bisa dimaknai ganda: yaitu sebagai pemegang pesantren dan juga memiliki peran untuk menawarkan kepada masyarakat agenda perubahan sosial keagamaan, baik menyangkut masalah interpretasi agama, cara hidup berdasarkan rujukan agama memberikan bukti kongkrit agenda perubahan

²⁷ Hiroko Hirokoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), hal 231

²⁸ *Ibid*, hal 232

sosial, melakukan pendampingan ekonomi maupun pendampingan terhadap perilaku santri secara luas, yakni masyarakat muslim yang taat yang kemudian menjadi rujukan masyarakat.

Untuk melaksanakan peran kiai yang lebih luas seperti tersebut di atas, para kiai berusaha mengfungsikan ikatan-ikatan sosial keagamaan sebagai mekanisme perubahan sosial yang diinginkan. Perubahan yang ditawarkan kiai dilakukan secara bertahap (*gradual*), bukan dengan cara reaksioner yang dekonstruktif. Hal ini dilakukan dengan harapan agar komunitas pesantren tidak mengalami kesenjangan budaya (*cultural lag*) atas masuknya budaya asing yang sebelumnya dianggap mengotori tradisi pesantren. Budaya asing terutama yang berasal dari tradisi barat, memang memperoleh stigma negatif dikalangan pondok pesantren. Oleh karena itu, untuk memahami dan menentukan strategi yang tepat terhadap persoalan ini, dibutuhkan analisis ini dan penelitian khusus untuk menguak lebih jauh dan mendalam tentang persepsi kaum pesantren terhadap budaya asing. Tetapi fakta menunjukkan, bahwa tidak semua kiai dan pesantren menolak terhadap seluruh budaya asing. Ada cukup banyak kiai dan pesantren yang cukup apresiatif dalam menyikapi persoalan ini.

Secara sederhana ada tiga sikap yang diambil kiai dan komunitas muslim pada umumnya dalam merespon modernitas. Pertama, melakukan penolakan secara total. Segala yang bernuansa atau berasal dari barat ditolak mentah-mentah. Sebab barat identik dengan sekularisasi, westernisasi dan budaya yang bertentangan dengan agama. Sikap ini diambil merupakan pertimbangan ajaran agama. Salah satu landasan yang menjadi rujukan dalam mengambil sikap semacam ini adalah kaidah-kaidah Ushul Fiqih:

"al-muabafadzhatu 'ala al-qodimi al-shalih, wal al akhdu bi al jadidil al-ashlah", (mempertahankan nilai-nilai lama yang bagus dan mencari nilai-nilai baru yang lebih bagus) kaidah ini menjadi koridor teologis-normatif yang digunakan oleh umat Islam, termasuk kiai, dalam menghadapi serbuan nilai-nilai baru yang tidak mungkin teratasi. Pada posisi ini, kiai memegang peran penting yaitu melakukan sosialisasi budaya baru melalui berbagai kegiatan dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada. Jika kiai memandang tidak ada kemaslahatan dari nilai-nilai baru yang baru masuk. Maka nilai tersebut akan ditolak dan lebih baik mempertahankan terhadap nilai-nilai lama yang telah mapan. Sebaliknya, jika ada sisi positifnya, maka dapat diambil untuk transformasi sosial. Nampaknya sebageian besara kiai, Barat identik dengan kemafsadatan, walaupun ada juga yang lebih aprisiatif. Namun demikian, hal penting terkait dengan peran kiai dalam proses tranformasi sosial bahwa penerimann ataupun penolakan terhadap budaya baru sangat bergantung kepada kemampuan dan keberhasilan kiai dalam melakukan aktualisasi budaya.²⁹

Kemampuan dan kapasitas yang dimiliki kiai tidak hanya berkaitan dengan proses trasformasi sosial. Disisi lainnya, adad juga kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya. Menurut seorang peneliti dari Jerman yang memiliki perhatian secara mendalam terhadap dunia pesantren. Manfred Ziemek selain kemampuan dalam menentukan proses transformasi sosial. Sosok kiai juga memiliki otoritas dan wewenang yang menentukan dalam semua

²⁹ Sukamto, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1999) hal 6-7 lihat juga Zamakhsari Dhofier, *Op Cit* hal 56, Bandingkan juga dengan tulisan Bactiahah Effendy "*Nilai Kaum Santri*" dalam M Dawam Raharjo, *Pergulatan Dunia Pesantren*, (Jakarta: P3M, 1987), hal 50-51

aspek kegiatan pendidikan dan kehidupan agama atas tanggung jawab sendiri.

Termonologi kiai telah menjadi tanggung termenologi sosiologis religius yang lebih mengakar kuat dalam kultur masyarakat jawa khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di beberapa daerah lain, ada berbagai macam sebutan yang secara substansial sebenarnya sama dengan kiai. Di Jawa Barat misalnya ada sebutan *ajengandi* Sumatra ada sebutan *buyadan* di Nusa Tenggara ada sebutan *tuan guru* dan beberapa sebutan khas kiai lainnya. Namun kiai yang dimaksud adalah kiai pesantren yaitu kiai yang memiliki dan pengasuh pondok pesantren.

B. Definisi Ulama

Kata kiai sering rancu saat harus berhadapan dengan kata lain yang sejenis. Misalnya dengan kata ulama. Apakah dalam kata tersebut ada kesamaan antara kiai dengan ulama? Dan kalau diklasifikasi lebih tinggi mana antara kiai dan ulama.

Kata ulama adalah bentuk jama dari kata *al-aliim* yang berarti memiliki pengetahuan. Selain itu bentuk jama' dari kata *al-alim*, juga diambil dari kata *al-alim* yang berarti mengetahui secara jelas.³⁰ Maka kata *al-ulam* dan *al-limun* berbeda karena akata *al-ulam* adalah jama taksir dari kata *al alim*, sedangkan kata *al alimun* adalah jama *mudzakar salim* dari kata *al-alim* kata ulama disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak dua kali sedangkan kata *al-alim* terdapat 13 kali.³¹

³⁰ M Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hal 467

³¹ Kata "ulama" terdapat dalam QS al Syu'ara 197 dan QS al Fatir 28, adapun kata *al-alimun* terdapat dalam QS al -Ankabut 43, QS Yusuf 44, QS al-Anbiya 51 dan 81, QS al-Rum 2 kata *alim* dalam bentuk tunggal terdapat dalam QS al-Mukminun 92, QS al-An'am 73, QS at-Taubah 94, 105, QS al-Ra'd 9, QS al-Sajadah

Penggunaan kata *al-ulam* dalam al-Qur'an selalu diawali dengan ajakan atau merenungi keadaan alam. Sedangkan kata *al-alimun* menrenungi peristiwa yang sudah terjadi sebagai bahan evaluasi. Adapun penggunaan kata *al-alim* dalam bentuk tunggal semuanya mengacu hanya kepada Allah. Dan selalu diiringi dengan penciptaan bumi dan langit serta hal-hal yang gaib dan yang nyata.

Berdasarkan pernyataan ayat-ayat al-Qur'an di atas maka dapat dipahami bahwa yang disebut dengan ulama adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berfikir tentang alam. Sehingga hasil dan pemikirannya dapat memberikan atau membuahkan teori-teori baru. Dari teori-teori inilah yang nantinya dapat membangun peradaban yang tinggi sehingga tugas ke-*khalifan* dapat dijalankan dengan sempurna. Inilah alasan yang dapat dikemukakan ketika Rasulullah menyatakan bahwa pewaris Nabi adalah *al-ulama* dan bukan *al-alimun*.

Kelompok yang mengartikan ulama dari segi sikap menyatakan bahwa ulama adalah orang-orang yang takut terhadap kekuasaan Allah.³² Pengertian uama menurut sikap ini terkesan mempersempit pengertian terhadap ulama sehingga ke-ulamaan seseorang ditentukan oleh sikap yang dimilikinya. Padahal dalam pengthaun justru sangat nihil, demikian juga jika ulama diartikan dari segi pengetahuan semata-mata, maka akan terkesan bahwa ulama adalah orang-orang berilmu yang berilmu banyak adalah ulama. Bahwa ilmu yang dimilikinya tidak menjamin secara

6, QS Saba 3, QS Fatir 38 QS al-Zumar 46, QS al-Hasyr 22, QS al-Jum'ah 8, QS al-Taqhabun 18, dan QS al-Jin 26 Lihat Mohammad Fu'ad Abd al-Baqi, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim (Indonesia: Maktanah Dahlan tt) hal 603-604

³² Al-Imam Abu abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz XIV (Beruit: dar al-Kutub al-Ilmiyah) hal 219

mutlak terhadap kebaikan perilaku. Bahkan sangat mungkin dan berpeluang dari ilmu yang dimilikinya dipergunakan untuk kejahatan dalam berbagai bentuk. Sudah banyak bukti bahwa orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dipergunakan untuk hal yang tidak terpuji.

Oleh karena itu, pengertian ulma yang paling ideal adalah dengan mengacu kembali pada penegasan al-Qur'an, yaitu orang-orang yang berilmu pengetahuan, karena selalu membaca alam dan dampak daripada bacaannya tersebut menimbulkan sikap takut kepada Allah. Oleh karena itu, ulama adalah perpaduan antara kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan moral. Artinya, seorang ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan sekaligus perilaku yang baik.

Karakteristik yang sangat esensial bagi ulama seharusnya yang melekat pada diri ulama adalah, sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran. Adalah adanya rasa takut kepada Allah, rasa takut itu muncul karena mereka memahami sifat-sifat Tuhan dan sekaligus memperhatikan terhadap bukti-bukti tentang Tuhan. Melalui bukti-bukti ini para ulama mengetahui hakikat yang sebenarnya. Rasa takut ini muncul diawali dari pengetahuan yang mendalam sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menginternalisasi kesempurnaan Tuhan dan sifat-sifat Kemuliaan-Nya.³³

Prinsip mendasar yang kedua pandangan ini tetap mengacu pada teks-teks al-Qur'an namun perbedaan-perbedaan pandangan ini seharusnya dikompromikan supaya dapat saling melengkapi. Menurut pakar tafsir Indonesia Prof. Dr. Quraish Shihab, karakteristik ualam yang dimaksudkan dalam teks al-Qur'an ini

³³ Nizam al-Din al-Hasan, *Tafsir Ghara'ib al-Quran Waraghaib al-Furqan*, Juz V, (Beruit: dar al-Kutub Al-ilmiyah, 1996) hal 515

adalah mereka yang memperhatikan dan memahami kitab Tuhan yang terhampar di alam raya ini. Mereka mengenalnya melalui hasil ciptaan-Nya, menjangkau-Nya melalui kekuasannya-Nya, serta merasakan hakikat kebesaran-Nya. Dari sini maka mereka kumuadian takut dan kagum kepada-Nya serta taqwa dengan sebenar-benarnya.³⁴ Dengan demikian sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, bahwa karakteristik ulama yang sesungguhnya sama dengan karaktertistik para Nabi, pada satu sisi bertugas sebagai *ri'asah* mereka adalah orang yang mengetahui tentang ilmu-ilmu alam dan rahasia-rahasianya, dan juga orang yang mengetahui tentang kehidupan.³⁵

Usulan tentang pengertian ulama dari Hamka juga cukup menarik untuk dicermati, Menurut ketua MUI pertama ini, ulama bukanlah bukanlah orang-orang yang mengetahui hukum –hukum agama secara terbatas, dan bukan pula orang-orang yang hanya mengkaji kitab-kitab fiqih, dan bukan pula ditentukan oleh jubah dan serban yang besar. Malahan dalam perjalanan sejarah telah kerapkali agama terancam bahaya karena serban yang besar.³⁶

Perasaan takut ulama kepada Tuhan sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Razi, adalah karena mereka sudah sampai kepada pendalaman *ma'rifat* yang sebenarnya.³⁷ Prinsip rasa takut kepada Tuhan muncul setelah mengenal-sifat-sifat Tuhan yang

³⁴ M Quraish Shihab, *Dia Diman-Mana, Tangan Tuhan Di Balik Setiap Fenomena*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005) hal x

³⁵ Wahbah al –Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, Juz XXIII, (Beruit: dar al Fikr al-Mu'asr, 1998) hal 261

³⁶ Hamka, *Tafsir al-Azaha*, juz XXII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002) hal 246

³⁷ Fakhr al Din Muhammad bin Umar bin al-Shusyani al-Razi, *'Aja'ib al-Qur'an* cet I juz XXII, (Beruit: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1984)hal 21

mulia dan perbuatannya pemuatan-Nya yang serasi.³⁸ Faktor lain yang membuat ulama takut kepada Allah adalah karena pembelaan-Nya kepada ulama dari ancaman orang-orang kafir.³⁹

Ulama besar Syi'ah, Allmah Thabathaba'i menyatakan bahwa karakteristik ulama yang ideal adalah orang-orang yang mengetahui tentang Allah. Yaitu mereka mengenal-nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya dengan pengenalan yang sempurna. Hati mereka tenang, hilang keraguan dan kegelisahan dari jiwa mereka, dan muncul pengaruh terhadap aktivitas-aktivitas mereka. Lalu sesuai dengan ucapan dan perbuatan mereka, yang dimaksudkan takut ketika itu adalah benar-benar takut dan kemudian diiringi dengan *ke-khusu'an* dalam batin mereka dan kerendahan dalam penampilan.⁴⁰

Muhammad Baqir al-Majisi mengutip pernyataan Ali Bin Abi Thalib yang membagi ulama ke dalam tiga golongan. *Pertama*, kaum terpelajar yang sering memamerkan diri dan suka berdebat, kelompok ini sering menunjukkan kehebatannya dan setiap mengeluarkan pendapatnya, akan menyinggung perasaan orang lain. Di hadapan orang banyak, mereka berpura-pura *khushyu'* dan membuat dirinya seperti orang yang *wara'*. *Kedua*, kaum terpelajar yang hanya ingin mencari kekayaan dan bahkan mereka juga tidak segan segan menipu. Mereka ini memiliki sikap yang merendah terhadap orang kaya perilaku ini muncul karena mereka sangat berharap terhadap hadiah dari orang-orang yang kaya.

³⁸ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qodir al-jami' bayna fanni al-Riwayat wa al-Dirayat min ilm al-Tafsir*, Juz IV, (Berut: dar al-Fikir, 1973) hal 348

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Op, Cit*, hal 261

⁴⁰ Al- Allamah Muhammad Husayi'n al-Thabathaba'i, *Tafsir al-Mizan*, Juz XVII, (Berut: Mu'assasah al-A'lami li al-Matbu'at, 19991) hal 43

Namun sebenarnya, kelompok ini tidak memiliki kepedulian terhadap pemahaman keagamaan orang-orang kaya yang salah. *Ketiga*. Kaum perlarjar yang mendalami keilmuan dan logika. Kelompok ini dikenal memiliki kreatifitas dan idealitas yang sangat tinggi. Namun kehidupan mereka terkesan susah dan berat.⁴¹

Ahli antropologi Jepang melakukan penelitian tentang kiai dan perubahan soisal di Jawa Barat, Hirikho Horikoshi, membedakan secara hierarkis antara kiai dan ulama. Menurut Hirikho Horikoshi kiai berbeda dengan ulama ditinjau dari perspektif pengaruhnya dan karismanya dalam masyarakat. Karisma yang dimiliki kiai lebih tinggi dan unggul daru ulama, baik dari dimensi moral maupun dari dimensi kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Seorang kiai adalah seorang alim, atau orang yang mendalam ilmunya dalam suatu bidang ilmu keagamaan, misalnya *alim fi ali fiqih*, *alim fi al hadits*, *alim fi al kalam*, *alim fi al tafsir* dan sebagainya.⁴²

Selain faktor kealiman, perbedaan antara kiai dan ulama terletak pada dimensi pengaruh. Berbeda dengan kiai, pengaruh ulama merasuk dalam sisitem soisal dan struktur masyarakat desa yang khas, lokal serta otonom. Gelar atau status ulama bukanlah diperoleh pengakuan karena kredibilitas pribadinya tetapi diwariskan darin generasi-kegenerasi dan didukung oleh keluarga ulama yang secara tradisional mencetak dan mengkader ulama dari wilayah pedesaan. Sedangkan kiai pengaruhnya diperhitungkan oleh pejabat-pejabat Nasional maupun masyarakat umum yang lebih berarti dibanding dengan pengaruh ulama.

⁴¹ Syaik Muhammad Baqir al-Majisi, *Bihar al-Anwar al-Jami'ah li Durar Akbhar al-A'immah al-Athar*, Juz II (Beruiut: Dar Ihya al-Turrath al-Arabi) hal 46-47

⁴² Hirikho Horikoshi, *Op, Cit*, hal 21

Hirikho Horikoshi dengan demikian memberikan pemahaman bahwa antara ulama dan kiai merupakan tahapan hirarkis dimana lebih rendah dibandingkan dengan kiai. Perbedaan pengertian antara kiai dan ulama yang dilakukan Hirikho Horikoshi nampaknya harus dikritisi, sebab, terdapat *bias* dan ingkosistensi dengan realitas yang terbangun dalam kultur masyarakat Islam Indonesia. Khususnya di Jawa. Ada beberapa hal yang layak untuk dicermati, *pertama*, antara ulama dan kiai bukanlah dua etitas atau figur yang dapat dibedakan secara tegas. Bahkan sangat mungkin. Kedua gelar tersebut melekat pada satu orang. Dimana umat Islam umumnya mengasumsikan bahwa setiap kiai adalah ulama, dan ulama itu melekat dalam diri seorang kiai. Kedua istilah ini memang memiliki akar yang berbeda. Kata kiai berasal dari kultur Indonesia, sedangkan kata ulama berasal dari sumber ajaran Islam, yakni al Qur'an, namun dalam konteks penggunaannya, tidak ada perbedaan secara tegas, apalagi secara hierarkis.

Kedua, dalam konteks sosiologis masyarakat Islam Indonesia, walaupun sekali lagi tidak ada perbedaan hierarkis secara tegas, namun jika yang dimaksudkan dengan ulama justru berbeda secara diamental dengan penjelasan Hirikho Horikoshi, yakni ulama memilikipengaruh yang lebih lus dan tidak kekal dibandingkan dengan kiai. Ulama menjadi karakteristik pada orang yang menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, walaupun oleh masyarakat tidak disebut sebagai kiai. Sementara sebutan kiai tidak selalu dapat disebut dengan sebutan ulama, sebab, sebutan kiai bisa melekat pada beragam karakteristik.

Dalam dinamika dan perubahan zaman, gelar kiai ternyata tidak hanya ditujukan kepadamereka yang memikliki pondok

pesantren. Hasil penelitian Endang Turmudzi terhadap kiai di jombang menemukan adanya beberapa tipologi kiai, yaitu kiai pesantren, kiai tarekat, kiai panggung, kiai politik.⁴³ Dari keempat tipologi kiai tersebut bukanlah sesuatu yang mandiri secara tegas antara satu dengan yang lainnya. Misalnya jika seorang kiai di sebut kiai panggung, maka sebutan kiai yang lainnya tidak bisa melekat sangat mungkin pada diri seseorang kiai melekat lebih dari satu tipologi. Misalnya seorang kiai merupakan kiai pesantren namun juga kiai tarekat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan. Keempat tipologi tersebut melekat pada satu orang kiai saja. Hal ini dimungkinkan karena besarnya kapasitas dan luasnya akses untuk mengambil berbagai peran. Sehingga pada diri sang kiai, keempat tipologi tersebut melekat kesemuanya.

Walaupun definisi kiai telah berkembang sedemikian pesat mengalami beberapa perubahan tolak ukur, namun Abdurrahman Wahid (GusDur) tetap mensyaratkan bahwa gelar kiai hanya tepat diberikan kepada ahli ilmu agama Islam yang memiliki pesantren dan santri.⁴⁴ Dengan demikian, orang biasa disebut kiai jika dia menguasai ilmu agama, memiliki pesantren dan juga santrinya.

Ketiga, istilah ulama telah mengalami transfigurasi makna, dalam bahasa Indonesia, ulama berarti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.⁴⁵ Sedangkan dalam bahasa Arab, kata ulama merupakan jama' dari kata *'alim* yang bermakna

⁴³ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004) hal 32

⁴⁴ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Prsantren*, (Jakarta: Darma bhakti, 1984) hal 10

⁴⁵ Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet ke 3, 1990) hal 985

sebagai orang yang berilmu. Ulama dalam karakteristik macam inilah yang sering disebut sebagai *warasatul anbiya* (pewaris para nabi). Merekalah yang disebut sebagai hamba Allah yang paling takwa. Pelita ummat maupun sebutan-sebutan lainnya. Banyak difinisi mengenai hal ini, tetapi dari kesemua definisi yang ada, semuanya mengacu pada satu pokok pengertian yaitu ilmu dan amal. Artinya, seseorang disebut ulama jika ilmunya mempunyai dan amalnya sesuai dengan ilmunya yang mendalam tersebut. Oleh karena itu disamping menguasai kandungan al-Qur'an dan sunnah, mereka, juga harus mengamalkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari sebagai pewaris para Nabi. Selain mewarisi ilmu, seorang ulama juga mewarisi ketaqwaan, kekuatan iman, ahlak mulia, rasa tak tahan melihat penderitaan ummat, pengayoman, keberanian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dan keihlisan serta keuletan dalam mengajak kepada kebaikan.

Syek Nawawi al-Bantani memberikan penjelasan terkait dengan ulama. Dengan mengacu pada surat al-Fatir 28 "*sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama*" takut disesuaikan dengan kadar pengetahuan takutnya. Orang berilmu akan mengetahui Allah dan ia akan takut dan berharap kepada-Nya. Ini merupakan dalil bahwa orang *alim* (berilmu) itu lebih tinggi drajatnyadari pada *'abid* (ahli ibadah). Menurut Qira'at yang me-*nasab*-kan kalimah *al-ulama* dan me-*rafu'*-kan kalimah *al-jalalah*, ayat ini mempunyai arti bahwa Allah mengagungkan para ulama.⁴⁶

Pengeretian di atas menunjukkan bahwa kiai dapat dikategorikan sebagai ulama. Tetapi tidak semua kiai dapat disebut

⁴⁶ Syek Nawawi al-Bantani, *Marah labid li Kasyfi Ma'na Qurainin Madjid*, (Kairo: dar al-Fikr,tt) Jilid 2 hal 203

sebagai ulama. Katagori ulama yang sedemikian idealis dan berat, terlalu tinggi untuk dicapai. Oleh karena itu tesis Hirikho Horikoshi tentang posisi kiai dan ulama tidaklah tetap secara sosiologis dalam konteks masyarakat Indonesia.

Beberapa peneliti lain, semacam Clifford Geertz, Zamakhsari Dhofier, Kareel Steembrink, Hube de Jong dan Bousma, Leonard Binder dan juga Dealir Nore memberikan patokan banha antara kiai dan ulama merupakan satu kelompok masyarakat yang ahli dalam masalah hukum agama, serta memiliki kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran masyarakat disekitarnya. Di samping itu, karena berbagai kelebihan yang mereka miliki, mereka juga berfungsi sangat dominan dan efektif dalam mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat. Usaha membangun persatuan di dalam masyarakat ini dapat terlaksana secara ekfektif atas dasar kemampuan tersebut. Mereka dapat menepatkan dirinya sebagai pemimpin lokal yang kharismatik yang dituntut oleh masyarakat lingkungannya.

Memang antara ulama dan kiai tidak mudah dibedakan, seseorang peneliti sekelas Clifford Geertz pun mengakui bahwa antara konsep ulama dan kiai memang cukup membingungkan dan tidak mudah untuk dibedakan keduanya.⁴⁷ Hal yang sama juga di akui oleh ahli politik Islam, Prof. Dr. Dealir Noer, menurut Noer konsep kiai di satu sisi menceritakan sebagai seorang ahli agama yang shalih, dan dari sisi lain merupakan sebutan bagi orang yang memiliki ilmu mistik. Bahkan, bagi masyarakat Rakyat Jawa,

⁴⁷ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (New York: The Free Glence, 1960) hal 134

benda-benda kramat pun diberi sebutan kiai di depan namanya.⁴⁸ Hal ini menunjukkan betapa gelar kiai dalam konstruksi sosial kemasyarakatan Jawa memiliki posisi yang cukup istimewa.

Namun demikian, dengan melandaskan pada tiga kepada pertimbangan di atas, sosok kiai dan ulama bukan sebutan yang bersifat hierarkis. Senagaimana dikatakan Hirokoshi, sebab, dalam penelitian Hirokoshi ulama merupakan satu tingkatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kiai. Padahal, antara kiai dan ulama bisa jadi melekat dalam satu entitas, atau individu tertentu. Dan lagi, sebutan keduanya memiliki relativitas makna, tergantung kepada konteks sosial, politik dan budaya masyarakat.

C. Fungsi Kiai

Dalam realitasnya kiai memiliki fungsi yang cukup penting dalam masyarakat karena melihat kapasitas seorang kiai yang cukup mampu dalam melakukan perubahan sosial dan mampu mempunyai ilmu keagamaan yang cukup sehingga kiai menjadi panutan dalam masyarakat. Beberapa fungsi yang dimiliki kiai diantaranya ialah:

1. Kiai Sebagai Pelindung Masyarakat

Kiai dalam masyarakat merupakan pelindung karena masyarakat menganggap kiai adalah orang yang paling disegani sehingga masyarakat ketika mempunyai persoalan baik persoalan keagamaan dan bidang-bidang yang lain kiai menjadi plopore untuk menyelesaikannya.

⁴⁸ Dwliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980) hal 19

Achmat Patoni mengatakan bahwa kiai adalah figur yang cukup berpengaruh dan menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai bidang tidak hanya dalam masalah ritual – spiritual keagamaan saja, tetapi dalam persoalan apapun.⁴⁹

Dalam kebudayaan Jawa misalnya, mengenal adanya perbedaan status sosial baik pribadi-pribadi mereka maupun hubungan sosial di kalangan orang Jawa itu sendiri. Ini telah menjadi norma yang mengatur kehidupan dan cara hidup di kalangan orang Jawa. Status sosial ini dapat di tentukan secara luas oleh usia, kekayaan, pendidikan dll. Dalam hubungan masyarakat inilah, orang yang lebih muda, misalnya, harus menghormati orang yang lebih tua, sebagaimana orang yang kaya akan mendapatkan penghormatan dari orang miskin. Demikian juga, orang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan mendapatkan penghormatan dari orang yang lebih rendah pendidikannya.

Budaya sosial dikalangan orang Jawa ini telah di kenal sejak dini, mereka mencoba mewariskannya kepada anak cucu mereka agar dapat mengikuti praktek norma yang berlaku tersebut. Konsep orang Jawa seperti ini sengaja direfleksikan dengan tingkah dan perilaku yang ideal, yang harus di penuhi oleh orang Jawa. Budaya “malu” telah mendorong orang Jawa untuk patuh mengikuti konsep ideal tersebut. Apabila ada seorang yang melanggar norma tingkah laku seperti itu akan merasa malu karena tidak memenuhi etika yang berlaku, misalnya, seorang penduduk desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah, tidak menghormati orang yang berpendidikan tinggi.

⁴⁹ Achmat Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007) hal 23

Melihat dari konsep etika yang telah mendarah daging itu, tentu posisi Kiai dalam status sosial memiliki tingkat yang lebih tinggi pula, di banding dengan orang lokal yang awam, artinya kiai lebih mendapatkan penghormatan dan terhormat. Karena kiai mempunyai peran yang strategis, selain sebagai Ulama kebanyakan kiai juga merupakan keturunan dari orang kaya yang mempunyai tanah yang luas dan di gunakan sebagai pusat pendidikan. Hal inilah menjadikannya orang yang terhormat dan mendapatkan penghormatan yang tinggi dari masyarakat, secara otomatis kiai di jadikan sebagai panutan bagi masyarakat pada umumnya. Keberhasilannya dalam kepemimpinan ini menjadikannya semakin kelihatan sebagai orang paling berpengaruh, yang dengan mudah dapat menggerakkan aksi sosial. Dengan status yang seperti ini, dawuh seorang kiai lebih dapat diterima ketimbang dawuh orang lokal hal ini menunjukkan kiai sebagai pusat konsultasi dalam masyarakat.⁵⁰ Oleh karena itu, kiai telah lama menjadi elite yang sangat kuat dalam masyarakat.

Penting ditambahkan disini bahwa seorang kiai sering dianugerahi kemampuan yang luar biasa, yang jarang terjadi pada umat Muslim awam. Kemampuan luar biasa ini dapat di temui setelah atau bahkan sebelum memulai kekiaiannya, yaitu ketika masih nyantri di pesantren tertentu. Kemampuan luar biasa ini kemudian umum dikenal dikalangan pesantren maupun masyarakat setempat dengan sebutan “*ilmu laduni*”, yakni pengetahuan yang didapat tanpa belajar. Pengetahuan seperti ini,

⁵⁰ Dalam masyarakat Jawa Timuran kiai menjadi ikon penting dalam masyarakat karena kiai mempunyai kemampuan yang lebih dalam ilmu agama sehingga dalam persoalan-persoalan agama *kiai*-lah yang menjadi konsultan pertama dalam masyarakat

menjadikan pembenaran (legitimasi) bagi kepemimpinan seorang kiai. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kiai merupakan pemimpin dalam masyarakat yang kharismatik, karena ia diyakini sebagai pemegang kekuasaan suci yang membuatnya sangat berbeda dengan masyarakat luas lainnya.

Kharisma yang terpancar dari seorang kiai menjadikan keterikatan masyarakat dengan relasi keagamaannya sangat erat. Disamping karena kiai juga sebagai penolong bagi para penduduk dalam memecahkan masalah, yang tidak terbatas hanya pada masalah-masalah mereka atau yang tidak hanya terbatas pada masalah spiritual tetapi juga mencakup masalah kehidupan yang luas.

Bila dicermati, status sosial yang tinggi, yang dimiliki seorang kiai bukan semata-mata terdapat di kebudayaan Jawa saja. Melainkan di seluruh penjuru Dunia Islam memosisikan Ulama sebagai pemimpin, atau dengan kata lain posisi Ulama lebih terhormat dibanding posisi yang bukan Ulama. Posisi terhormat kiai pada dasarnya berasal dari fakta bahwa Islam menekankan pentingnya pengetahuan bagi umat Islam. Dalam al-Qur'an dan Hadits, ditekankan betapa pentingnya mencari pengetahuan dan bahwa seorang Muslim mempunyai status yang lebih tinggi di hadapan Allah. Pandangan ini melahirkan sebuah budaya yang menghargai Ulama karena ia adalah orang yang menjadi rujukan umat Muslim untuk mendapatkan pengetahuan dari Ulama tersebut .

Masih banyak lagi alasan yang melandasi status sosial kiai menjadi terhormat dikalangan masyarakat umum. Misalnya, budaya mengharapkan Barokah, karomah atau ijazah wirid dari kiai juga menjadikan kiai itu sangat disegani. Masyarakat sangat

meyakini kalau kiai adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Tidak heran jika ada seorang yang datang bertamu kepada kiai hanya untuk meminta Do'a atau hanya sekedar meminta air yang sudah dido'akan sang kiai. Sebagai contoh lainnya misalnya, budaya mencium tangan kiai yang terkesan berlebihan, dengan niat mengharapakan barokah kiai. Inilah yang membuktikan kedekatan emosional, yang menjadikan kiai banyak menjadi panutan masyarakat dan pelindung masyarakat.

2. Kiai Sebagai Pendidik

Hampir semua kiai di Indonesia memiliki pondok pesantren dari situlah seorang kiai dalam mentransformasikan ilmunya melalui pondok pesantren dan pembelajaran yang dilakukan di pondok pesantren tidak hanya itu dalam masyarakat kiai memberikan pengajian dan nasehat-nasehat bagi masyarakat secara umum karena manusia walaupun sudah pintar, cerdas sulit untuk berubah bahkan Allah SWT. Berfirman yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ

اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali

*tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS Ar-Ra'd:11).*⁵¹

Menurut Endang Turmudi karena kiai adalah yang berpengetahuan luas yang kepadanya penduduk desa belajar pengetahuan, kepandaian dan pengetahuannya yang luas tentang Islam menyebabkan kiai selalu mempunyai pengikut bai para pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya maupun santri yang tinggal di pondok sekitar rumahnya.⁵²

Juga disebutkan keberhasilan kiai pesantren dalam melakukan transformasi masyarakat secara total menjadikan kedudukan kultural pesantren cenderung lebih kuat darai pada masyarakatnya, Nama besar sebuah pesantren seperti Tebuireng, Situbondo dan Tegalrejo, Ploso, Jampes, Lirboyo, untuk menyebut beberapa nama, bukan ekeदार menunjukkan kebesaran dan karisma kiai-kiai pendiri pesantren itu, tetapi juga menunjukkan keberhasilan kiai pesantren bersangkutan dalam melakukan transformasi masyarakat di sekitarnya.⁵³ Kiai adalah pemimpin tertinggi di sebuah pondok pesantren, sosoknya yang kharismatik dan pengetahuan agama yang luas membuat kiai sangat disegani dan dihormati. Hal tersebut tidak cukup sampai disini, kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi sehingga santri yang nyantri di pondok pesantren yang dipimpinya pun banyak.

Akan tetapi jika kiai kharismatik tersebut telah tiada, apa yang akan terjadi? kenyataannya, kepercayaan terhadap *pond-pest* tersebut

⁵¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Gema Risalah Perss, 1993), hal 348

⁵² Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta, LKiS, 2004), hal 95

⁵³ Lihat A Muhaimin Iskandar, hal 35

turun sehingga santrinya pun sedikit demi sedikit berkurang. Masyarakat yang dulunya mengelu-elukan, berangsur-angsur meninggalkan. Kebebasan yang dialami santri karena kurang control dan kedisiplinan. Fenomena ini terjadi pula di pondok An-Nidlomiyah Sepanjang Sidoarjo.

Ketika KH. Badrus Soleh Syakur yakni pengasuh pondok An-Nidhomiyah Sepanjang Sidoarjo masih hidup, dengan kharismanya dan pengetahuan agama yang luas banyak masyarakat yang menimba ilmu di pondoknya, kerukunan keluarga pengasuh terjaga, keutuhan santri putra dan putri terjamin, santri yang bermukim di pondok tersebut baik putra maupun putri sangat banyak, serta santri yang penuh dengan kedisiplinan karena control yang diterapkannya sangat tinggi. Masalah kemudian muncul ketika KH. Badrus Sholeh Syakur yang sering dipanggil dengan sebutan gus Badrus, menghadap sang Ilahi. Semuanya baik keluarga pengasuh (*ndalem*), santri dan masyarakat luas yang mengenalnya merasa kehilangan. Pondok kehilangan seorang panutan dan pemimpin yang sangat disegani, dihormati dan di sanjung.

Banyak model pesantren yang bermunculan yang memberikan variasi dan salah satu unsur pesantren adalah kiai sebagai pendidik atau yang mengajar, para pengamat mencatat ada lima unsur tentang pesantren: Kiai, santri, mesjid, Pondok (asrama), dan pengajian.⁵⁴ Ada yang tidak menyebutkan unsur pengajian, tetapi mengantinya dengan unsur ruang belajar, aula

⁵⁴ Mustafa Syarif, Suparlan S, dan Abdur R Saleh, *Administrasi Pesantren*, (Jakarta: PT Paryu Parkah, tt) hal 6 untuk selanjutnya akan disebut Syarif, *Administrasi* Lihat juga M Yacup, *Pondok Pesantren dan Pepmberdayaan Masyarakat Desa*, (Bandung: Angkasa, 1983) hal 62

atau bangunan-bangunan lain.⁵⁵ Kiai disamping pendidik dan pengajar, juga pemegang kendali menejerial pesantren. Bentuk pesantren yang bermacam-macam adalah pantulan dari kecendrungan kiai, kiai memiliki sebutan yang berbeda tergantung tempat tinggalnya.

3. Kiai Sebagai Motivator

Tidak dapat dipungkiri seorang kiai yang hidup ditengah di tengah masyarakat banyak mengakui bahwa kiai sering dan bahkan selalu memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya dalam hal keagamaan. Kiai juga sering melakukan motivasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal keagamaan seperti pengajian, dan kegiatan-kegiatan yang lain dan pandangan seperti ini kiai dianggap motivator terhadap masyarakat dan partisipasinya dalam sebuah kegiatan.

Dari beberapa penelitian banyak ditemukan bahwa kiai yang bertindak sebagai intelektual organik (*organik intellectual*) juga mempunyai motivasi berbeda-beda. Ada kiai yang motivasinya membela NU, dengan melihat Gus Dur sebagai lambang dari NU, tetapi ada juga yang motivasinya kekawatiran akan kehilangan "hak-hak" istimewanya, sebagai bagian dari kelompok dominan dalam masyarakat. Begitu juga kiai yang bertindak sebagai intelektual tradisional (*traditional intellectual*) dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Ada kiai intelektual organik yang dilandasi oleh analisis rasional atas kepemimpinan Gus Dur pada waktu jadi Presiden RI dan memotivasi masyarakat agar meniru dan keilmuan

⁵⁵ Departemen agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Pusat Informasi Pesantren, Proyek Pembinaan dan Bantuan Kepala Pondok Pesantren Jakarta, 1985/1986* hal 31

dan kepemimpinannya, tetapi ada juga yang dilandasi oleh sikap oposan, karena perbedaan ideologi.

Variasi fungsi dan perbedaan motivasi ini berpengaruh kepada wacana yang dikembangkan oleh masing-masing kiai. Kiai yang menjalankan peran kenabian (*profetik*), wacananya berada pada wilayah etik dan moral politik, yang ditujukan untuk kepentingan umat secara keseluruhan, baik yang muslim maupun yang non muslim. Kiai intelektual tradisional rasional wacana politiknya berada pada wilayah ketatanegaraan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku, dan ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kiai intelektual tradisional oposan, wacana politiknya berada pada wilayah hukum Islam, dan dimaksudkan untuk menegakan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan kiai intelektual organik yang membela NU wacana politiknya berada pada wilayah simbolis dan irasional. Kiai intelektual organik khawatir, wacana politiknya berada pada wilayah konflik yang mengundang konflik dengan orang lain atau kelompok lain. Kiai simultan, wacana politiknya dipengaruhi oleh lingkungan dimana dan dengan siapa ia berwacana.

Adanya varian fungsi kiai, di satu sisi tidak menguntungkan pemerintahan contohnya Gus Dur ketika jadi, karena tidak semua kiai membantu membangun hegemoni dalam rangka mempertahankan dominasi. Bahkan kiai yang khawatir, justru dapat mengganggu dan merusak citra kepemimpinan Gus Dur. Di sisi lain, variasi fungsi kiai dapat menumbuhkan demokratisasi di Indonesia. Namun, bila tidak dikelola secara baik, perbedaan motivasi tersebut juga dapat menimbulkan konflik antar umat beragama maupun antar umat Islam, karena setiap kiai mempunyai kekuasaan hegemonik yang dapat dipakai untuk memobilisir

masyarakat, khususnya para santri. Kekuasaan hegemonik kiai tidak hanya bersumber dari intelektual, moral dan ekonomi, tetapi juga bersumber dari nasab (*geneology*), dan usia (*gerontocracy*), serta hubungan patron-klien antara santri dan kiai. Dalam komunitas kiai dan NU, tradisi untuk menghormati kiai dan keluarganya dan yang tua, sangat kuat dan terus dipertahankan, sebagai sumber kekuasaan hegemoni. Maka dari itu kiai sebagai motivator diharapkan memberikan perubahan yang lebih baik untuk masyarakat nusa dan bangsa.

D. Klasifikasi Kiai dalam Masyarakat

Klasifikasi kiai juga dilakukan oleh Ismail.⁵⁶ Dari segi fungsinya ia berpendapat bahwa pada zaman kolonial Belanda, bagi masyarakat Jawa terdapat dua tipologi kiai yaitu: *Pertama*, kiai bebas atau kiai yang memosisikan diri dijalur dakwah dan pendidikan (*ad-da'wah wa atarbiyah*). Kelompok ini biasanya juga disebut kiai pondok pesantren yang tugas utamanya adalah sebagai guru, pengajar, dan sekaligus komunikator (*muballigh*) agama. Pada umumnya mereka menetap di daerah pesantren. *Kedua*, kiai penghulu atau kiai pejabat yang diangkat oleh pemerintahan belanda. Tugas utamanya mereka berada pada jalur *at-tasri' wa al-qadha*, yaitu pelaksana bidang kehakiman yang menyangkut syariat Islam. Dari perspektif historis, kelompok kiai ini sudah ada sejak berabad-abad lamanya, yakni sejak tahta kerajaan Islam berkuasa di tanah Jawa.

⁵⁶ Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya Dimasa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hal 63-64

Klasifikasi kiai juga dilakukan oleh Turmudi.⁵⁷ dia mencoba melihat kepemimpinan kiai secara umum dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek kultural dan politik. ia menilai bahwa hubungan antara kiai dan masyarakat diatur oleh norma-norma yang diambil dari pemahama mereka tentang Islam. Menurut Turmudi, para kiai bisa di bedakan menjadi empat tipologi: yaitu pertama *kiai pesantren*, *kiai tarekat*, *kiai politik*, dan *kiai panggung*. Ia menambahkan bahwa dalam kenyatannya seorang kiai dapat di golongankan dalam lebih dari satu katagori. Misalnya, ada seorang kiai politik yang terkenal karena ia menjadi anggota legeslatif di sebuah kota. Dan juga mereka dianggap kiai panggung yang kadang setiap malam menyampaikan ceramah di berbagai tempat.

Kiai pesantren, adalah mereka yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas mengajar di pesantren untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) masyarakat melalui pendidikan. Kiai model ini pada umumnya sangat ditaati oleh para santri, wali santri, dan masyarakat. Mereka berkeyakinan bahwa dengan mentaati para kiai maka akan terjamin eksistensinya dimasa depan.

Kiai tarekat adalah mereka yang memusatkan aktivitasnya dalam membangun kecerdasan hati (dunia batin) umat Islam. Oleh karena tarekat adalah sebuah lembaga formal maka pengikutnya adalah juga anggota formal gerakan tarekat. Jumlah pengikut kiai model ini bisa lebih banyak dibandingkan pengikut kiai pesantren, tentunya jika kiai tarekat tersebut berkedudukan sebagai *mursyid*, sebab, melalui cabang cabang yang adad di seluruh Indonesia para anggota tarekat secara otomatis menjadi pengikut kiai tarekat.

⁵⁷ Lihat Endang Turmudi, "Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan" (Yogyakarta, LKIS, 2003) hal: 32-33

Kiai politik adalah mereka yang mempunyai perhatian (*concern*) untuk mengembangkan NU (Nahdatul Ulama) dan pada umumnya terlihat pada politik praktis. Pengembangan organisasi NU dalam kurun waktu yang cukup lama dikelola oleh kiai yang termasuk dalam kategori ini, kiai model seperti ini juga memiliki pengikut meskipun jumlahnya menjadi pengikut kiai tarekat.

Kategori terakhir adalah *kiai panggung*. Mereka adalah para juru dakwah (*muballigh-da'i*) yang hampir setiap hari menyampaikan ceramah agama diberbagai tempat. Mereka mengembangkan agama menyebarkan Islam melalui kegiatan dakwah. Pengikut kiai semacam ini juga sangat banyak dan tersebar diberbagai kabupaten dan provinsi. Terlebih lagi jika ia tergolong kiai panggung yang amat populer di Indonesia.⁵⁸

Lebih lanjut terkait dengan para kiai menyikapi masalah politik sosial, ekonomi, dan pendidikan, menurut kajian Suprayogo,⁵⁹ hal itu dibedakan menjadi empat: *pertama*, kiai spiritual, yakni kiai yang hanya mengurus dan mengajar di pesantren serta berkonsentrasi beribadah. *kedua*, kiai advokasi, yakni kiai yang aktif mengajar di pesantren namun ia sangat peduli terhadap persoalan pemberdayaan masyarakat. *ketiga*, kiai politik adaptif, yakni kiai yang peduli terhadap organisasi politik dan kekuasaan serta dekat dengan pemerintah dan pada umumnya berafiliasi dengan Golkar. *keempat*, kiai politik mitra kritis, yakni kiai yang peduli terhadap organisasi politik, namun mereka kritis

⁵⁸ Lihat Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta, LKiS, 2003) hal: 34

⁵⁹ Lihat Imam Suprayogo, *Kiai Politik, Kiai Advokatif, Kiai Spiritual*, Desertasi tidak diterbitkan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998)

terhadap pemerintah, dan pada umumnya mereka berafiliasi dengan PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

E. Pengertian Transformasi Sosial

Perubahan adalah suatu keniscayaan, yang selalu terjadi disetiap sudut. Perubahan yang terjadi dapat dirasakan, tapi sering juga tidak disadari, bahkan dilupakan dan tidak dihiraukan, sejarah telah banyak berbicara tentang perubahan. Perubahan yang dialami oleh masyarakat (*perubahan sosial*) adalah tema yang banyak diungkap. Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat sangat kompleks, yang dapat melahirkan persoalan tersendiri. Hal ini terjadi secara alami atau karena rekayasa sosial (*enggenering society*). Proses tersebut langsung sepanjang sejarah hidup manusia, pada tingkat komunitas lokal, regional dan global yang menggambarkan betapa luasnya cakupan perubahan sosial. Salah satu ilmu yang mempunyai perhatian lebih terhadap perubahan sosial (*social change*) Menurut H.A.R. Tilaar adalah sosiologi.

Dari sini kemudian banyak lahir teori-teori mengenai perubahan sosial. Karena perubahan sosial merupakan suatu proses yang berkesinambungan maka penelaahan tentang proses tersebut mempunyai perspektif sejarah evolusioner.⁶⁰ Menurut Charles F. Andrian, sebagaimana dikutip oleh Suwito, perubahan yang terjadi dalam masyarakat juga dapat terjadi secara mendadak, baik yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan. Perubahan dengan cara cepat (*revolusioner*) adalah sebagaimana tampak dalam suatu masyarakat yang dilanda musibah seperti gempa bumi, badai tsunami dan lain sebagainya. Sedangkan revolusi yang kedua

⁶⁰ H A R Tilaar, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan: Pengantar Pedagogis Transformasi Untuk Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002) hal 03

adalah perubahan yang dikendalikan dan diorganisasikan secara sadar. Perubahan semacam ini akan berhasil, apabila pengendali perubahan (*agent of change*) lebih kuat dibanding kekuatan yang ingin dipertahankan.

Dalam terminologi sosiologis, perubahan sosial sering kali disamakan dengan istilah transformasi sosial, yaitu suatu perubahan secara menyeluruh dalam bentuk, rupa, sifat, watak dan sebagainya dalam hubungan timbal balik antar manusia, sebagai individu maupun kelompok. Adapun faktor yang mungkin terlibat dalam proses perubahan sosial adalah peranan faktor pendidikan, teknologi, nilai-nilai kebudayaan dan gerakan sosial.

Menurut Sarjono Soekamto sebagaimana mengutip Kingsley Davis, Perubahan sosial adalah yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contoh yang diberikan oleh Davis adalah munculnya pengorganisasian buruh di dalam masyarakat. Contohnya yang diberikan oleh Davis adalah munculnya pengorganisasian buruh di dalam masyarakat kapitalis yang telah menyebabkan perubahan – perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Sementara itu, Gillin and Gillin yang juga dikutip oleh Soekamto menerangkan bahwa perubahan sosial merupakan variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan geografis, kebudayaan, komposisi pendidikan, ideologi maupun karena adanya *difusi* atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.⁶¹

Sedangkan menurut Mac.Iver, sebagaimana dikutip oleh Suwito, perubahan sosial adalah sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social realionship*) atau sebagai perubahan

⁶¹ Soerjono Soekamto, *Sosiologi, Suatu Penantar* ,(Jakarta: Rajawali Press, 1990) hal : 336-337

keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial. Sementara Samuel Koenig yang juga dikutip Suwito, mengatakan, bahwa perubahan sosial adalah modifikasi- modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intern maupun ekstern.⁶²

1. Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat penting. Ia bahkan telah menjadi salah satu cabang dari ilmu sosiologi dengan disokong oleh ilmu komunikasi, psikologi, ekonomi, antropologi, manajemen dan ilmu politik. Keterlibatan ilmu-ilmu tersebut diakibatkan oleh fakta bahwa perubahan sosial itu berkorelasi resiprokal (timbang balik) dengan ilmu-ilmu tersebut diatas.

Perubahan sosial dapat terjadi secara cepat ataupun lambat, tergantung kepada situasi lingkungan maupun faktor-faktor lain yang saling berkaitan. Menurut Ravik Karsidi perubahan sosial dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan manusia. Ruang gerak perubahan itupun berlapis lapis dimulai dari kelompok terkecil atau mulai dari tingkat individu keluarga hingga tingkat dunia.⁶³

Dalam teori perubahan juga yang digunakan adalah teori terencana yang pernah dikenalkan oleh Kurt Lewin untuk membedakan perubahan yang sengaja digerakkan dan

⁶² M Fahmi, *Islam Transendental Menelusuri Jejak-Jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005) hal 148

⁶³ Lihat Achmat Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007) hal 56-76

direncanakan dalam sebuah organisasi, dan jenis perubahan lainnya.⁶⁴

Berdasarkan jangka waktu terjadinya perubahan sosial, Ibrahim membedakan antara perubahan jangka pendek dan perubahan jangka panjang. Berdasarkan tingkat terjadinya perubahan sosial dapat dibedakan pada tingkat *mikro* (individu), tingkat *intermediate* (kelompok), dan tingkat *makro* (masyarakat) dengan cara menyelenggarakan dua macam dimensi sebagai titik tolak melihat terjadinya perubahan sosial yaitu ”jangka waktu” dan tingkat terjadinya (subjek perubahan).

Ada beberapa teori yang digunakan dalam melakukan perubahan sosial (*social transformation*) yang diantaranya adalah:

2. Teori Tindakan

Menurut pandangan Marx Weber, sosiologi merupakan ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) terhadap tindakan sosial antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasarnya, yaitu konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman; yang menyangkut metode untuk menerangkan konsep tindakan sosial.

Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial, Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi yang terkait dengan tindakan sosial, yaitu;

- a. Tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna yang subjektif; yang meliputi berbagai tindakan nyata.

⁶⁴ Uyung Sulakmana, *Managemen Perubahan*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2004) hal 55

- b. Tindakan nyata yang bersifat membantu yang sepenuhnya dan bersifat subjektif.
- c. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang dan tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
- d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Weber memberikan klasifikasi perilaku sosial sebagai berikut:

- a. Kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan.
- b. Kelakuan yang berorientasi kepada suatu nilai seperti nilai estetis, politik, keagamaan, dll.
- c. Kelakuan yang menerima orientasinya dari perasaan atau emosi seseorang, (kelakuan efektif atau emosional).
- d. Kelakuan yang menerima arahnya dari tradisi (kelakuan tradisional).⁶⁵

Weber membedakan adanya empat macam rasionalitas yang mendasari tindakan sosial dan semakin rasional tindakan sosial akan semakin mudah dipelajari.

Kempat macam rasionalitas tindakan tersebut adalah:

- a. *Zweckrational* yaitu tindakan sosial yang murni dimana si aktor tidak hanya menilai cara terbaik untuk mencapai tujuannya. Tetapi juga menentukan nilai darai tujuan itu sendiri. Tujuan dalam *zweck rasional* tidak absolut, iai juga

⁶⁵ Lihat Achmat Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007) hal 56-76

menjadi cara rasional untuk tujuan selanjutnya. maka mudah untuk memahami tindakan tersebut.

- b. *Werkrational action*, dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan sebuah cara yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Dan tindakan ini cukup rasional karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan.
- c. *Affectual action*, yang merupakan tindakan yang dibuat buat tindakan ini di pengaruhi oleh emosi dan kepura-puraan si aktor. Dan tindakan ini sukar dipahami, kurang dan tidak rasional.
- d. *Traditional action* yaitu tindakan yang didasarkan atas tindakan kebiasaan-kebiasaan mengerjakan sesuatu dimasa lalu saja.

Teori tindakan ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan tindakan-tindakan pelaku dan memahami rasionalitas dibalik tindakan pelaku tersebut. Sejalan tentang penelitian tentang peran kiai pesantren dalam partai politik ini dapat melakukan interpretasi – interpretasi terhadap tindakan-tindakan sosial bentuk – bentuk peran kiai yang dikata gorikan berperan dalam partai politik serta memahami motif mereka apa yang mendasari mereka melakukan atau memilih peran tersebut.⁶⁶

3. Paradigma Transformasi Sosial (*Social Transformation*)

Istilah paradigma, secara sederhana dapat diartikan sebagai kacamata atau alat pandang. Istilah ini menjadi terkenal setelah

⁶⁶ Peran kiai yang korelasikan dengan tindakan sosial karena ingin mengetahui motif kiai dalam melakukan trnsformasi social dalam penelitian ini

buku yang berjudul *The Structure Of Scientific Revolution* karya Thomas Khun ditulis paradigma yang pahami Khun adalah, bahwa pada dasarnya realitas sosial itu dikonstruksi oleh *mode of thought* atau *mode inquiry* tertentu yang pada gilirannya akan menghasilkan *mode of knowing* tertentu pula. Dengan lain kata, Khun mengartikan paradigma sebagai suatu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan dan pijakan suatu teori.

Definisi lain mengenai paradigma adalah pijakan untuk melihat suatu realitas. Kekuatan sebuah paradigma terletak pada kemampuan membentuk apa yang dilihat, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang dianggap masalah, apa masalah yang dianggap manfaat untuk dipecahkan, serta metode apa yang digunakan dalam meneliti dan berbuat.

Paradigma Ilmu sosial, Modern tersebut adalah teori marx, Weberian, Durkheimian yang akan diterangkan sebagaimana teori-teori barat tersebut diantaranya:

4. Paradigma Transformasi Sosial Karl Marx

Paradigma Transformasi Sosial Karl Marx⁶⁷ secara filosofis dipengaruhi oleh pandangan filsafat materialisme. Dalam filsafat materialisme kenyataan berada dipersepsi manusia, demikian juga

⁶⁷ Karl Heinrich Marx lahir di Trier, Jerman, di daerah Rhine pada tahun 1818 Marx memperoleh pengetahuan pemikiran pencerahan abad kedelapan belas ia pernah mempelajari ilmu hukum selama satu tahun di Universitas Berlin di sana, sebagai akibat dari hubungan dengan kelompok Hegelian muda, beberapa unsure dasar sosialnya mulai terbentuk ia menyelesaikan disertasi doktornya di Universitas Berlin Marx pernah tinggal di Paris (1843-1854) dan terlibat kegiatan radikal Paris pada masa itu merupakan suatu pusat liberalisme dan radikalisme sosial dan intelektual yang penting di Eropa Dan Marx juga berkenalan dengan pemikir-pemikir penting dalam pemikiran social perancis Termasuk St Simon dan Proudhon

adanya kenyataan objektif sebagai penentu terakhir dari ide. Materialis mengarahkan anggapan bahwa kenyataan yang sesungguhnya adalah benda atau materi, dan kenyataan ini diacukan untuk menjawab sejumlah soal yang berhubungan dengan sifat dan wujud dari keberadaan.

Teori transformasi sosial yang dipahami Marx, secara filosofis mempunyai turunan dari materialisme yang akhirnya muncul teori-teori determinisme *historis* dan *matrealisme historis*. Marx, menjelaskan materialisme merupakan hubungan – hubungan manusia individu dalam masyarakat sesuai dengan kenyataan sejarah. Bagi Marx, hubungan sesama manusia di dalam suatu komunitas masyarakat (sosial) kembali kepada benda-benda atau zat yang membentuknya.

5. Paradigma Transformasi Sosial Emile Durkheim

Emile Durkheim⁶⁸ memandang masyarakat sebagai sebuah tatanan moral, yaitu seperangkat tuntunan normatif lebih sebagai kenyataan ideal daripada kenyataan material, yang terdapat dalam kesadaran individu walaupun dalam cara tertentu berada diluar individu.

Tuntunan normatif tersebut, berbentuk sentimen - sentimen kolektif atau nilai – nilai sosial yang pada hakikatnya menjadi dasar dari kohesi dan integrasi social, dalam pengertian tersebut, Emile Durkheim melakukan transendensi hubungan hubungan material

⁶⁸ Emile Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1854 di desa Epial, Prancis Pada tahun 1879 ia menjadi mahasiswa di *ecole Superieure* di kota Paris, mulai tahun 1887 sampai 1902 diangkat menjadi mahaguru ilmu-ilmu sosial di *Bordeaux* Masa perang dunia I ia kehilangan putra satu satunya yang membuatnya sangat bersedih Emile Durkheim meninggal pada tanggal 15 November 1917, akibat serangan jantung

yang terjadi secara real dalam masyarakat. Transformasi sosial dapat terjadi karena semangat moral, nilai-nilai, atau keyakinan yang sama dari masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran kolektif (*collective consciousness*) yang terbentuk dari suatu konsensus akan menciptakan gambaran kolektif yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat secara keseluruhan, baik yang tercermin baik dalam bentuk huku atau peraturan.

Teori transformasi sosial Emile Durkheim sebagaimana dipaparkan di atas, sebenarnya dipengaruhi oleh konsep “hukum kemajuan manusia” Auguste Comte (1798-1857) yang menyatakan, bahwa semua masyarakat melewati tiga tahap yaitu (1). Teologis atau khayal, (2). Metafesis atau abstrak, (3) Ilmiah atau positif. Namun, Emile Durkheim tidak mengikuti sepenuhnya keyakinan rasionalitas Comte. Hanya saja terpengaruh oleh corak positivistic Comte.

6. Paradigma Transformasi Sosial Marx Weber

Paradigma Transformasi Sosial Marx Weber⁶⁹ bermula dari penjelasan tentang usaha pencapaian ide ini dapat digerakkan oleh dominasi dan otoritas suatu masyarakat . Otoritas tersebut dibedakan Weber menjadi tiga tipe, yaitu: tipe otoritas tradisional (kepercayaan yang mapan terhadap kesucian tradisi), otoritas kharismatik (daya tarik pribadi seorang pemimpin), dan otoritas legal-rasional (komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi), Ketiga otoritas ini mengontrol seluruh

⁶⁹ Marx Weber Lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah Ketika berumur 18 tahun Weber minggat dari rumah Belajar di Universitas Heildelberg Setelah kuliah tiga semester ia meninggalkan Heildelberg untuk dinas Militer dan tahun 1884 ia kembali ke Berlin kerumah orang tuanya dan belajar di Universitas Berlin

kekuatan masyarakat, bahkan memunculkan birokrasi dan menjadi sumber penting bagi munculnya cita-cita dan nilai – nilai .hukum-hukum baru, dimunculkan secara sadar oleh pemegang otoritas. Dengan kata lain, kesadaran kaum elit pemegang otoritas dapat mengendalikan masyarakat dan sejarah. Peranan mereka (baca: kebijakan, undang–undang produk mereka) mendorong masyarakat untuk mengalami transformasi. Teori transformasi sosial Weber secara implisit juga dapat terlihat dalam penjelasannya tentang transisi menuju kapitalisme. Dan uraian tentang hal tersebut diatas tentang paradigma transformasi sosial Weber di atas, dapat disederhanakan sebagaimana diungkapkan Kuntowijowo, bahwa hubungan kausal dari terjadinya perubahan sosial adalah sebagai akibat dari perubahan-perubahan pada tingkat struktur teknik.⁷⁰

Selanjutnya juga akan mengikuti tradisi pemikiran sosiologi interperatif dan fenomenologis sehingga akan digunakan metode *verstehen* sebagaimana yang di gunakan Weber, atau *interperative undertanding* untuk memahami fenomena yang diteliti. Karena dalam pandangan Weber,⁷¹ sosiologi sebagai ilmu yang berusaha menafsirkan dan memahami tindakan sosial nantara hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Teori ini akan kemudian disebut sebagai teori tindakan.

Untuk memahami motif keterlibatan kiai pesantren dalam perubahan sosial akan digunakan konsep fenomenologi dari Schutz.⁷² Schutz menghusukan perhatiannya kepada satu bentuk dari subjektifitas yang disebutnya sebagai inter-subjektifitas.

⁷⁰ Lihat M Fahmi, *Islam Transendental Menelusuri Jejak-Jejak Pemikiran Islam Kuntuwijoyo*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005) hal: 153-160

⁷¹ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj Alimadnan (Jakarta: Prenada Media, 2004) hal 43-49

⁷² *Ibid*, hal 63-73

Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subjek atau secara sederhana menunjuk kepada kesadaran umum kesadaran khusus dari kelompok sosial yang sedang saling berinteraksi. Inter-subjektivitas yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi, tergantung kepad pengetahuan tentang peran masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi. Schutz memusatkan perhatiannya kepada struktur kesadaran yang diperlukan untuk saling memahami antar sesama manusia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antar individu maupun antar kelompok.

Empat unsur pokok dari teori fenomenologi, yaitu (1) perhatian terhadap aktor: (2) perhatian kepada kenyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*): (3) perhatian kepad masalah mikro, proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan interaksi tatap muka dalam hubungannya dengan situasi tertentu: dan (4) perhatian pertumbuhan perubahan dan proses tindakan dalam masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari.⁷³ Akan diperhatikan pula dalam penelitian lapangan.

Maka, berkurangnya waktu kiai mengelola pondok dan mengajar santri memungkinkan menjadi sebab rendahnya intensitas pengajaran di pondok itu, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan pola, peran, serta fungsi kepada kiai. Peran ganda kiai, sebagai aktor dalam perubahan dan ulama, menyebabkan semakin berat tugas yang harus dilakukan setiap harinya.

⁷³ *Ibid*, hal 67-73

Bab III

KIAI SEBAGAI AKTOR DALAM TRANSFORMASI SOSIAL

Dalam bab ini akan diuraikan posisi kiai dengan agama Islam, bagaimana hubungan kiai dengan sunni (*Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*) bagaimana keterkaitan paham tersebut dengan berdirinya pesantren-pesantren di Indonesia. Di samping itu juga akan diuraikan kiai pesantren sebagai pusat peradaban yang memberi corak tersendiri pada keilmuan di pesantren, dan kiai dalam dinamika kemasyarakatan. Maka dari itu akan lebih jelas dan pola-pola kiprah kiai dalam melakukan transformasi sosial.

A. Kiai dan Agama Islam

Predikat kiai selalu berhubungan dengan sesuatu gelar yang menekankan pemuliaan dan pengakuan dalam masyarakat, yang diberikan secara sukarela kepada ulama Islam sebagai pemimpin masyarakat. Dengan demikian, kiai adalah muslim terpelajar (*ulama*²) yang selalu membuktikan hidupnya untuk Tuhan serta memperdalam dan menyebarluaskan ajaran-ajaran-Nya kepada masyarakat. Kiai dengan kelebihan ilmu pengetahuan agama islam, seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam.⁷⁴

Kiai di kalangan Islam tradisional Jawa merupakan tokoh kegamaan kharismatik yang bisa dibandingkan dengan Ajengan di masyarakat Jawa Barat dan Syekh di masyarakat Minangkabau Sumatra Barat.⁷⁵

Kiai sebagai pemimpin agama yang secara tradisional berasal dari satu keluarga berpengaruh, kiai merupakan faktor pemersatu dalam tatanan sosial masyarakat. Menurut pengamatan Hirikoshi, pemanfaatan peran kiai juga dinilai amat tinggi oleh masyarakat.⁷⁶ Kiai menduduki posisi sentral dalam masyarakat pedesaan dan mampu mendorong mereka untuk bertindak kolektif. Dia mengambil peran sebagai poros hubungan antara umat dengan Tuhan. Pada pandangan besar pengikutnya, kiai adalah contoh

⁷⁴ Lihat, Ali Maschan Moesa, *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*, (Surabaya, LEPKISS, 1999) hal1

⁷⁵ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), hal526

⁷⁶ Hiroko Hirokoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), hal 232

muslim ideal yang ingin mereka capai. Dia seorang yang dianugrahi pengetahuan dan rahmat Tuhan.⁷⁷

Kiai dalam agama menurut Quraisy Shihab ada empat belas tugas utama yang harus dijalankan oleh kiai, sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan kitab suci: *pertama*, menyampaikan (*tabligh*) ajaran-ajarannya, sesuai dengan perintah: wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. (QS.5:65). *Kedua*, menjalankan ajaran-ajarannya, berdasarkan ayat: "dan kami turunkan al Kitab kepadamu untuk kamu jelaskan kepada manusia" (QS.16:44). *Ketiga*, memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat, berdasarkan ayat: "dan Allah turunkan bersama mereka al Kitab dengan benar, agar dapat memutuskan perkara yang diperselisihkan manusia" (QS.2:213). *Keempat*, memberikan contoh-contoh pengalaman, sesuai dengan hadist Aisyah r.a. yang menyatakan bahwa perilaku Nabi adalah praktek dari al-Qur'an.

Kalau dikatakan bahwa kiai adalah pewaris para Nabi, maka hal ini mengandung dua masalah, pertama, pengetahuannya harus lebih. Dan kedua, moralnya pun harus bisa dicontoh. Dari sudut pandang agama ini, sudah barang tentu kiai adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih dan berkewajiban untuk menyebarkannya. Dalam al-Qur'an disebutkan: "hendaknya ada diantara kamu ada yang harus memperdalam agama dan yang akan menyebarkannya." Jadi, tolok ukurnya adalah pengetahuan, di samping ukuran lainnya. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana dalam masyarakat kita adalah pengakuan masyarakat itu sendiri, bahwa seseorang itu adalah kiai.

⁷⁷ *Ibid*, hal 232

Ziemek menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi kiai, yaitu: *Pertama*, berasal dari keturunan atau keluarga kiai di lingkungannya agar dapat menggunakan kesetiaan kerabat dan masyarakatnya. *Kedua*, sosialisasi dan proses pendidikannya dalam suatu pesantren terpadang, yang dilengkapi dengan pengalaman dan latar belakang kepemimpinan yang telah ditanamkan. *Ketiga*, adanya kesiapan pribadi yang tinggi untuk bertugas, yakni kemauan untuk mengabdikan kehidupan pribadinya demi tugas di pesantren. *Keempat*, sebagai pemimpin agama dan masyarakat, ia harus memiliki kharisma, sehingga mampu meyakinkan masyarakat untuk bekerja secara suka rela guna membangun dan membiayai pesantren. *Kelima*, mampu mengumpulkan dana dan bantuan tanah wakaf dari masyarakat.⁷⁸

Dengan demikian, peran yang biasanya dituntut dari para kiai adalah lomba dalam membuat kebijakan (*musabaqah bi al-khirat*) yang titik tolaknya adalah upaya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Kiai dan Nahdatul Ulama (NU)

Nahdatul Ulama NU) merupakan kumpulan para kiai yang mencoba membangkitkan semangat para pengikutnya dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, kiai pesantren dalam NU memiliki kedudukan yang sentral, baik sebagai pendiri, pemimpin dan pengendali organisasi, maupun sebagai panutan kaum nahdiyyin. Arti penting lahirnya Nu ini tidak terlepas dari konteks saat ini, yakni untuk menjaga eksistensi

⁷⁸ Lihat, Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1986) hal 173

“jama’ah tradisional” ketika harus berhadapan dengan gerakan perubahan yang ketioka itu telah terlembagakan, antara lain dalam Muhammadiyah.⁷⁹

Dalam sejarahnya keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan *Kebangkitan Nasional*. Spirit kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Kalangan pesantren (kiai) yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon Kebangkitan Nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) 1916 Kemudian tahun 1918 didirikan *Taswirul Afkar* atau dikenal juga dengan *Nahdlatul Fikri* (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan *Nahdlatul Tujjar*, (pergerakan kaum pedagang) serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagi kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra Islam, yang selama ini

⁷⁹ Lihat, A Gaffar Karim, *Metamorfosis NU Politisasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 1995) hal 47

banyak diziarahi karena dianggap bidah. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah Pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Sebaliknya kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Dengan sikapnya yang berbeda itu kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai *delegasi* dalam *Mu'tamar 'Alam Islami* (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan *Komite Hejaz*, yang diketuai oleh KH Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional dari kalangan intelektual pesantren (kiai) pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga. Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan *ad hoc*, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai Kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi

yang bernama *Nahdlatul Ulama* (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (26 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Dan NU adalah organisasi keagamaan, keislaman, dan kemasyarakatan (*Jam'iyah Diniyah, Islamiyyah, dan Ijtima'iyyah*).⁸⁰

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab *Qanun Asasi* (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab *P'riqad Ahlussunnah Wal Jamaah*. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam *khittah NU*, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Menurut Ahmad Siddiq, terdapat dua keputusan penting ketika pertama kali organisasi ini di lahirkan di Surabaya: pertama, berupaya mempertahankan tradisi keagamaan yang *bersumber* dari ajaran-ajaran para imam madzhab yang dianut oleh para kiai. Kedua, membentuk organisasi (*jam'iyah*) untuk wadah persatuan para kiai dalam tugas memimpin umat menuju terciptanya cita-cita kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izza al-Islam wa al muslimin*).⁸¹

Modernisasi NU, tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kini tantangan melakukan modernisasi dalam *NU* mengambil bentuk modernisasi sistem pengelolaannya. Warga NU telah banyak yang menggunakan IT untuk urusan sehari-hari, hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga harus melaksanakannya. Seiring dengan itu, anak-anak dari pimpinan NU, dari tingkat pusat

⁸⁰ Lihat PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-29* (Jakarta: Lajnah Ta'lif Wa An-Nasyr, 1996) hal 153

⁸¹ Ahmad Siddiq, *Khittah Nahdliyah* (Surabaya: Balai Buku, 1980) hal 27

sampai tingkat dusun banyak yang menguasai berbagai bidang profesi, mengikuti berbagai jenjang pendidikan formal.

Ini tentu, *menimbulkan* berbagai kesulitan bagi pimpinan NU diberbagai tingkatan. Adakah ukuran yang digunakan menjadi berbeda-beda? Bukankah perbedaan pendidikan juga bisa mengakibatkan perbedaan profesi yang selanjutnya menjadi perbedaan dalam menggunakan nilai-nilai? Tentu berbeda, nilai-nilai yang dianut seorang kiai dengan nilai-nilai yang dimiliki generasi muda. Ketika KH. A. Wahid Hasyim, melakukan pembaharuan pendidikan formal dengan membuat kurikulum campuran, jelas ia berbeda dari ayahnya yang masih mengajarkan kitab-kitab lama dengan menggunakan terjemahan bahasa Jawa di masjid Tebuireng, Jombang.⁸² Cara ayah beliau, sekarang diikuti oleh berbagai pesantren besar yang menggunakan kurikulum dan teks-teks pengajaran yang dinamai madrasah salafiyah (pesantren di Sukorejo Situbondo, Ploso dan Lirboyo di Kediri adalah contoh dari model ini).

Di samping itu, peranan kiai melalui pengajian umum dan wahana lain sejenis, juga tidak surut. Mereka melakukan modernisasi dengan cara mereka sendiri, termasuk dengan memperkenalkan anak-anak mereka menjadi sarjana penuh dan bahkan S2/S3, setelah melalui *pendidikan* model lama yang sama sekali tidak memperhitungkan pendidikan formal non-agama di bawah tingkatan perguruan tinggi. Dengan sendirinya, ini berarti setahun dua tahun jenjang pendidikan lebih lama dari pada kalau mengikuti jenjang pendidikan campuran, tetapi itupun sudah

⁸² Lihat Jamal Ma'mur Asmani dalam *Dilektika Psantren dengan Tuntunan Zaman, Dalam Menggagas Pesantren Masa Depan: Geliat Suara Santri Untuk Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Qitras, 2003) hal 25

banyak dilakukan. Belum lagi kalau kita ingat variasi, yaitu anak-anak Kiai yang mengalami pendidikan dasar cara lama, kemudian mengikuti jenjang pendidikan di fakultas-fakultas agama seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan sekolah-sekolah tinggi agama Islam.

Dengan demikian, telah terbukti, penguasaan pengetahuan agama tetap dipandang sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai. Dengan mengetahui hal ini, kita lalu memahami mengapa ada berbagai jenis pendidikan yang ditempuh anak-anak NU, dari yang sepenuhnya *pendidikan* perguruan tinggi formal tanpa mengenal pengetahuan agama (perguruan tinggi umum, hingga tingkatan pendidikan tinggi ilmu-ilmu keagamaan Islam belaka). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kaum muslimin menempuh jalan pendidikan formal yang tidak sama, dan dengan sendirinya ini berarti *jama'ah* (kumpulan orang banyak) yang dihasilkan juga berbeda-beda.

Dari uraian di atas, tampak jelas persepsi warga NU yang sangat bervariasi itu tidak memungkinkan adanya penanganan kultural yang satu, berlaku untuk semua warga NU. Dari yang paling *kuno* dan hanya mencari pengetahuan intuitif (menggunakan, petunjuk-petunjuk batin yang tidak diketahui rasionalistiknya), hingga kepada sikap hidup yang sangat rasionalistik dan sama sekali tidak mementingkan hal-hal spiritual. Dalam hal ini, haruslah diterima kenyataan bahwa sikap hidup intuitif yang tidak rasional, berhadapan dengan sikap hidup rasional yang tidak memperhitungkan faktor-faktor intuitif.

Jika demikian, jelas bahwa perbedaan antara yang organisatoris dan yang bersifat kultural, haruslah ditampung di lingkungan NU. Kita memang harus melakukan perbaikan-

perbaikan organisatoris yang diperlukan, tetapi tanpa mengabaikan aspek-aspek intuitif (*al-Jawamib al-Dzauqiyah*) dalam kehidupan warga NU sekarang ini. Aspek-aspek intuitif ini, yang jelas sekali terlihat dalam karya al-Ghazali; *Ihya Ulum al-dien*, benar-benar masih hidup dalam kenyataan yang diperlihatkan para kiai dan murid-murid mereka, masih berkembang sangat pesat di lingkungan NU. Hal ini oleh Gus Dur disebut sebagai aspek-aspek kultural yang dimiliki organisasi Islam yang besar seperti NU.

Dengan demikian, perbaikan sistem yang menyangkut NU sebagai organisasi, haruslah dapat menampung aspek-aspek intuitif tersebut. Hal inilah yang dengan sadar dibangun oleh tokoh-tokoh NU masa lampau, seperti KH. Mahfudz Siddieq, KH. Abdullah Ubaid, KH. A. Wahid Hasyim dan KH. Ahmad Siddieq. Dengan sadar para pemimpin tersebut mencoba memasukkan aspek-aspek rasional dan aspek-aspek intuitif tersebut dalam pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Karena itulah, mereka dapat *diterima* oleh “kaum kiai tradisional” maupun oleh kaum rasional di lingkungan NU sendiri. Nah, kedua kecenderungan tersebut, sepenuhnya didukung oleh keluhuran moralitas (*al-Akblaq al-Karimah*), yang kemudian dihancurkan oleh sistem politik korup yang berdasarkan KKN seperti kita kenal beberapa dasa warsa terakhir ini.

Jelaslah dari uraian di atas, bahwa aspek organisatoris harus menggunakan peralatan baru dan dibuat agar sesuai dengan ketentuan zaman. Tetapi, aspek-aspek intuitif juga tidak dapat ditinggalkan begitu saja, karena hal ini akan menyebabkan NU ditinggalkan oleh para *kiai* dan para pengikut-pengikutnya. Aspek-aspek organisatoris (*jam'iyah*) harus dapat menampung aspek-aspek intuitif (*jama'ah*) yang semakin dipersubur oleh hilangnya

etika atau moralitas *al-Akhlak al-Karimah* dari kehidupan kita dalam beberapa dasa warsa terakhir ini.

Perkembangan Pemikiran NU Sejarah perkembangan Islam dimanapun juga, senantiasa memperlihatkan jalinan antara dua hal, yaitu sistem individu dan sisi kemasyarakatan. Karenanya kedua hal itu harus dimengerti benar, kalau kita menginginkan pengetahuan akan agama tersebut. Dalam arti, benar-benar di dasarkan pada pengertian yang mendalam. Kalau hal ini telah dilaksanakan, maka akan kita lihat beberapa *kemungkinan* untuk pengembangan lebih jauh. Tentu saja ada yang menyanggah pendirian tersebut, dengan dalih Islam telah sempurna, dan tidak memerlukan pengembangan. Dalam hal ini pendapat tersebut perlu diuji kebenarannya, agar kita memperoleh gambaran lengkap tentang apa yang seyogyanya dilakukan, dan selayaknya tidak dilakukan. Dengan kata lain, sebenarnya kita saat ini memerlukan skala prioritas yang lebih jelas, dalam menatap masa depan.

Karena kedua faktor dari agama langit ini (individu dan sosial) memiliki kelebihan dan kekurangan, maka kita merasakan perlu adanya keseimbangan antara keduanya. Yang menambah galaunya persoalan, adalah kenyataan bahwa kitab suci Al-Qur'an tidak pernah secara jelas membagi kedua masalah itu dalam kandungannya. Seluruhnya hanya bersandar pada kemampuan kita memahami kitab suci tersebut, mana yang merupakan perintah (*Khitah*) untuk perorangan, dan mana yang untuk masyarakat. Seluruhnya bergantung atas penafsiran kita. Umpamanya saja firman Tuhan yang menyatakan: “Dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal” (*Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba-ila lita'arafu*). Jelas di situ, yang dimaksudkan umat manusia secara keseluruhan, dan yang

dikehendaki adalah kenyataan yang tidak tertulis yaitu persaudaraan antara sesama manusia.

Dalam kitab suci Al-Qur'an terdapat sebuah ayat yang sangat penting yang berbunyi: Kalian kawinilah apa yang baik bagi kalian, daripada dua, tiga atau empat orang wanita (tetapi) jika kalian takut tidak dapat (bersikap) adil, maka hanya seorang (istri) saja “(*Fa ankakhu matahaba lakum minannisa matsna wa tsulatsa wa ruba'a wa in khistuman la ta'dilu fa wahitba*).” Jelas ini merupakan perkenan, bukan perintah. Karena itu, ia bersifat perorangan karena tidak dapat dilakukan generalisasi, itupun harus dirangkaikan dengan kenyataan, siapakah yang menentukan poligami itu adil? Kalau pihak lelaki, beberapa orangpun akan tetap adil, sedangkan bagi perempuan, masalah keadilan itu bersangkutan paut dengan rasa keadilan secara normal, tentu lebih banyak kaum perempuan yang merasakan poligami itu tidak adil. Dengan kemampuan memilih dan membedakan mana yang bersifat individual, dari hal yang bersifat kemasyarakatan (kolektif) jelas peranan menggunakan akal dan pikiran kita menjadi sangat besar. Dalam khasanah pemikiran ini, salah satu adagium “harta warisan “ yang dipakai NU sebagai patokan adalah: “memelihara apa yang baik dari masa lampau, dan menggunakan hanya yang lebih baik yang ada dalam hal yang baru (*Al-muhafa Dzatu'ala Al- Jadid Al-Aslah*).

Terkadang, sebuah kewajiban agama memiliki dua sisi itu, yaitu sisi individual dan sisi kolektif sekaligus, yang menjadikan kita sering lupa bahwa perintah agama dapat saja memiliki kedua dimensi tersebut. Umpamanya saja, kewajiban berpuasa, yang semula diperintahkan sebagai sesuatu yang bersifat individual, perintah Allah SWT: “Di perintahkan kepada kalian untuk

berpuasa, seperti juga diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian” (*kutiba’alaikum al-shiyam kama kutiba’ala ladzina min Qablikum*). Perintah yang sepiantas lalu bersifat individual ini pada akhirnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin, sebagai kewajiban semua orang Islam. Dengan demikian, kita harus mampu mencari yang kolektif dari sumber-sumber tertulis (*dalil Al-Naqli*). Dalam perintah Nabi yang tertulis (*dalil Al-Naqli*) saja, yang membawakan sebuah kecenderungan baru, terkadang kita sulit untuk membedakan atau menetapkan, mana yang berwatak kolektif dan mana yang individual.

Sebagai contoh, dapat dikemukakan di sini ucapan Nabi Muhammad SAW: “mencari ilmu (berlangsung) dari buaian hingga ke liang kubur” (*Thalabu Al-Ilmi min Al-mahdi Illa Al-lahdi*). Memang hal itu adalah kerja terpuji, tetapi tidak jelas dalam ungkapan ini, apakah kewajiban yang timbul itu berlaku untuk perorangan seorang muslim ataukah bagi sekelompok kolektif kaum muslimin? Jika diartikan sebagai kewajiban kolektif, bagaimanakah halnya dengan mereka yang tidak bersekolah? Benarkah mereka termasuk orang-orang bersalah? Kejelasannya tidak dapat dicapai dengan ungkapan harafiyah, karena itu tidak akan tercapai kesepakatan kaum muslimin tentang “kewajiban” bersekolah, adakah tanpa hal itu orang tidak berhak mendapat pendidikan? Dalam keadaan tiadanya kesepakatan tentang suatu hal, maka seseorang dapat saja mengikuti sebuah pendapat lain, sama seperti juga halnya orang menganggap tidak adanya sebuah keharusan tentang hal itu. Apakah sesuatu itu merupakan kewajiban universal ataukah kewajiban fakultatif? Dapat dikemukakan sebagai contoh mengenai hal ini, yaitu ucapan Nabi Muhammad SAW “mencintai tanah air adalah sebagian (pertanda)

dari keimanan “(*Hubbu Al-Wathan min Al-Iman*). Tidak jelas adakah “kewajiban” mencintai tanah air menjadi tanda keimanan seseorang? Adakah ini berarti kewajiban memasuki milisi untuk mempertahankan tanah air, atau bukan? Untuk itu, diperlukan penjelasan dari penggunaan akal (*dalil Aqli*), sehingga sumber tertulis (*dalil Naqli*) maupun keterangan rasional (akal) dapat digunakan bersamaan.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, para pemimpin berbagai gerakan Islam memutuskan untuk menghapuskan Piagam Jakarta dari pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Abikusno Tjokrosuyoso (SI), Ki Bagus Hadikusumo dan KH. A. Kahar Muzakir (Muhammadiyah), Ahmad Subardjo (Masyumi), KH. A. Wachid Hasjim (NU), A.R. Baswedan (PAI) dan H. Agus Salim dari berbagai gerakan Islam mengambil keputusan itu bersama-sama dengan Soekarno dan Hatta. Dasar dari keputusan itu adalah apa yang disampaikan Laksamana Maeda dari pemerintahan pendudukan Jepang –sehari sebelumnya, atas permintaan para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang tidak beragama Islam. mereka tidak bersedia menerima Piagam itu karena secara efektif akan menempatkan diri mereka dan para warga masyarakat lainnya yang tidak beragama Islam dalam kedudukan sebagai warga negara kelas dua. Dan, keputusan itu tidak pernah dibantah oleh para ulama Fiqh (*hukum fiqh*), dengan demikian memperoleh pengesahan tidak langsung dan berlaku efektif. Pada akhir tahun 1945, Mukhtar NU di Asembagus (Situbondo) telah memutuskan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi, menggantikan Islam.

Dengan demikian, NU menggantikan asas Islam dengan asas Pancasila, padahal sebelumnya organisasi tersebut adalah organisasi

yang secara resmi ditetapkan sebagai perkumpulan Islam. Dengan rumusan begitu, NU secara tidak resmi dapat dinyatakan sebagai; bukan sebagai organisasi Islam, dan secara resmi menjadi perkumpulan agama saja. Terkadang, sebuah ucapan yang secara *harafiyah* tidak menunjukkan suatu arti khusus, dapat saja secara rasional diberi arti sendiri oleh kaum muslimin contohnya, adalah ucapan Nabi Muhammad SAW: “Tuntutlah ilmu pengetahuan hingga ke (tanah) Tiongkok” (*Uthlub Al-Ilma walau fi al-shin*). Ungkapan tersebut hanya menunjuk kepada perintah menuntut pengetahuan hingga ke tanah Cina, namun para ahli hadist memberikan arti lain lagi. Menurut mereka, ungkapan Nabi Muhammad SAW tersebut jelas-jelas menunjukkan, yang dimaksudkan adalah kewajiban mempelajari Ilmu pengetahuan non-agama juga. Bukankah di tanah Tiongkok waktu itu belum ada masyarakat muslim sama sekali? Bukankah ini secara teoritik, pemberian kedudukan yang sama di mata agama. Antara pengetahuan agama (*Islamic studies*) dan pengetahuan non-agama memiliki kedudukan yang sama. Perumusan sikap yang dirumuskan para ahli agama Islam tersebut adalah sebagai kewajiban menuntut disiplin ilmu non-agama, memberikan kedudukan yang sama diantara keduanya.

Di lihat dari berbagai pengertian, seperti diterangkan di atas, jelaslah bahwa ribuan sumber tertulis (*dalil Naqli*), baik berupa ayat-ayat Kitab Suci Al Qur’an maupun ucapan Nabi Muhammad SAW, akan memiliki peluang-peluang yang sama bagi pendapat-pendapat yang saling berbeda, antara universalitas sebuah pandangan atau partikularitasnya di antara kaum muslimin sendiri. Dengan demikian, menjadi jelaslah bagi kita bahwa perbedaan pendapat justru sangat dihargai oleh Islam, karena yang tidak

diperbolehkan bukanya perbedaan pandangan, melainkan pertentangan perpecahan. Kitab suci kita menyatakan: “Berpeganglah kalian kepada tali Allah secara menyeluruh, dan janganlah terpecah-belah atau saling bertentangan” (*Wa tashimu bi habli Allah Jami’an wala tafarraqu*). Ini menunjukkan lebih jelas, bahwa perbedaan pendapat itu penting, tetapi pertentangan dan keterpecah-belahan adalah sebuah malapetaka. Dengan demikian, nampak bahwa perbedaan, yang menjadi inti sikap dan pandangan perorangan harus dibedakan dari pertentangan dan keterpecah-belahan, sebagai upaya kolektif dari sebuah totalitas masyarakat.

C. Kiai dan Pesantren sebagai pusat Peradaban

Sudah menjadi budaya dalam Dunia Islam, apabila seorang Ulama yang memiliki pengetahuan, untuk membuat sebuah lembaga keagamaan di bawah asuhan Ulama itu. Lembaga keagamaan itulah yang kemudian menjadi pusat peradaban umat Islam untuk membumikan pengetahuan ke-Islamannya yaitu pesantren.⁸³ Lembaga tersebut di Indonesia secara kultur disebut dengan pesantren. Pesantren adalah wadah dimana para murid (santri) mendalami Ilmu agama, bukan hanya mendalami bahkan sekaligus mempraktekan pengetahuan yang di dapat.

Memang tidak semua kiai memiliki pesantren, namun yang jelas dalam pembahasan ini adalah bahwa kiai yang memiliki pesantren mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada kiai yang tidak memilikinya. Pengaruh ini yang menjadikan peradaban Islam berkembang pesat di Indonesia, khususnya di Jawa. Pada dasarnya, kiai dan pesantren memiliki pola hierarki bahwa kenyataannya keulamaan diwariskan secara turun temurun

⁸³ Wahid, *Bunga Rampai Pesantren...*hal 67

(genealogis). Pada akhirnya, kharisma kiai tergantung kepada kharisma ayah dan para pendahulunya yang lain, dan selain itu, biasanya di pengaruhi juga oleh kharisma gurunya. Namun demikian, pengakuan masyarakat memiliki peran yang lebih menentukan berkaitan dengan keulamaan seseorang, daripada sekedar faktor genealogis. Seorang santri yang telah mumpuni dan menginginkan untuk mendirikan pesantren namun tidak berasal dari keluarga kiai, misalnya, akan sulit untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat. Namun bukan berarti bahwa seorang yang bukan berasal dari keluarga kiai tidak bisa menjadi seorang kiai yang memiliki pesantren.

Pada akhirnya, satu-satunya jalan bagi “*orang awam*” yang berilmu untuk dapat diakui sebagai kiai adalah dengan menjadi murid kesayangan seorang kiai, kemudian menjadi menantunya dan akhirnya menjadi penggantinya. Ini bukanlah kejadian yang sangat langka, karena tidak semua kiai mempunyai anak laki-laki yang berminat atau mampu melanjutkan tradisi keluarganya dalam pendidikan agama. Seorang kiai yang tak mempunyai anak laki-laki, yang akan di jadikan penerusnya akan lebih memilih putra kiai lain untuk menjadi menantunya, tetapi kalau tidak ada akan mengambil seorang santri yang cerdas dari kalangan awam yang dapat di harapkan menjadi penerusnya. Ideologi inilah yang tampaknya menjadikan keluarga pesantren sebagai sebuah kasta tersendiri.

Hampir tidak ada kiai besar dari generasi sekarang yang memiliki pengetahuan agama yang dapat menyamainya atau bahkan sekedar mempunyai minat kepada ilmu-ilmu agama sebagai disiplin ilmunya. Banyak juga kiai yang mengirim anaknya kesekolah-sekolah umum, bukan pesantren. Sehingga tidak heran,

banyak pula anak kiai yang menjadi dokter, ahli hukum maupun usahawan daripada menjadi seorang Ulama. Lalu, apa jadinya jika putra maupun putri kiai lebih menyukai dunia umum daripada dunia pesantren? Kiai dan Pesantren; antara Kultur dan Modernisme.

Telah di singgung di atas, bahwa kiai merupakan figur pemimpin yang sangat dipercaya oleh masyarakat begitu juga pesantren, yang merupakan basis untuk mencetak ilmu pengetahuan agama. Kiai dan pesantrennya dijadikan simbol peradaban Islam di dataran Jawa khususnya. Hal ini tentunya yang menjadikan kiai mempunyai tanggung jawab moral yang besar untuk memberi jawaban atas kegelisahan masyarakat.

Awal menyentuhnya Islam di pulau Jawa sangat erat kaitannya dengan tradisi dan budaya (*culture*). Kultur yang dikembangkan ini menjadi metode para Wali yang tergabung dalam Walisongo, kemudian diteruskan oleh para kiai yang banyak di kenal dengan Ulama salaf (klasik), yakni Ulama yang memegang teguh ajaran Rasul dan tradisi (*Urf*) sebagai jembatan untuk perkembangan Islam. Seperti yang selalu menjadi jargon kiai salaf ini adalah “*Mengambil tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik*”, dengan metode ini para kiai dapat langsung diterima oleh masyarakat. Pendidikan kiai yang demikian memberikan makna bahwa Islam bukanlah agama yang mempersulit umatnya, berbeda dengan Muslim yang lebih mengembangkan istilah “Bid’ah”.

Pesantren merupakan garda depan pendidikan Islam.⁸⁴ Pesantren adalah bagian penting kehidupan kiai, karena ia merupa-

⁸⁴ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1978) hlm 67

kan tempat untuk mengembangkan ajaran dan pengaruhnya melalui pendidikan secara tradisional. Dalam pendidikan pesantren itu kiai mempunyai metode (teknik) *dalam* mengajar, tetapi yang paling umum adalah bandongan dan sorogan.⁸⁵ Bandongan adalah jenis pengajaran yang di lakukan oleh kiai maupun santri seniornya. Ini seperti kuliah yang di hadiri oleh sejumlah besar santri. Sistem ini hanya memberikan pengajaran rutin harian kepada para santri, dimana kiai dan santri senior membacakan karya-karya Ulama terdahulu dengan menerjemahkannya kedalam bahasa lokal dan memberikan penjelasan tentangnya. Kitab yang dikaji pun memiliki ciri khas tersendiri yaitu kertasnya berwarna kuning, inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan kitab kuning (*al-kitub ash-shafra*’).

Sistem bandongan berbeda dengan sistem sorogan. Dalam bandongan, santri dianggap sudah seluruhnya mengetahui tata bahasa Arab dan al Qur’an. Sebaliknya, sorogan diberikan kepada siapa saja yang ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detil tentang berbagai masalah yang dibahas dalam sebuah kitab. Acara sorogan biasanya hanya dihadiri lima hingga sepuluh santri, di mana yang memberikan penjelasan sering kali adalah santri senior yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam masalah-masalah tertentu. Sistem ini bertujuan untuk memberikan pelatihan khusus kepada santri dan membantu mereka mengembangkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Pesantren merupakan pusat pendidikan tertua di Indonesia, sebelum sistem pendidikan modern diperkenalkan oleh Belanda. Bahkan sampai sekarang, pesantren di

⁸⁵ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hal18

Indonesia masih memainkan perannya sebagai pusat pembelajaran, meski harus bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan sekuler.

Dari sinilah muncul istilah baru, yaitu pesantren tradisional dan pesantren modern. Pesantren tradisional (salaf) yaitu pesantren yang masih memprioritaskan aspek pengetahuan agama dengan membedah kitab-kitab kuning, dan santri dituntut untuk dapat mengetahui dan memahami isi kitab tersebut berdasarkan tata bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf) yang baik dan benar.⁸⁶ Sebaliknya, pesantren modern lebih memprioritaskan pendidikan formal dengan menguasai bahasa Arab maupun Inggris dengan lancar tanpa mengindahkan Grammar ataupun Nahwu Sharafnya.⁸⁷

Persaingan ini tentu yang menjadikan banyak alasan para kiai untuk mengirimkan anaknya ke sekolah umum, agar kelak dapat memberi nuansa baru dalam sistem pendidikan pesantren. Namun, bukan berarti pesantren tradisional semakin ditinggalkan. Justru banyak pula kiai tradisional yang mencoba menyatukan antara sistem tradisional dengan sistem modern. Sudah seharusnya, kiai sekarang dengan pesantrennya membuat gebrakan baru dalam sistem pendidikan pesantrennya, karena bukan sudah jauh tertinggal, melainkan harus mengikuti perkembangan yang ada. Apabila hal ini dibiarkan saja, tentu pesantren, khususnya tradisional yang masih melekat dengan budayanya akan semakin ditinggalkan oleh masyarakat umum. Namun demikian, umat Islam yang saleh, lebih suka mengirimkan anak-anaknya kepesantren yang masih memiliki kultur yang kuat.

⁸⁶ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) hal 151

⁸⁷ Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Peantren di Indonesia*, (Jakarta: Dharmabhakti, 1982) hal30

Paradigma sosial yang terjadi adalah, karena masyarakat sudah banyak yang tertekan dengan kondisi ekonomi, sehingga orientasi masyarakat yang muncul kemudian adalah mengirimkan anak mereka ke sekolah-sekolah umum,⁸⁸ untuk mendapatkan pekerjaan dan dapat menghidupi keluarganya. Selain itu, anak-anak sekarang cenderung hidup dalam budaya hedonistik dan apatis. Akibatnya, mereka tidak mau mengenal tradisi ke Islam bahkan pesantren sekalipun.

Melihat kondisi yang demikian, tentu peran kiai sangat diperlukan untuk merubah kembali wacana pendidikan yang hilang. Mau tidak mau, kiai harus dapat menyatukan antara dunia sekuler (modern) dengan dunia kultur. Mungkin inilah salah satu konsep para kiai, banyak mengirim anaknya ke dunia perkuliahan, baik didalam maupun luar negeri sekalipun, yakni untuk memberikan nuansa baru seperti yang sudah disinggung di atas, dengan tujuan membangkitkan kembali pengetahuan agama secara kultur tanpa mengesampingkan aspek modernitas.

Menjawab pertanyaan yang demikian, tentu akan rumit untuk menjawabnya, karena tidak mudah kiai yang berpegang teguh pada kultur pesantrennya untuk menyatukan sistem baru tersebut. Bahkan, ada pula pesantren salaf yang benar-benar melarang para santrinya untuk sekolah umum, ini artinya fanatisme dan orthodoxi masih menjadi pemicu untuk mempertahankan kealamian pesantren. Padahal diluar, persaingan ideologi semakin kuat. Jual beli ideologi dimana-mana, maka bermunculanlah berbagai aliran yang mengatasnamakan Islam dengan dalih dakwah Islam. Jika pesantren yang demikian tidak mengimbanginya, maka yang terjadi adalah perubahan kultur yang terjadi di masyarakat,

⁸⁸ Rahim, *Arah Baru*hal 151

walaupun tidak semua masyarakat akan beralih kepada ideologi yang baru. Dalam masyarakat pedesaan, misalnya, masih banyak yang berpegang teguh pada kiai, namun dalam masyarakat perkotaan enggan untuk mengikuti kultur, karena dianggapnya telah tertinggal. Disaat seperti inilah peran kiai yang sesungguhnya dioptimalkan untuk mengembalikan paradigma masyarakat yang tersesat. Kehilangan jatidiri, mungkin itu yang pantas untuk menyebut kondisi umat Muslim saat ini. Namun, bukan berarti umat Muslim di belenggu dengan cara pendidikan yang lama dan bukan berarti pula pemikiran yang baru sudah terkontaminasi. Tidak ada yang salah, apabila semua yang diberikan yaitu adanya pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam, sebagai wujud kemajuan intelektual Muslim sebagai manifestasi untuk kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*).

Melihat hal yang demikian itu, bukan semata-mata pesantren memiliki kelemahan yang besar. Bisa di lihat misalnya, pesantren memiliki debit pemikiran dengan metode klasikalnya yang takan pernah punah, berdasarkan pegangan dan falsafah yang dimilikinya itu pesantren menjadi pusat budaya dan khazanah intelektual kaum sarungan (santri). Namun, kesalahannya adalah ada pada pemerintah yang tak bisa menerima pesantren sebagai bagian pendidikan Islam yang komprehensif, Pesantren selalu menjadi bagian kelas yang non formal dan jauh dari perhatian. Sehingga yang terjadi adalah pesantren enggan untuk berjabat tangan dengan dunia umum yang notabene sudah keluar dari koridor dan ajaran pesantren salaf. Di sadari atau tidak, bahwa Islam adalah agama tradisional. Artinya Islam tetap bersandar pada ajaran yang dilakukan oleh Nabi, shahabat, *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* dan sampai para Ulama sekarang. Jadi kita tak dapat memungkirinya, buktinya

kita masih berpegang teguh pada pemikiran Imam Madzhab dalam kajian fikihnya yang sudah lama dan jauh dari masa kita sekarang ini.

Semua itu adalah bukti konkrit bahwa Islam tak sama dengan Modernis yang mencoba membuat pemikiran baru dan meninggalkan pemikiran lama. Sehingga pesantren salaf mengacu pada kaidah Ushul fikih yang menyebutkan “*al Mukhafadzotu bil godimi sholih wal akhdzu bil jadidi al ashlah*” artinya menggali tradisi lama yang masih baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Tinggal kita menunggu aplikasi dari kaidah tersebut. Banyak wacana dimunculkan, agar pesantren dapat bersaing dengan pendidikan modern, dan kiai diharapkan dapat mengembalikan posisi umat pada tempat yang baik, yang sesuai dengan asas keislaman. Menurut Prof. Hasan Hanafi, pendidikan Islam seharusnya tidak lagi berkecimpung dalam dunia spiritualitas saja, melainkan menguasai perkembangan keilmuan abad kontemporer, yaitu menguasai IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi).⁸⁹ Jika sudah demikian, pesantren memiliki kekuatan, baik dari pengetahuan agamanya maupun IPTEK yang baru. Dengan demikian, pesantren dapat mengikuti perkembangan yang ada, dan kiai dapat mengontrol pembaharuan keilmuan kontemporer, lalu di aplikasikan dan dimanifestasikan dalam pendidikan pesantren. Sedangkan santri tidak buta dan kaget akan hadirnya ideologi-ideologi baru yang mencoba memecah Islam secara kultural, inilah yang disebut dengan rekonstruksi khazanah intelektual pesantren,

⁸⁹ Lihat B Suprpto Brotosiswoyo, *Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Globalisasi, Menggagas Pearadigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi, Sindhunata*, (Yogyakarta: Kansius, 2000) hal 91

dalam menghadapi hegemoni ideologi. Bukan berarti merubah epistemologi pendidikan pesantren tradisional, namun memberikan warna baru agar dapat di pertahankan.

Peran pesantren sebagai pusat pendidikan Islam sangat penting, apabila pesantren mengalami kemunduran, ini artinya Islam mengalami kemunduran dan wajar apabila masyarakat Islam saat sekarang akan kembali ke zaman jahiliyah.⁹⁰ Oleh sebab itu, harus di cari akar masalah kemunduran pendidikan Islam tersebut. Jika metode pendidikannya yang tak lagi dapat di terima karena perkembangan zaman, maka harus ada rekonstruksi yang baru tanpa menghilangkan metode lama. Disinilah realitas kiai dan pesantren, sebagai peletak dasar peradaban Islam, masa depan Islam hanya ada dalam genggaman kiai dengan pesantrennya. Kata kuncinya adalah metodologi pendidikan Islam yang ideal, sehingga mampu mengembangkan pendidikan Islam dan mengembangkan pendidikan modern untuk kemaslahatan.

Dengan adanya rekonstruksi dalam metode pendidikan seperti ini, pesantren sebagai pusat pendidikan Islam, mampu bersaing dengan modernisme pemikiran yang digemborkan barat. Jika pesantren memiliki metode pendidikan yang ideal atau dengan kata lain adanya rekonstruksi khazanah pendidikan Islam, sebagai implementasi kemajuan Islam di era modern. Realitas kiai dan pesantren pun kembali memiliki peran sebagai pemimpin umat.

D. Kiai dan Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kedudukan para kiai adalah sebagai kepercayaan dan ahli waris Nabi. Sedangkan tugas pokok mereka adalah menciptakan kesejahteraan umum.

⁹⁰ Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, hlm 68

”*Wama arsalnaka illa rahmatan lil’alamin*” (aku tidak mengutusmu kecuali menciptakan rahmat bagi seluruh alam).⁹¹ Menurut Abu Zahra, penafsiran ”*rahmatn lil’alamin*” di atas mengandung tiga tugas pokok, yaitu:

1. Hendaknya setiap individu menjadi sumber kebaikan kesejahteraan bagi yang lain. (*an yakum kullu fard mashdar khair lijama’atih*).
2. Menegakan keadilan di alam raya ini (*iqamah al-Adalah*)
3. Merealisasikan kemaslahatan (*tabqiq al-Maslahah*)⁹²

Sedangkan yang dimaksud dengan konsep kemaslahatan adalah ”*al Maslahah al-Haqiqiyah*” yang meliputi dan melindungi lima hal pokok (*umur khamsah*) yaitu:

- 1) Melindungi agama (*al muhafadhoh ’ala al-din*)
- 2) Melindungi jiwa (*al muhafadhoh ala al nafs*)
- 3) Melindungi harta (*al muhafadhoh ala al mal*)
- 4) Melindungi rasio (*al muhafadhoh ala al aql*)
- 5) Melindungi keturunan (*al muhafadhoh ala al nasi*)⁹³

Dari uraian tersebut di atas bisa dipahami bahwa tugas pokok para kiai adalah penguatan (*empowerment*) *Civil Society* dengan mendorong mereka agar memahami dirinya, karena pemahaman tersebut akan menghantarkan mereka untuk membangun dan menunjukkan jati dirinya dan dunia ini, sesuai dengan konsep yang dikehendaki oleh penciptanya dan yang pasti sesuai dengan kemaslahatan masyarakat manusia.

⁹¹ QS al- Anbiya’ 107

⁹² Muhammad Abu Zahra, *Ushul al Fiqih*, (Berit: Dar al fikr, 1985) hal 364-366

⁹³ *Ibid*, hal 367

Menurut Sahal Mahfudz, kiai sebagai pemimpin umat sudah barang tentu memiliki pijakan kegamaan dalam melakukan tindakannya. Terutama jika itu dianggap baru oleh masyarakat. Selanjutnya. Ia mengklasifikasikan upaya pemberdayaan masyarakat sebagai ibadah. Ibadah ini ada dua macam: *Pertama*, ibadah yang manfaatnya kembali kepada pribadinya sendiri (*ibadah qashiriyah*). kedua, ibadah yang bersifat sosial yaitu ibadah yaitu ibadah yang manfaatnya menitik beratkan kepada kepentingan umum (*ibadah muta'addiyah*). Lebih lanjut ia menyatakan bahwa berdasarkan kaidah hukum fikih, "ibadah yang bermanfaat hanya kepada diri sendiri". Akan tetapi dalam hal ini, bukan berarti lebih baik menjalankan ibadah yang *muta'addiyah* saja dan ibadah *qashirah* ditinggalkan. Dan apabila terjadi situasi yang delematis (*ta'arufah*) antara keduanya, maka diutamakan adalah yang *muta'addiyah* sepanjang yang *qashirah* bukan termasuk kewajiban individu (*fardu 'sin*).⁹⁴

Civil society secara institusional bisa diartikan sebagai pengelompokan dari anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya.⁹⁵

Dari batasan singkat di atas, maka ciri pokok *civil society* adalah adanya kemandirian masyarakat dalam menghadapi negara dan tersedianya ruang publik yang bebas (*a free public sphere*) bagi mereka. Namun suatu hal yang harus dikemukakan bahwa wacana

⁹⁴ Sahal Mahfudz, *Pengembangan Masyarakat oleh Pesantren, antara Fungsi dan Tantangan, dalam Dinamika Pesantren, Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher*, (Jakarta: P3M, 1988), hal100

⁹⁵ Lihat, Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hal 84

civil society tidak harus memosisikan negara sebagai lawan. Sebagaimana kasus pada negara-negara totaliter. Sebab, inti wacana ini adalah demi kemandirian masyarakat . lebih lanjut, ia lebih diarahkan kepada pencitraan secara gradual dan evolitif suatu masyarakat politik yang semakin dewasa, yang mampu menjadi oenyeimbang dan kontrol bagi kecendrungan eksesif negara.⁹⁶

Tampaknya wacana *civil society* memang sebagai risistensi dari model ekonomi negara (*state otonom*) yang sangat kuat berhadapan dengan masyarakat. Jika posisi negara tetap terlalu kuat pada hal negara tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari masyarakat, maka fenomena ini membutuhkan penyeimbang, yaitu *civil society*. Karena perlu disadari bahwa dalam jangka panjang jika masyarakat dibiasakan untuk tidak berpikiran alternatif, budaya ketergantungan masyarakat pada suatu saat membutuhkan bantuan ide-ide dari masyarakat tentu tidak akan mendapatkan apa-apa.

Jadi dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya menumbuhkan suatu kultur ”oposisi yang loyal” (*loyal opposition*) yang memiliki pemikiran alternatif. Ibarat tinju. *Society* berperan sebagai *spering partner* bagi *state*. Sebagai *spering partner*, *society* yang berdiri ditengah ring kendati memukul perintah, namun dalam krangka bukan sebagai musuh, melainkan tetap sebagai kawan. Sebagai kawan tentu pukulannya bukan dimaksud untuk ”mematikan” melainkan untuk menungkatkan muru prestasi keduanya. Tetapi kalau petinju (dalam hal ini *state*) sudah curuga kepada *spering partnernya* (dalam hal ini *society*) tentunya akan menjadi berantakan, karena keduanya menjadi tak sekutu lagi. Jadi,

⁹⁶ Muhammad AS Hikam, *Ibid* hal85

permusuhan dan saling memukul untuk menjatuhkan yang akhirnya terwujud.⁹⁷

Dengan analisis *state and civil society*, dapat disimpulkan bahwa *civil society* masih semangat lemah, kalau tidak dapat dikatakan belum tercipta sama sekali. State dalam masa orde baru muncul sebagai kekuatan utama yang dominan dalam persoalan sosial, ekonomi, dan politik, state melakukan penetrasi yang dalam terhadap semua sektor kehidupan masyarakat dengan metode hubungan *patrint-client*, intitusionalisasi sosial politik, korporatisme negara, dan hegemoni ideologi.⁹⁸ Sejalan dengan penguatan ekonomi masyarakat, para kiai ormas, pers, kelompok-kelompok kepentingan yang mandiri dari partai-partai politik besar peranannya, disamping adanya *political will* dari negara. Sementara itu, organisasi keagamaan dan sosial, termasuk kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dapat juga mengantubgkan bagi pemberdayaan politik arus bawah, meskipun mungkin tidak secara langsung organisasi-organisasi tersebut, sehingga saat ini, secara relatif mandiri dari negara, dan memeinkan peranan yang paling dalam mengartikulasikan, membela dan memperluas reformasi sosial melalui program-program mereka dalam masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan, pelayanan sosial, penanganan kesehatan, koperasi, pelayanan keagamaan dan sebagainya.⁹⁹

Masyarakat Indonesia pada umumnya beragama Islam memang membutuhkan kepemimpinan rohaniyah, dua hal ini bisa dipenuhi oleh para kiai dan pesantren sebagai pusat pendidikan dan

⁹⁷ Soetanfyo Wighyosoebroto, dalam Kompas, 9 Oktober 1994

⁹⁸ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara, dalam Politik Orde baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hal51

⁹⁹ Muhammad AS Hikam, *Ibid* hal128

aktivitas spritual dan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sembahyang jama'ah di mesjid, *slametan*, *syukuran*, melakukan upacara do'a, kuliah agama yang berisi nasehat atau *tausiyah* pada acara khitanan, kematian dan pernikahan, merupakan hal yang mengisi dan memberi makna hidup pada masyarakat yang seringkali masih amat pastoral. Mereka membutuhkan guru dan pemimpin yang bisa dimintai pertimbangan, meminta keputusan tentang hal-hal yang mereka perselisihkan, sumber kepemimpinan informal, juga menyediakan ruang bagi kegiatan –kegiatan sudah barang tentu mengandung berbagai kemungkinan untuk menjalankan peranan yang lebih luas.¹⁰⁰

Deskripsi singkat di atas adalah indikator bahwa para kiai telah berupaya memberdayakan masyarakat lewat sektor pendidikan bahkan mereka membuka kesempatan belajar bagi kalangan luas rakyat, dikala pendidikan mengabdikan kepada komunitas elit. Dan hal ini tetap dilaksanakan oleh mereka sampai saat sekarang. Alhasil kiai dengan pesantren telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi dunia pendidikan maupun bagi kebangkitan *civil society*. Lebih dari itu, para kiai selalu berusaha memberi inspirasi, motivasi dan stimulus agar seluruh potensi masyarakat diaktifkan dan dikembangkan secara maksimal dengan kegiatan pembinaan pribadi, kerja produktif, karya ilmiah, penemuan dan penciptaan yang diarahkan bagi kesejahteraan bersama. Maka dengan demikian kehadiran mereka benar-benar merupakan rahmat bagi rakyat banyak, yang meliputi seluruh cakrawala dan dimensi kehidupan secara total, integral dalam globalitas dan upaya yang disajikannya bersifat sukarela.

¹⁰⁰ M Dawam Raharjo, *Dunia Pesantren Dalam Peta Pembaharuan, Dalam Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1988) hal9-10

Bab IV

PONDOK PESANTREN DI SITUBONDO

A. Sejarah Pondok Pesantren

Pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam¹⁰¹ tertua di Nusantara telah mampu menjadi benteng-benteng pertahanan Islam yang tangguh dalam menghadapi penetrasi pemikiran dan budaya asing yang mengancam dengan sangat dahsyat di negeri kita ini.

Dalam tilikan sejarah, pondok pesantren atau yang sering di singkat (*pon-pes*) telah menegaskan identitasnya sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan (*tafaqqub fi al-din*). Sehingga melalui peran tersebut, maka pondok pesantren telah melahirkan

¹⁰¹ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1978) hal 67

berbagai tokoh agama (*kiai, ustadz*) yang terus menyebarkan ajaran Islam di bumi Nusantara ini. Bahkan berbagai kalangan menilai, bahwa kuatnya Islam di Indonesia, disebabkan oleh eksisnya pondok pesantren ditengah masyarakat sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang telah menjadi motivator dan mobilisator bagi perubahan sosial (*social transformation*).

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang digunakan untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman sehari-hari bagi umat manusia di muka bumi.¹⁰²

Pandangan di atas diperkuat oleh Kuntowijoyo dalam buku paradigma Islam, ia menyebutkan bahwa pesantren di Indonesia mempunyai akar sejarah yang panjang, sekali pun pesantren-pesantren besar yang ada sekarang, keberadaan asal usulnya hanya dapat dilacak sampai akhir abad 19 atau awal abad ke 20.¹⁰³ Secara substansial, pesantren merupakan institusi keagamaan yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari masyarakat pedesaan. Lembaga ini tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat dengan memosisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat dalam pengertian yang transformatif.¹⁰⁴ Dalam konteks ini, pendidikan pesantren pada dasarnya merupakan pendidikan yang sarat dengan nuansa transformasi sosial. Pesantren berikhtiar meletakkan visi dan

¹⁰² Rofiq, S, *Pemberdayaan Pesantren, Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri Dengan Metode Dauroh Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal 1

¹⁰³ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), hal 33

¹⁰⁴ Abd A'la, *Pembaharuan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal 2-3

kiprahnya dalam kerangka pengabdian sosial yang pada mulanya ditekankan kepada pembentukan moral keagamaan dan kemudian dikembangkan kepada rintisan-rintisan pengembangan yang lebih sistematis dan terpadu.

Pesantren sebagai basis utama umat Islam untuk menimba ilmu-ilmu yang *notabene*-nya mengalami perubahan yang cukup signifikan, karena pesantren beracuan pada kaidah yang menyatakan: *al-Muhafadzah 'ala al-Qadim al-Ashlah wa al-Alkhdzu bi al-Jadidi al-Ashlah* (*Berpegang teguh pada pola lama yang baik dan mengambil pola baru yang lebih baik.*)¹⁰⁵

Hal ini jelas ketika kran Modernisasi menyebar luas dimana-mana sehingga Pesantren yang merupakan ciri khas Pendidikan Islam menerima imbas langsung dari dibukanya kran Modernisasi disegala bidang. Modernisasi Pendidikan Pesantren berawal mula dari ekspansi sistem Pendidikan umum yang terlalu berlebihan sehingga Pendidikan Islam dalam konteks ini banyak yang tidak bertahan, Terutama sistem yang di komandoi para kolonial di Indonesia, seperti yang di lakukan oleh kolonial Belanda. Akan tetapi sejarah telah mencatat bahawa Modernisasi Pendidikan Islam menjelang pertengahan abad ke 19 di awali pertama kali oleh negara Turki yang di lakukan oleh Turki Usmani. Berikut juga Modernisasi yang di terapkan di Mesir. Modernisasi sistem dan kelembagaan Pendidikan Islam di Mesir di mulai oleh Muhammad Ali Pasya.

Dengan tidak meninggalkan ciri khas keIslaman, pesantren juga mesti merespon perkembangan zaman dengan cara-cara

¹⁰⁵ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal 289

kreatif, inovatif, dan transformatif. Alhasil, persoalan tantangan zaman modern yang secara realitas akan menciptakan segala produk amoral yang menyebabkan tirai-tirai batas ruang dan waktu seperti dalam gejala global media informasi dapat dijawab secara akurat, tuntas dan tepat sasaran oleh lembaga Pendidikan Pesantren. Dalam sebuah lembaga seperti apapun bentuk lembaga tersebut baik dalam lingkup makro maupun mikro, Memiliki sistem untuk mengatur jalannya kelembagaan yang di maksud. Pesantren sebagai institusi yang merepresentasikan Pendidikan Islam memiliki sistem yang sangat khas bahkan bisa di bilang berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya yang bergerak dalam bidang Pendidikan.

Pesantren sebagai institusi sosial tidak hanya berbentuk lembaga-lembaga dengan seperangkat elemen pendukungnya seperti mesjid, ruang mengaji, asrama, santri dan beberapa guru dan kiai tetapi pesantren merupakan identitas budaya yang mempunyai implikasi terhadap kehidupan sosial yang melingkupinya.¹⁰⁶

Pesantren sebagai sebuah system mempunyai empat unsure penting yang saling terkait. Unsur pesantren *pertama* adalah kiai pengasuh, pemilik dan pengendali pesantren. Kiai adalah unsur yang paling utama dan menentukan dibandingkan unsur lainnya. Ia adalah orang yang paling bertanggung jawab meletakkan system yang ada dalam pesantren, sekaligus menentukan maju dan tidaknya sebuah pesantren. *Kedua* adalah santri, ialah murid yang belajar pengetahuan ke-Islaman kepada kiai. Tanpa adanya santri, posisi seorang kiai tampak seperti president yang tidak memiliki rakyat. Mereka adalah sumber daya manusia yang tidak saja

¹⁰⁶ Hamdan Farchan, *Titik Tengar Pesantren Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) hal1

mendukung keberadaan pesantren tetapi juga menopang intensitas pengaruh kiai dalam masyarakat. *Ketiga* adalah pondok.¹⁰⁷ yaitu sebuah sistem asrama, termasuk di dalamnya mesjid, yang disediakan oleh kiai untuk mengakomodasi para santri. Bangunan pondok biasanya sederhana dan mempunyai fasilitas minim. *Keempat* adalah kitab kuning, adalah kitab yang berisi bermacam-macam mata pelajaran yang diajarkan oleh kiai kepada para santrinya dan masyarakat. Dengan demikian, pesantren merupakan kompleks perumahan yang meliputi rumah kiai dan keluarganya, beberapa bangunan kamar (pondok) mesjid, ruang belajar, dan sejumlah “kitab kuning” (*al-kitub ash-shafra*).¹⁰⁸

Pesantren mampu menampilkan dirinya sebagai satu-satunya lembaga pendidikan Islam dalam pengertiannya yang utuh, tidak sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya yang lebih menekankan aspek pengajaran kognitif.

Hal ini dimungkinkan karena adanya integrasi dari berbagai komponen antara lain:

1. Nilai-nilai luhur kepesantrenan, seperti keikhlasan, kesederhanaan dan kemandirian (*independensi*)

¹⁰⁷ Istilah pondok dan pesantren adalah dua nama yang menunjuk hal yang sama sehingga sering juga digunakan istilah pondok pesantren, kata pondok berasal dari bahasa arab, yahni *funduq* yang artinya asrama atau hotel Sedangkan istilah pesantren Menurut Dhofier (1982: 18) berasal dari kata santri yang artinya murid Jadi pesantren adalah tempat di mana para santri bertempat tinggal

¹⁰⁸ Dalam konteks ini Abdurrahman wahid menggolongkan pesantren sebagai sub-kultur dengan beberapa criteria antara lain: (1) Eksistensi pesantren yang menyimpang dari umumnya kehidupan sehari-hari, (2) Berlangsungnya proses pembentukan nilai – nilai tersendiri lengkap dengan symbol-simbolnya, dan (3) Adanya daya tarik keluar, artinya sebagian masyarakat menganggap pesantren sebagai alternative ideal bagi kehidupan, serta adanya dialektika antara keduanya

2. Pengasuhan santri di asrama sehingga memungkinkan pengawasan dan pembimbingan secara terus menerus dalam waktu 24 jam sehari.
3. Adanya figur kiai sebagai pusat legitimasi dan tokoh panutan masyarakat di dalam dan di luar pesantren.

Keberhasilan pesantren dalam tugas kajian Islam dapat dibuktikan dengan kenyataan dilestarikannya-bahkan semakin digalakkannya-kajian Islam lewat sumbernya yang primer, yakni *al-Hadits al-Rabbīyah*, hatta di luar lembaga pesantren.

Hal-hal tersebut di atas telah me bentuk jati diri pesantren yang dalam batas-batas tertentu menjadi titik kekuatannya. Untuk itulah, tidak mengherankan apabila banyak pihak diluar pesantren yang menjadikan system pesantren sebagai model alternative dari system pendidikan pada masa kini.

Keberhasilan pesantren dengan karakteristik yang dimilikinya dalam mengemban tugas pendidikan Islam dalam pengertiannya yang utuh, tidak terlepas dari lingkungan dan perkembangan kehidupan pada zamannya. Sebagai contoh, nilai-nilai luhur kepesantrenan berada pada posisi yang cukup aman. Godaan-godaan integritas keperibadian kiai belum mengkahawatirkan. Demikian pula pluralitas pemahaman keagamaan belum begitu dirasakan sebagai ancaman.

Dengan dahsyatnya arus globalisasi yang membawa berbagai dampak dalam kehidupan masa kini, baik berupa pergeseran nilai-nilai kehidupan yang melanda para santri dan bahkan mungkin para kiai, maupun berupa semakin beragamnya pemahaman keagamaan dengan berbagai alirannya dan munculnya isme-isme baru, menjadikan pembenahan dan pembaharuan dalam system pendidikan pesantren sebagai suatu keniscayaan. Namun

pembaharuan yang dimaksud masih dalam kerangka *al-Muhafadzah ‘ala al-Qadim al-Ahslah wa al-Alkhdzu bi al-Jadidi al-Ashlah* dalam pengertiannya yang berimbang.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan terutama menyangkut beberapa aspek tradisi keilmuan pesantren, antara lain;

1. Masih dirasakannya sikap dan orientasi mencari *barokah* mengatasi orietntasi pendalaman ilmu. Hal ini tidak saja mebawa dampak pada lemahnya motivasi pendalaman dan pengembangan kemampuan ilmiah, namun juga berdampak pada kesetiaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi terhadap *maraji’* tertentu yang diyakini sarat dengan *barokah*. Sebaliknya, terhadap *maroji’* baru, kendatipun mungkin lebih efektif dalam proses belajar mengajar pada masa kini, kalangan pesantren masih sering meliriknnya dengan sebelah mata, karena dianggap sepi dari *barokah* yang didambakan.
2. Masih kuatnya anggapan bahwa produk-produk pemikiran Islam yang termaktub dalam kitab-kitab kuning sebagai pemikiran yang sudah final. Hal ini berakibat pada melemahnya pendekatan sejarah sehubungan dengan konteks (*dhuruf*) munculnya pemikiran-pemikiran itu. Di samping itu, berbagai disiplin ilmu yang sebenarnya berfungsi sebagai pisau analisis keilmuan-seperti ushul al-Fiqh untuk fiqih dan ‘ulum al-Qur’an untuk tafsir-tidak mendapatkan porsi perhatian yang seharusnya.
3. Masih kuatnya sikap tertutupan (eksklusivisme) dalam menerima kitab-kitab di luar apa yang dikenal selama ini. Hal ini tercermin dalam kenyataan masih dipertahankannya pemilahan antara *al-Kutub al-Mu’tabarah* dan *al-Kutub Ghayr*

al-Mu'tabarab, kendatipun telah sekitar satu decade ini pemilahan itu digugat oleh sebagian kiai.

4. Masih kurang terciptanya suasana dialogis dalam proses belajar dan mengajar di pesantren yang antara lain berkait dengan sikap *tawadlu'* yang seringkali berlebihan.
5. Kaharusan pesantren untuk menjaga jati diri dan setia kepada ilmu agama sebagai spesialisasinya selama ini, tidak berarti mengharuskan pesantren untuk menutup mata dari informasi-informasi tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan, sebagai konsekuensi dari abad iptek ini. Untuk itu mata pelajaran, seperti ilmu alamiah dasar (IAD) dan ilmu social dasar (ISD) dalam porsi yang tidak mengganggu konsentrasi santri, layak untuk diperkenalkan. Hal ini terutama untuk menjembatani kesenjangan yang mungkin dirasakan antara informasi kitab kuning dengan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam sebuah lembaga seperti apapun bentuk lembaga tersebut baik dalam lingkup makro maupun mikro, Memiliki sistem untuk mengatur jalannya kelembagaan yang di maksud. Pesantren sebagai institusi yang merepresentasikan Pendidikan Islam memiliki sistem yang sangat khas bahkan bisa di bilang berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya yang bergerak dalam bidang Pendidikan.

1. Pondok Pesantren pada Masa Kolonial

Pada periode penjajahan, pesantren berhadapan dengan kolonialis Belanda yang sangat membatasi ruang gerak pesantren. Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik-pendidikan dalam rupa Ordonansi Sekolah Liar (*Widde School Ordonanti*). Melalui kebijakan itu pihak Belanda ingin membunuh madrasah

dan sekolah yang tidak memiliki izin. Selain itu, kebijakan formal Belanda tersebut juga bertujuan melarang pengajaran kitab-kitab Islam yang menurut pihak penjajah berpotensi memunculkan gerakan subversi atau perlawanan di kalangan santri dan kaum muslim pada umumnya. Setidaknya, tercatat empat kali pihak Belanda mengeluarkan peraturan yang bertujuan membelenggu perkembangan pesantren di Indonesia, yaitu pada tahun 1882, 1905, 1925, dan 1932.¹⁰⁹

Akan tapi, pada era ini pula parjuangan pesantren dalam merebut kemerdekaan memperoleh kekuatan melalui kepemimpinan karismatik kiyainya dan keikhlasan para santrinya. Pada sisi lain, muncul pula kekuatan massal Islam dalam bentuk organisasi ekonomi dan kemasyarakatan, seperti Serikat Dagang Islam, Persyarikatan Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama. Lantaran itu, isu-isu strategis tergalang sangat cepat di kalangan umat Islam karena dikuatkan oleh fatwa-fatwa ulama yang mewajibkan (*fardlu 'ain*) umat Islam berjihad melawan penjajah. Fatwa *jihad fi sabilillah* itu mengandung kekuatan eskatologis berupa ganjaran dalam bentuk pahala atau surga di akhirat. Doktrin inilah yang sangat ditakuti penjajah Belanda dan juga Jepang sebab para pejuang muslim tidak pernah takut mati. Dalam kata lain, kematian atau mati *syahid* bagi seorang pejuang muslim diyakini sebagai jalan sekaligus tujuan mulus menuju surga. Kematian bukan rintangan dalam berjihad. Pada masa penjajahan Jepang, pesantren berhadapan dengan kebijakan *Saikere* yang dikeluarkan pemerintah Jepang. Melalui kebijakan itu setiap orang bumiputra diharuskan membungkuk sembilan puluh derajat ke

¹⁰⁹ Lebih lengkap lihat Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, (Jakarta, Erlangga, 2002,) , hal 24

arah Tokyo setiap pagi jam 07.00 guna menghormati atau memuja Kaisar Jepang, Tenno Haika, yang diyakini sebagai keturunan Dewa Amaterasu. Di sinilah peran karismatik K.H Hasyim Asy'ari terbukti ampuh. K.H Hasyim Asy'ari sangat menentang dan menolak melakukan ritual yang diatur pemerintah Jepang itu sehingga ia ditangkap dan dipenjara selama 8 bulan. Di luar dugaan pihak Jepang, penangkapan dan pemenjaraan kiai karismatik tersebut justru melahirkan gelombang perlawanan di kalangan santri. Terjadilah demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan kaum santri untuk menuntut pembebasan K.H Hasyim Asy'ari dan menolak kebijakan *Saikere*.¹¹⁰ Sejak itulah pihak Jepang tidak pernah mengusik dunia pesantren, walau kekejamannya terhadap kaum bumiputra lebih menyakitkan dibanding penjajah Belanda. Namun, watak penjajah tetaplah serupa di manapun, walau berbeda warna kulit dan bahasa, yaitu menghisap dan membunuh.

2. Pondok Pesantren pada masa Kemerdekaan

Pada era kemerdekaan, pendidikan nasional berjalan kondusif dan berkembang. Sebaliknya, pesantren justru tidak banyak lagi menjalankan tugasnya seiring perkembangan madrasah yang sangat pesat. Dalam kurun ini, seperti yang ditulis Mujamil Qomar,¹¹¹ pesantren mengalami semacam musibah karena pemerintah terus melakukan penyeragaman atau pemusatan sistem pendidikan nasional. Hanya pesantren-pesantren besarliah yang mampu menghadapi itu dengan berbagai penyesuaian atau adaptasi terhadap sistem pendidikan nasional. Musibah itu pun dapat

¹¹⁰ Lihat, Mujamil Qomar, *Pesantren...* hal 13

¹¹¹ *Ibid*, hal 13-14

dielakkan. Pada era Orde Baru, bersamaan dengan dinamika politik umat Islam dan negara, Golongan Karya (Golkar) sebagai kontestan pemilihan umum selalu membutuhkan dukungan pesantren. Atas kebutuhan itulah pemerintah yang dikuasai Golkar menaruh sedikit perhatian pada dunia pesantren. Dari kalangan pesantren sendiri muncul intelektual-santri yang secara sadar berusaha memperoleh pembiayaan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbagai gagasan mulai muncul dalam rangka mengajarkan keterampilan di pesantren, seperti peternakan, pertanian, kerajinan, dagang, dan lain-lain. Suasana pun tampak kondusif hingga terbit kebijakan SKB 3 Menteri (Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri) tentang penyetaraan madrasah dengan sekolah umum. Di sisi lain, sesuai dengan dinamika politik dan dinamika sistem pendidikan nasional, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) malah menolak alumni pesantren Gontor karena ijazah pesantren tersebut tidak diakui pemerintah. Pesantren Gontor memang mengatur sendiri seluruh kurikulum dan ijazah lulusannya. Padahal, untuk menjadi mahasiswa IAIN, kualitas alumnus pesantren Gontor diakui lebih baik dibanding lulusan Madrasah Aliyah versi SKB 3 Menteri.¹¹²

Bila dibagi berdasarkan kurun waktu secara bebas, maka pesantren periode 1959-1965 dapat disebut sebagai agen revolusi. Era 1970-an dan 1980-an, pesantren menjadi benteng ideologi Islam karena harus menghadapi gempuran sekularisasi atau demoralisasi akibat kemajuan zaman. Tahun 1990-an, pesantren dapat dikatakan sebagai media pembangunan umat Islam, baik

¹¹² Lebih lengkap tentang madrasah dan SKB 3 Menteri, lihat M Ridwan Nasir, *Op Cit*, hal 90-102

dalam konteks pendidikan Islam maupun peran para kiai dan santri dalam masyarakat. Simpul umum, sebagaimana dikatakan Kuntowijoyo yang dikutip Mujamil Qomar,¹¹³ bahwa sesudah tahun 1965 Islam ditampilkan sebagai ilmu. Namun, anggapan Kuntowijoyo ini jelas tidak berlaku linear. Ajaran Islam tidak terpisah dari politik sehingga pada masa-masa tertentu terus terjadi ketegangan politik antara umat Islam dan negara. Situasi itu terjadi secara fluktuatif hingga kini. Kini, jumlah pesantren di Indonesia berdasarkan data Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama RI Tahun Ajaran 2003/2004 telah mencapai 14.656 buah. Tentu bukan perbandingan ideal dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 230 juta jiwa. Namun, perkembangan pesantren cukup prospektif. Pesantren di Indonesia sedang berbenah dan mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain pesantren yang sudah ada, sekarang banyak muncul tren pesantren spesifik, tematis, atau modern. Pesantren-pesantren gaya baru itu memiliki manajemen pendidikan yang baik dan memiliki spesialisasi pada kompetensi berwirausaha dalam berbagai bidang, seperti pertanian, peternakan, kerajinan, atau industri kecil. Tujuannya agar santri segera mandiri dan mampu bersaing di sektor riil. Akan tetapi, perkembangan pesat pesantren gaya baru tersebut tidak sebanding dengan perkembangan pesantren dengan kompetensi spesifik pada bidang Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Ilmu Ushul Fiqh, dan sebagainya. Kondisi ini menjadi ironi mengingat pesantren bukan lembaga pendidikan umum, tetapi lembaga pendidikan Islam. Pada era reformasi, potret pesantren semakin menarik dicermati dan dipertanyakan. Apakah pesantren nan

¹¹³ Mujamil Qomar, *Op Cit*, hal 14

masyhur di masa lalu, mulai dari gaya kepemimpinan kiai yang karismatik hingga peran penting santri di arena publik.

B. Profil Pondok Pesantren Misykatul Ulum dan KH. M. Khafifi Mustaqim

Dalam perspektif sejarah, pondok pesantren atau yang sering di singkat (pon-pes) telah menegaskan identitasnya sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan (*tafaqquh fi al-din*). Sehingga melalui peran tersebut, maka pondok pesantren telah melahirkan berbagai tokoh agama (*kiai, ustadz*) yang terus menyebarkan ajaran Islam di bumi Nusantara ini. Bahkan berbagai kalangan menilai, bahwa kuatnya Islam di Indonesia, disebabkan oleh eksisnya pondok pesantren ditengah masyarakat sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang telah menjadi motivator dan mobilisator bagi perubahan sosial (*social transformation*).

Berdasarkan komitmen ke-Islaman dan tanggung jawab moral terhadap masa depan masyarakat muslim, maka KH. M. Khafifi Mustaqim, pada tahun 1978 mendirikan pondok pesantren yang diberi nama “Misykatul Ulum”, yang berarti “*Jendela ilmu pengetahuan*”. Bagi KH. M. Khafifi Mustaqim, nama tersebut telah terinspirasi sejak masih nyantri di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur, pada tahun 1955 beliau nyantri di pondok pesantren Curah Jeru Panji Kabupaten Situbondo dibawah asuhan KH. Rosyidi (alm), di pesantren tersebut beliau mendalami berbagai kitab fiqh dan kitab-kitab tasawuf, pendidikan ini ditempuh sampai pada tahun 1957. Selanjutnya pada tahun 1957 beliau nyantri di pondok “Tanjung Rejo” desa Tanjung Glugur Mangaran Situbondo dibawah bimbingan KH. Ghufroon Ali Imroni (alm) hingga tahun 1959. Merasa ilmu yang diperoleh belum cukup

maka, pada tahun 1959 KH. M. Khafifi juga nyantri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo di bawah Asuhan KH. Zaini Mun'im (alm), sedangkan pada tahun 1961, selanjutnya beliau juga nyantri di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan di bawah Asuhan KH. Moh. Cholil, dipesantren ini beliau banyak ditempah tentang ilmu ushul fiqh dan pendidikan keagamaan dan berbagai ilmu ke-Islaman lainnya. Setelah merasa cukup di pesantren Sidogiri, maka KH. M. Khafifi Mustaqim menuntaskan ilmunya di pondok pesantren Tempurejo Mumbulsari Jember, dibawah asuhan KH. Ali sampai pada tahun 1963, setelah dirasa cukup menuntut ilmu maka, KH. M. Khafifi Mustaqim pulang Kampung halamannya untuk mengamalkan ilmunya dimasyarakat Dusun Sekarputih Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, kampung ini merupakan tempat yang amat dicintai oleh, karena beliau telah dilahirkan dan dibesarkan di dusun kecil tersebut oleh orang tua beliau yaitu KH. Mustaqim bin Abdul Razaq dan Ny. Hj. Sumami binti Barmawi.¹¹⁴

Selanjutnya pada tahun 1964 dengan bekal ilmu keagamaan yang cukup dalam, beliau dipercaya oleh Departemen Agama RI dengan diangkat menjadi kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banyuputih Asembagus Situbondo, atau pada waktu itu lebih dikenal dengan sebutan “penghulu agama”, bahkan pada tahun itu pula KH. M. Khafifi Mustaqim telah menikah dengan Ny. Hj. Mahfudlatu Thohirah, Isteri yang selanjutnya menjadi mitra sejati dalam menyebarkan agama Islam ditengah masyarakat. Untuk memenuhi tugasnya beliau terpaksa harus meninggalkan

¹¹⁴ Data yang ditulis dalam bagian ini di olah dari hasil penelitian wawancara Peneliti, Observasi dan Dokumentasi Pesantren Misykatul Ulum, tanggal 24 Juli 2008

masyarakat Sekarputih yang telah lama menunggu siraman ilmu agama dari beliau, karena mayoritas mereka sangat awam masalah agama, terlebih masyarakat berpendidikan sangat rendah hanya mengenyam pendidikan dasar (SD), dan tak jarang saat itu masyarakat banyak yang buta huruf (aksara). Bayangan tentang harapan masyarakat terhadap peran beliau akhirnya pada tahun 1974 meluluhkan hati KH. M. Khafifi Mustaqim untuk melepaskan jabatannya sebagai Kepala KUA (penghulu agama) Banyuputih dan mengarahkan komitmen untuk mengabdikan seluruh hidup beliau bagi perjuangan tegaknya ajaran Islam ditengah-tengah masyarakat.

Sejak melepaskan jabatannya sebagai kepala KUA, KH. M. Khafifi Mustaqim memulai pengabdianya dengan aktif diberbagai kegiatan keagamaan melalui wadah Nahdlatul Ulama (NU) yang telah lama dikenalnya sejak nyantri beberapa pesantren, dengan menjabat Ketua Ranting dan banyak memberikan pengajian-pengajian keagamaan dimasyarakat. Dalam Konteks ini KH. M. Khafifi Mustaqim mengatakan:

Sejak di pesantren, saya telah mengenal tentang organisasi Nahdlatul Ulama dari para kyai, termasuk KH. Rosyidi, KHR. Ghufron Ali Imroni, KH. Zaini Mun`im, KH. Cholil, KH, Ali dan terutama dari KHR. As`ad Syamsul Arifin, beliau dalam setiap kesempatan selalu mewasiatkan agar para santri terus memperjuangkan Nahdlatul Ulama dengan faham ahlussunnah wal jama`ah, sebab organisasi ini merajut konsep Islam dan ke-Indonesiaan yang sesuai dengan karakterter masyarakat Indonesia. Saya yakin bahwa perjuangan para ulama`adalah perjuangan yang

mulia, oleh karena itu perjuangan para ulama harus saya lanjutkan, begitupun saya harapkan bagi seluruh santri saya.¹¹⁵

Setelah menggeluti berbagai peran sosial keagamaan, maka keinginan mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan ke-Islaman bagi masyarakat semakin tumbuh didalam hati beliau, akhirnya melalui berbagai musyawarah dengan para guru beliau dan istiharah memohon petunjuk kepada Allah SWT, akhirnya pada tahun 1978 beliau bertekad mendidikan pondok pesantren yang diberi nama Misykatul Ulum "*Jendela ilmu Pengetahuan*" yang diharapkan akan mampu menjadi pusat keilmuan bagi kehidupan masyarakat. Jelang satu bulan didirikan pesantren yang hanya berupa musholah terbuat dari bambu, maka beberapa santri berdatangan terutama dari tetangga sekitar daerah Situbondo dan daerah Kembangan Curah Dami Kabupaten Bondowoso, santri pertama berjumlah 15 orang laki-laki dan 5 perempuan, sedangkan proses pendidikan ditangani langsung oleh KH. M. Khafifi Mustaqim, mengingat pada saat itu masih terbatasnya para asatidz alumni pondok pesantren.¹¹⁶

Walaupun pada awal berdirinya pondok pesantren Misykatul Ulum memiliki banyak keterbatasan baik dalam hal sarana pendidikan maupun berbagai perangkat lainnya, namun dengan ketekunan dan kesabaran pengasuh serta dukungan masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, jelang dua tahun kemudian pada tahun 1980, akhirnya melalui kerjasama dengan masyarakat didirikanlah Musholah Misykatul Ulum yang digunakan sebagai tempat ibadah dan media pembelajaran ilmu-

¹¹⁵ Wawancara dengan KH M Khafifi Mustaqim tanggal 24 Juli 2008

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan salah satu alumni PP Misykatul Ulum yakni Abdus Syakur tanggal 24 Juli 2008

ilmu agama. Namun banyaknya santri merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sehingga menuntut pengasuh dan seluruh jajaran pengurus menambah lokal pesantren, akhirnya pada tahun 1982 dibangun Asarama Putra dan Putri masing-masing tiga lokal. Sedangkan pada tahun 1984 juga didirikan Musholah pesantren Putri dan baru pada tahun 1985 didirikannya Madrasah diniyah Miskatul Ulum sebagai sarana transformasi ilmu-ilmu keagamaan bagi para santri dan masyarakat.

Melalui sistem pembelajaran pondok pesantren seperti sorogan, bandongan dan sistem madrasah diniyah, maka berbagai ilmu keagamaan berupa tauhid, fiqh dan tasawuf telah ditransformasikan kepada para santri, dan juga masyarakat sekitar yang bermukim di lingkungan pesantren. sehingga keberadaan pondok pesantren Misykatul ulum sampai saat ini telah diposisikan sebagai pusat ilmu ke-Islaman yang memberikan kontribusi bagi transformasi ajaran Islam ditengah masyarakat serta menjadi media pendidikan yang ikut andil mencerdaskan kehidupan masyarakat.¹¹⁷

1. Visi dan Misi Pondok Pesantren Misykatul Ulum.

Dalam melaksanakan sistem pendidikan yang integral dan sistematis maka, pondok pesantren Misykatul Ulum sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berada di desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo memiliki tujuan yaitu “terciptanya suatu masyarakat yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman”

Dalam rangka memberi arah, motivasi dan wawasan yang diwujudkan dimasa mendatang serta cita-cita yang dapat menjamin

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Ust Zainal Arifin tanggal tanggal 26 Juli 2008 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah MTs Misykatul Ulum

kelangsungan dan perkembangan pendidikan ke-Islaman di masyarakat, maka visi pondok pesantren Misykatul Ulum adalah” Mewujudkan Insan Berilmu, Beramal, dan Bertaqwa kepada Allah Swt”.

Berpijak dari cita-cita pendiri, maka pondok pesantren Misykatul Ulum memiliki misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan/ pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan berkualitas.
- b. Meningkatkan/menumbuhkan insan yang berwawasan dan berkepribadian Ulama’ul Amilin.
- c. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran Agama Islam dan nilai-nilai dasar budaya luhur bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam kebiasaan bertindak.¹¹⁸

Dari visi dan misi tersebut seluruh sistem pondok pesantren Misykatul Ulum diorientasikan untuk mewujudkan lembaga ilmiah, masyarakat santri yang ilmiah dan beramalialah, sehingga akan lahir pemimpin-pemimpin keagamaan yang tangguh guna melakukan berbagai transformasi ke-Islaman ditengah masyarakat yang dilandasi oleh pengabdian, keikhlasan, kemandirian serta profesionalitas.

Melalui berbagai strategi, yang dikembangkan oleh pondok pesantren Misykatul Ulum, maka secara umum masyarakat yang sebelumnya terbatas dalam memahami ilmu-ilmu ke-Islaman telah menunjukkan perkembangan yang signifikan.¹¹⁹

¹¹⁸ Dokumen, PP Misykatul Ulum tahun 2008

¹¹⁹ Wawancara dengan Kepala Sekolah MTs, Misykatul Ulum tanggal tanggal 26 Juli 2008 Desa Trebungan - Mangaran - Situbondo

2. Letak Pondok Pesantren Misykatul Ulum

Pondok Pesantren Misykatul Ulum terletak di Dusun Sekar Putih Timur Desa Trebungan Kecamatan Manggaran Kabupaten Situbondo. Pesantren ini dapat di jangkau dengan taksi dan disambung dengan jalan kaki 60 m dari jalan raya. Sedangkan batas-batas Pondok Pesantren Misykatul Ulum adalah, Sebelah barat adalah Dusun Sekar Putih Barat dan Jalan Raya Semiring Kalbut Situbondo. Sebelah Timur adalah Sawah dan SMPN I Kecamatan Mangaran. Sebelah Utara Sawah, Tambak.. Sebelah selatan adalah rumah penduduk ¹²⁰

3. Susunan Organisasi Pondok Pesantren Misykatul Ulum.

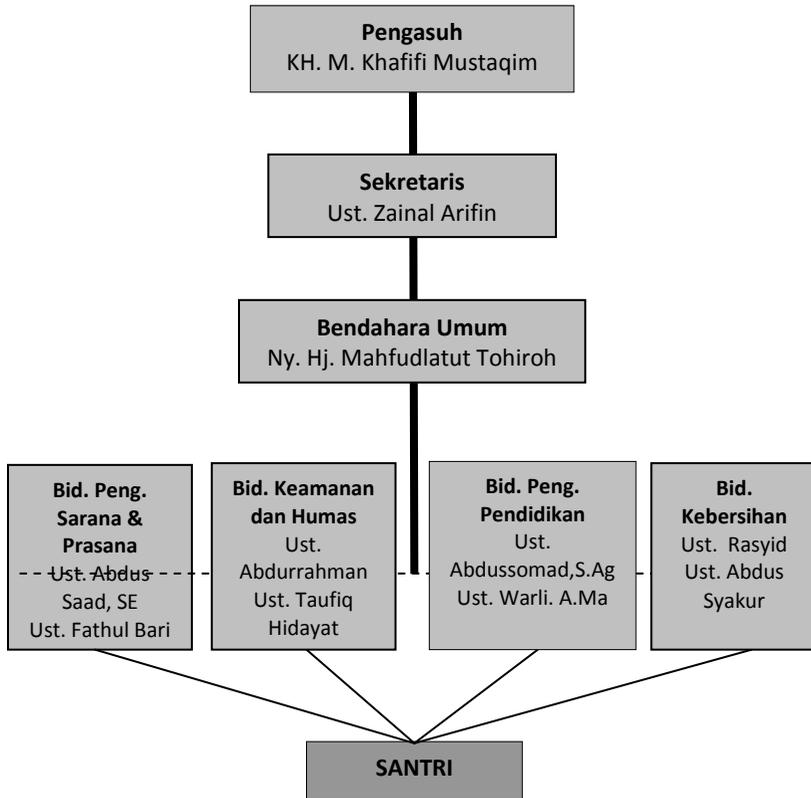
Dalam perkembangannya pesantren di masyarakat memiliki ciri khas tradisi tersendiri, apabila dibandingkan dengan lembaga pendidikan modern yang datang sesudahnya. Dari tradisi pendidikan pesantren yang tumbuh subur khususnya di daerah Jawa telah mengilhami berbagai sistem pendidikan pesantren di berbagai daerah di Nusantara. Sehingga pesantren hadir sebagai sistem pendidikan yang mempunyai tata aturan yang diwarnai dengan norma-norma ajaran Islam, dimana ajaran tersebut menekankan pada sikap patuh dan *tawadhu` (obedience with to bambly)* seorang santri kepada kiainya. Artinya otoritas sentral kyai menjadi sangat menentukan arah dan tujuan sistem pendidikan pesantren.

Walaupun sampai saat ini sistem tersebut masih dipakai oleh sebagian pesantren tradisional, namun di pondok pesantren

¹²⁰ Hasil Observasi tanggal 15 Juli 2008 di Desa Trebungan Mangaran Situbondo

Misykatul Ulum tidak menggunakan kepemimpinan dengan meletakkan otoritas penuh ditangan satu figur kyai, akan tetapi mulai sejak dirintis sampai saat ini menganut sistem kolektif-partisipatif yang bertujuan menggali dan memanfaatkan kemampuan berbagai elemen yang terdapat di pondok pesantren. Dalam rangka mewujudkan sistem yang demokratis di pesantren, maka susunan struktur organisasi pondok pesantren Misykatul Ulum Trebungan Mangaran Situbondo sebagaimana bagan dibawah ini;

Bagan 3.1
Struktur Organisasi Pondok Pesantren
Misykatul Ulum Desa Trebungan
Kec. Mangaran Kab. Situbondo Tahun 2008



KETERANGAN :

- : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi¹²¹

¹²¹ Dokumen PP Misykatul Ulum 2008

4. Keadaan bidang studi dan literatur

Dalam aktivitas pembelajaran yang dijadikan pegangan dan digunakan di pesantren Miftahul Ulum dipilah dalam dua macam yaitu bidang studi dan literatur dalam pesantren serta berdasarkan tingkatan. Adapun bidang studi dan literatur tersebut adalah tafsir, Khassiyah Asshawi, Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, Hadist: Riyadus Shalihin, Shohih Bukhori, Hadist Arba`in. Ushul Fiqih: Waraqat al-Dimyathi ala Syarh al-Waraqat, Fiqih: I`anatu Al-Thalibin, Bulughul al-Maram, Sullam at-Taufiq, Kasyifatussaja & al-Mubadi` al-Fiqh, Fathul Qorib. Tasawuf: Ihya` Al-Ulum Al-din, Hidayah al-Adzkiya.

C. KH. M. Khaffi Mustaqim dan Transformasi Sosial

Penyajian data merupakan deskripsi dari hasil penelitian dengan mengacu pada judul penelitian dan kerangka teori serta data-data yang terdapat dalam obyek penelitian. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi di daerah penelitian, maka hasil penelitian ini akan disajikan secara lengkap setelah dilakukan analisa data melalui metode *deskriptif-reflektif* dengan menggunakan klasifikasi data antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Agar penelitian ini terarah, maka penyajian data disesuaikan dengan judul tersebut. Maka akan di gambarkan tentang peranan KH. Moh. Khaffi Mustaqim dalam melakukan transformasi sosial seperti berikut ini :

1. KH. Moh. Khaffi Mustaqim dan Pendidikan Agama Islam

Sesungguhnya peran atau fungsi utama pondok pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi atau masyarakat muslim agar memiliki dan menguasai ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi-aldin*) secara mendalam

serta menghayati dan mengamalkannya dengan ikhlas semata-mata di tujukan untuk pengabdianya kepada Allah Swt didalam hidup dan kehidupannya. Oleh karena pondok pesantren mengajarkan berbagai materi ilmu-ilmu ke-Islam terutama tentang fiqh Islam dilakukan melalui jalur pendidikan. Sebab pendidikan dalam Islam merupakan proses yang tidak mengenal waktu dan usia, sehingga wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk terus mencari dan menambah ilmu pengetahuan sampai akhir hayatnya. Sebab dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat harus didasarkan pada ilmu.

Sebagai lembaga pendidikan yang menfokuskan pada transformasi sosial yang bermuara pada pemahaman ke-Islaman, maka pondok pesantren Misykatul Ulum telah memulainya dengan pola pembelajaran yang sangat sederhana, pola tersebut seperti banyak dilakukan oleh pondok pesantren lain yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Dalam hal ini KH. M. Khaffi Mustaqim mengatakan bahwa;

“Dalam bidang pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren ini bermula dari strategi pembelajaran khususnya dalam ilmu keagamaan pondok pesantren misykatul Ulum bagi masyarakat dilakukan melalui pendidikan para santri yang terdapat disekitar lingkungan pesantren. Mereka awalnya hanya sebagai “santri kalong” tau yang tidak bertempat di pesantren, sebab pada malam hari mereka belajar ilmu keagamaan di Musholah Misykatul Ulum sedangkan pada siang hari mereka bekerja membantu orang tua sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Ada yang bekerja disawah sebagai petani, buruh tani dan sebagainya, sebab mayoritas pekerjaan masyarakat Trebungan adalah petani dan buruh tani. Pada saat itu saya hanya menerapkan pola pembelajaran

yang sangat sederhana, sebab kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih baru diasah.”¹²²

Berpijak dari hal tersebut, maka secara mendasar KH, Moh. Khafifi Mustaqim sebagai pengasuh pondok pesantren Misykatul Ulum telah berusaha untuk melakukan adaptasi dengan keadaan masyarakat desa Trebungan yang masih belum banyak memiliki kesadaran pendidikan keagamaan. Akan tetapi secara kongkrit pondok pesantren Misykatul Ulum telah menyentuh dimensi-dimensi kesadaran pendidikan dengan melalui penanaman ilmu keagamaan bagi para santri yang masih usia pendidikan. Namun usaha ini diharapkan akan memberikan dorongan kesadaran bagi masyarakat baik dalam kesadaran pendidikan maupun pola kehidupan keberagamaan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh pengasuh dan pengurus pondok pesantren Misykatul Ulum terus meningkatkan usaha transformasi sosial melalui jalur pendidikan keagamaan dengan beberapa metode. Metode-metode atau pola dan media pembelajaran bahkan materi yang disuguhkan tetap didasarkan pada corak dan karakter pondok pesantren Misykatul Ulum sebagai pesantren tradisional. Adapun media pembelajaran dalam upaya transformasi tentang pendidikan Agama Islam dilakukan melalui penyelenggaraan jalur pendidikan antara lain yaitu:

a. Madrasah Diniyah (Sekolah Keagamaan)

Sejak berdirinya tahun 1985 penyelenggaraan Madrasah Diniyah di pondok pesantren Misykatul Ulum bertujuan

¹²² Wawancara dengan KH Khafifi Mustaqim tanggal 27 Juli 2008

meningkatkan pelajaran keagamaan bagi santri yang menimba ilmu di pesantren tersebut. dan juga pada masyarakat sekitar. Hal ini berpijak dari pemahaman bahwa pendidikan agama Islam harus dilakukan secara utuh mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat yang paling tinggi dan harus dilaksanakan secara sistematis dan terprogram. Dalam proses transformasi ajaran-ajaran Islam di pondok pesantren Misykatul Ulum juga diselenggarakan melalui sistem ini, sebab pada realitasnya pelajaran tentang pendidikan Agama Islam memiliki cakupan yang cukup luas sehingga sangat dibutuhkan metode transformasi secara bertahap agar seluruh materi yang disampaikan dapat diterima dengan utuh oleh para santri dan juga murid yang dari luar pondok pesantren. Mengenai hal tersebut Ust. Abdus Shomad mengatakan bahwa;

“Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Misykatul Ulum cukup efektif bagi upaya transformasi ilmu tentang ke-Islaman pada santri dan juga pada masyarakat sekitar, sebab melalui pembelajaran dan model kurikulum yang sistematis akan sangat membantu santri dalam menguasai berbagai materi keagamaan. Bahkan dengan berbagai ilmu lainnya akan mendukung integritas keilmuan mereka, akan mampu memahami teori ilmu keislaman lainnya serta dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren maupun dimasyarakat”¹²³

Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa, secara subatnsial tujuan transformasi ajaran tentang pendidikan keagamaan dapat tersentuh melalui penyelenggaraan Madrasah Diniyah Misykatul Ulum, sebab didalam proses pembelajaran tersebut terdapat

¹²³ Hasil wawancara dengan Ust Abdus Shomad, SAg tanggal 25 Juli 2008 di Kantor Madrosah Diniyah Misykatul Ulum

perangkat kurikulum dengan komposisi ilmu agama dan ilmu pendukung lainnya sehingga dengan sistem Madrasah Diniyah tersebut upaya transformasi pendidikan keagamaan dapat mudah dilaksanakan sekaligus dapat mendorong penguatan kualitas praktek tentang ilmu Agama Islam ditengah kehidupan masyarakat Desa Trebungan tersebut.

Terkait dengan sistematika materi yang disampaikan di dalam pola pembelajaran pendidikan Islam di Madrasah Diniyah Misykatul Ulum dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkatan kelas yang ditempuh oleh para santri mulai dari tingkat awaliyah, tingkat wusto dan tingkat ulya, atau dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling tinggi. Menyangkut hal tersebut maka Ustd. Sahwati mengatakan bahwa, berbagai tahapan materi keislaman dan materi yang lain yang diselenggarakan di madrasah diniya Misykatul Ulum bertujuan agar para santri dapat memahami disiplin ilmu tersebut secara menyeluruh, dalam materi tingkat dasar (*amaliyah*) disampaikan masalah-masalah; kitab tharah (bersuci), kitab sholat, kitab jenazah, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji dan umrah. Sedangkan pada tingkat menengah (*wusto*) disampaikan Kitab mu`malat, kitab Faraid, kitab nikah, kitab jinayat, kitab hudud. Dan pada tingkat tinggi (*ulya*) juga disampaikan kitab jihad (peperangan), kitab aqdiyah (hukum-hukum pengadilan) dan kitab khilafah (tata pemerintahan). Bahkan pada tingkat menengah dan tinggi tidak hanya dipelajari masalah produk fiqh Islam saja, tetapi juga disampaikan ilmu *ushul fiqh* sehingga para santri dan murid yang dari luar pondokpun dapat

memahami berbagai cara-cara ditetapkannya dalam materi tersebut”.¹²⁴

Dalam pola penyampaian dengan menggunakan metode yang digunakan seperti, ceramah, diskusi kelompok (*halagoh*) dan penugasan terhadap santri. Sampai saat ini metode ini masih digunakan dan masih dianggap efektif untuk peningkatan pendidikan keagamaan dilingkungan pondok pesantren Misykatul Ulum guna mencerdaskan masyarakat khususnya lingkungan sekitar pondok pesantren Misykatul Ulum.

Lebih jauh Ustd. Nanik, menyatakan bahwa keberadaan Madrasah Diniyah Misykatul Ulum juga sangat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah keagamaan khususnya bidang keagamaan yang terjadi ditengah-tengah mereka, misalnya melalui *bahtsul masail* yang dimediasi oleh para asatidz dan santri dan juga karena KH. Moh. Khafifi Mustaqim sebagai kiai yang ahli dalam ilmu keagamaan. Maka masalah keagamaan yang dapat ditengah masyarakat terselesaikan, sehingga akan menambah kualitas kehidupan keagamaan yang mereka praktekan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka madrasah diniyah Misykatul ulum merupakan unsur pesantren yang dikategorikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang sangat efektif bagi proses transformasi Pendidikan Agama Islam dan mendorong terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat desa Trebungan Mangaran Kabupaten Situbondo.¹²⁵

¹²⁴ Hasil wawancara Utd Sahwati, SPd, I Guru Madrasah Diniyah Misykatul Ulum tanggal 27 Juli 2008

¹²⁵ Wawancara dengan Utd Nanik, Guru Madrasah Diniyah Misykatul Ulum tanggal 27 Juli 2008

b. Pendidikan Formal Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Sejak KH. Moh. Khafifi Mustaqim yang memang mempunyai obsesi tentang pendidikan Agama Islam pada tahun 2004 di rintislah lembaga formal yakni Madrasah Tsanawiyah Misykatul Ulum untuk memberikan dan mentransformasikan ilmu yang dimiliki KH. Moh. Khafifi Mustaqim dalam mendirikan Madrasah Tsanawiyah Misykatul Ulum mengatakan:

”Dengan didirikannya lembaga Madrasah Tsanawiyah Misykatul Ulum saya sebelum di resmikan mengundang masyarakat sekitar untuk menyampaikan dan mengajak kepada para masyarakat agar putra putrinya setelah lulus dari sekolah dasar bisa di sekolahkan di Madrasah Tsanawiyah Misykatul Ulum agar sumber daya manusia (SDM) di desa terebungan ini tidak hanya sampai di tingkat sekolah dasar dan menjadi pengangguran”¹²⁶.

Berpijak pada hal tersebut, maka sangat jelas bahwa KH.. Khafifi Mustaqim memang mempunyai keinginan yang begitu besar untuk merubah masyarakat di Desa Trebungan Kecamatan Manggaran tersebut sadar akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat khususnya putra - putri dari masyarakat Desa Trebungan. Maka didirikanlah lembaga formal Madrasah Tsanawiyah (MTs) Misykatul Ulum di Desa Trebungan tersebut .

Dalam realitasnya mulai tahun 2006 sudah banyak para santri dan putra-puri dari lingkungan atau masyarakat Desa Terbungan Kecamatan Mangaran yang sudah masuk ke sekolah atau lembaga tersebut. Maka obsesi kiai bertambah untuk mendirikan lembaga formal yang lebih tinggi di pondok pesantren Misykatul Ulum seperti Madrasah Aliyah (MA) dan yang sederajat bahkan pada

¹²⁶ Wawancara dengan KH Moh Khafifi Mustaqim, tanggal 24 Juli 2008

tahun 2007 sudah dibangun gedung untuk lembaga yang lebih tinggi akan tetapi sampai saat belum di tempati.

2. KH. Moh. Khafifi Mustaqim dan Kebudayaan (Culture)

Pada dasarnya pesantren berdiri ditengah-tengah masyarakat dan memiliki keterlibatan dalam proses transformasi sosial pada masyarakat sekitar pesantren khususnya. Hal ini dilakukan karena pesantren mengemban misi membumikan dan menyebarkan ajaran Islam ditengah masyarakat yang plural (beranekaragam), sehingga pilihan lokasi pendirian pesantren banyak di daerah pedalaman (daerah terpencil) yang masih belum tersentuh oleh ajaran Agama Islam.

Berpijak dengan hal tersebut, maka pada dasarnya pondok pesantren Misykatul Ulum didirikan ditengah masyarakat memiliki tujuan untuk melakukan transformasi ajaran Islam kepada masyarakat melalui kebudayaan yang telah berakar didaerah tersebut. Dalam melakukan interaksi antara pondok pesantren Misykatul Ulum sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan masyarakat sebagai subyek perubahan (*transformation*), dilakukan melalui sikap yang mengakomodir terhadap berbagai kebudayaan yang berkembang, sehingga peran pesantren Misykatul Ulum dan KH. Moh Khafifi Mustaqim mampu mendesain terciptanya perubahan prilaku keagamaan yang lebih berkualitas di desa tersebut.

Berkaitan dengan sikap pesantren dalam merangkul berbagai tradisi yang berada ditengah masyarakat desa Trebungan tersebut. Dalam hal tersebut KH. M. Khafifi Mustaqim mengatakan bahwa;
“Dalam menyebarkan kebudayaan Islam ditengah masyarakat Trebungan, bukanlah hal yang mudah, sebab sebelumnya mereka tidak memiliki kesadaran melaksanakan kebudayaan

dan ajaran Islam yang berbentuk ibadah setiap hari, seperti sholat dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami melakukan interaksi melalui kebudayaan masyarakat, dengan budaya inilah maka ajaran-ajaran Islam dapat ditransformasikan secara merata ditengah masyarakat. Bahkan dengan pola sikap pesantren yang akomodatif terhadap kebudayaan mereka, akhirnya masyarakat merespon dan mendukung berbagai langkah dan program yang dilakukan pesantren.¹²⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan pondok pesantren Misykatul Ulum menjadi keniscayaan sebagai institusi yang dilahirkan atas kehendak dan kebutuhan masyarakat desa Trebungan. Melihat posisi inilah, menurut K Satimun salah satu tokoh masyarakat di desa tersebut, pondok pesantren Misykatul Ulum selanjutnya menetapkan upaya transformasi ajaran Islam melalui jalur kebudayaan, sebab cara ini sangat efektif bagi keberhasilan proses transformasi ajaran Islam pada seluruh lapisan masyarakat yang sangat sulit dijangkau melalui jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren. Bagi K Satimun bahwa, didalam masyarakat terdapat kebayaan yang bermacam-macam dan sangat berakar kuat. Oleh karena itu langkah pesantren Misykatul Ulum, merangkul kebiasaan yang dilakukan melalui internalisasi ajaran Islam sangat relevan dengan keinginan masyarakat Desa Trebungan.¹²⁸

Menurut KH. M. Khafifi Mustaqim, secara umum di Desa Trebungan terdapat berbagai macam tradisi yang berkembang. Bagi pondok pesantren Misykatul Ulum bentuk-bentuk kebudaya-

¹²⁷ Wawancara dengan KH Moh Khafifi Mustaqim, tanggal 24 Juli 2008

¹²⁸ Wawancara dengan K Satimun, sebagai tokoh masyarakat tanggal 28 Juli 2008

an yang terdapat didalam masyarakat dan dapat dijadikan media transformasi sosial melalui jalur kebudayaan antara lain sebagai berikut;

a. Kebudayaan "Majelis Ta`lim"

Dalam proses transformasi sosial melauai jalur kebudayaan Islam pada masyarakat desa Trebungan melalui juga dilakukan oleh pondok pesantren Miftahul Ulum dengan menyediakan majelis ta`lim yang diselenggarakan oleh pihak pondok pesantren maupun atas inisiatif masyarakat. Hal ini diorientasikan sebagai media bersosialisasi berbagai perkembangan hasil-hasil pembahasan ajaran ke-Islaman tentang problematika yang berkembang ditengah masyarakat, sehingga masyarakat terus mengikuti berbagai hasil ijthihad yang dilakukan oleh pondok pesantren Misykatul Ulum dan dapat dijadikan pedoman prilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai keberadaan majelis ta`lim sebagai media transformasi sosial melalui kebudayaan Islam ditengah masyarakat, maka KH. M. Khafifi Mustaqim mengatakan bahwa;

"Di dalam jalur majelis *ta`lim* bertujuan untuk membangun kualitas keagamaan masyarakat melalui transformasi budaya-budaya Islam. Kami menyadari, bahwa Islam menghendaki prilaku masyarakat yang selalu berpedoman pada syari`at Islam, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selain hal diatas majelis *ta`lim* merupakan sarana yang sangat efektif, sebab dalam forum tersebut masyarakat dari berbagai dusun, desa dan daerah lain datang untuk mengikuti pengajian yang disampaikan oleh para ulama. Melalui komunikasi ini akan dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa seperti pengajian rutin yang diadakan tiap hari Jum`at.¹²⁹

¹²⁹ Wawancara dengan KH Moh Khafifi Mustaqim, tanggal 28 Juli 2008

Pada majelis *ta`lim* ini, pondok pesantren selalu terlibat, baik dilakukan oleh pengasuh maupun para asatidz dan asatidzah yang berperan sebagai transformator ilmu-ilmu ke-Islaman terutama masalah ke-Islaman. Adapun materi yang disampaikan pada forum tersebut sangat dasar dan menyangkut masalah *ibadah* dan *mu`amalah* yang mungkin dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bidang materinya yang disampaikan adalah materi tata cara bersuci, sholat, zakat, haji, dan berbagai materi yang masih aktual terjadi dimasyarakat seperti perlunya seorang muslim memelihara dan melestarikan lingkungan dengan baik. Sedangkan materi lain menyangkut masalah hubungan sosial antara sesama, materi ini diharapkan akan memberikan memupuk masyarakat untuk terus memperbaiki perilaku sosialnya. Bahkan dalam forum majelis *ta`lim* juga disampaikan motivasi kesadaran pendidikan keagamaan bagi masyarakat.¹³⁰

Sedangkan bentuk majelis *ta`lim* yang diselenggarakan baik atas inisiatif pesantren maupun masyarakat cukup variatif. Antara lain berbagai peringatan hari besar Islam (PHBI) seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, peringatan Isra` Mi`raj, peringatan 1 Muharrom sedangkan bentuk lainnya adalah pengajian khatmil Qur`an, pengajian muslimat dan pengajian fatayat serta berbagai majelis *ta`lim* lainnya. Melalui forum tersebut pondok pesantren telah melibatkan diri secara intens dan ikut melestarikan keberadaannya di tengah masyarakat.

¹³⁰ Wawancara dengan K Satimun, adalah tokoh masyarakat, tanggal 27 Juli 2008

b. Kebudayaan “*Hajian atau Walimatul Hajj*”

Kebudayaan “hajian” juga terdapat di masyarakat Desa Trebungan, kebiasaan ini dilakukan bagi anggota masyarakat yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu beribadah haji ke *Baitullah*. Oleh karena itu dalam rangka melepaskan kepergian anggota masyarakat tersebut, maka keluarga yang bersangkutan mengadakan selamatan “hajian” atau dalam istilah fiqh Islam dikenal dengan “*walimatul hajj*”. Dalam kebudayaan “hajian” ini, masyarakat Trebungan melibatkan pondok pesantren Misykatul Ulum, bahkan mulai dari bimbingan haji, mulai dari risalah haji, syarat dan rukun haji, kewajiban, sunnah ibadah haji, larangan ketika ihram, dan berbagai teknik menunaikannya, selanjutnya unsur pesantren juga dilibatkan dalam memimpin do`a bersama pada acara selamatan “hajian” atau *walimatul hajj*, untuk keselamatan anggota masyarakat yang akan pergi haji serta dapat menjadi haji yang mabrur da juga KH. M. Khaffi Mustaqim memberi pelajaran atau pelatihan kepada jamaah haji yang sering di tempatkan di PP. Wali Songo Mimbaan Situbondo.¹³¹

Dengan demikian, maka secara umum pondok pesantren Misykatul Ulum sangat berperan dalam transformasi kebudayaan Islam melalui tradisi “hajian” ditengah masyarakat Trebungan khususnya. Oleh karena itu proses transformasi ajaran Islam dapat selalu mengiringi setiap kebudayaan yang berkembang ditengah masyarakat. Dari beberapa media transformasi ajaran Islam melalui jalur kebudayaan, maka hal ini sesuai dengan misi awal didirikannya pesantren Misykatul Ulum adalah menyebarluaskan ajaran Islam kepada masyarakat.

¹³¹ Wawancara dengan KH M Khaffi Mustaqim, tanggal 25 Juli 2008

c. Kebudayaan “*Khitanan*” atau “*Sunatan*”

Dalam konteks kebiasaan “*khitan*” atau “*sunatan*” merupakan kebiasaan yang telah mendarah daging ditengah kehidupan masyarakat desa Trebungan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Trebungan untuk memotong kulit yang menutupi ujung penis bagi anak-anak laki-laki, namun tidak diperingati untuk khitan perempuan. Secara umum kebiasaan tersebut dilaksanakan pada usia anak-anak dan jarang pada orang dewasa, sedangkan upacara tersebut dalam istilah ajaran Islam disebut *walimatul khitan*.

Dalam konteks kebuasaan inilah, pondok pesantren Misykatul Ulum ikut ambil bagian dalam transformasi ajaran –ajaran Islam di tengah masyarakat desa Trebungan, melalui tradisi “*khitanan*” ini disampaikan berbagai materi keislaman khususnya tentang fiqh antara lainnya; pengertian khitan, hukum khitan, waktu khitan, tasyakuran khitan (*i`dzar*), dan hikmah khitan bagi seorang muslim. Dengan demikian maka secara langsung pondok pesantren Misykatul Ulum telah memberikan pemahaman bagi masyarakat Trebungan tentang risalah khitan sebagaimana yang diwajibkan dalam Islam dan dikategorikan sebagian bagian dari *thaharah* (bersuci). Langkah tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, selain memberikan ilmu fiqh, juga dapat mendorong penguatan ajaran Islam dalam bentuk praktek ibadah dalam kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat Trebungan.¹³²

d. Kebudayaan “*Perkawinan*”

Di tengah masyarakat Trebungan tradisi “perkawinan” telah menjadi mengakar pada segala strata sosial, hal ini disebabkan suatu pandangan bahwa kebiasaan “perkawinan” hanya

¹³² Wawancara dengan KH Idris selaku tokoh masyarakat, tanggal 29 Juli 2008

dilaksanakan sekali dalam hidup sehingga harus dimeriahkan dan berbagai bentuk upacara, agar perkawinan antara laki-laki dan perempuan dapat membawa berkah serta melahirkan keturunan yang baik, selain juga ini berpijak dari suatu anjuran Islam untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang telah memenuhi syaratnya sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu upacara “perkawinan” menjadi tradisi yang sangat kuat dan berakar ditengah masyarakat Trebungan.

Dalam kebiasaan tersebut, menurut Ust. Husnah, terdapat tata cara yang harus dilalui, langkah pertama harus dilakukan peminangan sebagai ikatan pra perkawinan antara laki-laki dan perempuan, hal ini dijadikan sebagai tanda bahwa kedua pasangan tersebut telah ada yang memiliki, selanjutnya para orang tua bermusyawarah menetapkan hari perkawinan dan segala hal yang terkait dengan berbagai perangkat upacara tersebut. Sedangkan langkah yang kedua adalah pelaksanaan upacara “perkawinan” yang ditandai melalui akad nikah dan dilanjutkan dengan acara *walimatunnikah* yang melibatkan masyarakat dan para ulama khususnya pengasuh pondok pesantren Misykatul Ulum atau para asatidz yang dipercaya oleh pengasuh untuk menyampaikan materi *fiqhunnikah* pada acara tersebut.¹³³

Pada upacara “perkawinan” tersebut, maka pondok pesantren Misykatul Ulum melalui pengasuh atau para asatidz menyampaikan materi tentang fiqh Islam yang terkait dengan perkawinan. Adapun materi tersebut antara lain ; pengertian nikah, hukum nikah, cara-cara memilih jodoh, rukun dan syarat nikah, hikmah dan tujuan perkawinan, tahapan-tahapan pernikahan, etika dan cara bergaul dalam rumah tangga, hak

¹³³ Wawancara dengan Utd Husnah selaku tokoh masyarakat, tanggal 28 Juli 2008

dan kewajiban suami-isteri serta berbagai materi fiqh nikah lainnya. sehingga mempelai berdua dapat menjadikan fiqh Islam sebagai pijakan dalam menjalani hidup berkeluarga, selanjutnya bagi masyarakat lain materi *fiqhumnikah* yang disampaikan dapat memberikan evaluasi terhadap berbagai perjalanan bahtera pernikahan mereka.¹³⁴

Dengan demikian secara umum pondok pesantren Misykatul Ulum memiliki keterlibatan signifikan bagi transformasi sosial khususnya kebudayaan Islam melalui kebiasaan “perkawinan” di tengah masyarakat desa Trebungan. Dengan demikian, maka dapat diinterpretasikan bahwa peranan K.H. Moh. Khafifi Mustaqim sebagai pengasuh pondok pesantren Misykatul Ulum sangat berperan dalam transformasi sosial melalui kebudayaan yang terdapat ditengah masyarakat Trebungan. Dari beberapa media transformasi ajaran Islam melalui jalur kebudayaan, maka hal ini sesuai dengan misi awal didirikannya pesantren Misykatul Ulum adalah menyebarluaskan ajaran Islam pada masyarakat.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan KH M Khafifi Mustaqim tanggal 25 Juli 2008

Bab V

PENUTUP

Berdasarkan kajian yang mendalam dan uraian di atas penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kiai dalam membimbing dan menjadi panutan santri dalam pondok pesantren, di samping peran pokok membina pesantren terdapat fenomena kiai yang langsung terjun kemasyarakat dalam melakukan perubahan sosial (*social transformation*), dan penyebaran tradisi-tradisi keagamaan di masyarakat. Kiai dalam masyarakat juga merupakan pelindung karena masyarakat menganggap kiai adalah orang yang paling disegani sehingga ketika mempunyai persoalan baik persoalan keagamaan dan bidang-bidang yang lain kiai menjadi plopore untuk menyelesaikannya. Kedudukan para kiai adalah sebagai kepercayaan dan ahli waris Nabi.

Sedangkan tugas pokok yang biasanya mereka emban adalah menciptakan kesejahteraan umum.”*wama arsalnaka illa rahmatan lil’alamin*” (aku tidak mengutusmu kecuali menciptakan rahmat bagi seluruh alam). Oleh karena itu, kiai sebagai *agent of social change* guna memperjelas posisi kiai tidak hanya mempunyai tanggung jawab mencerdaskan santri-santrinya akan tetapi memberikan pendidikan pada masyarakat. Maka dairi itu kiai menjadi pelindung, pendidik, motivator, pengayom dalam masyarakat.

2. Motiv partisipasi kiai dalam masyarakat didasari oleh alasan untuk memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam yang di landasi dengan niat yang tulus. Bagi kiai keterlibatan langsung dalam masyarakat sangat berimplikasi terhadap makin luasnya akses dan peran kiai dalam kehidupan sosial, peran kiai dalam membangun kehidupan institusi sosial dan pranata sosial harus terarah dan selalu memberikan manfaat bagi masyarakat dan kiai harus lebih sensitif perannya sehingga kiai sebagai aktor dalam perubahan sosial akan tercapai dan terus dilakukan.
3. Peranan yang dilakukan KH. Moh. Khafifi Mustaqim dalam melakukan transformasi sosial melui jalur pendidikan Agama Islam sangat optimal ini terlihat pada dampak yang dirasakan masyarakat dan sebelum adanya pendidikan keagamaan yang khusus di Desa Trebungan mangaran Situbondo tersebut karena sebelumnya masyaratnya kurang begitu paham akan hal-hal keagamaan akan tetapi dengan datangnya kiai Khafifi Mustaqim masyarakat sudah banyak yang paham akan keagamaan, walupun media yang digunakan hanya melalui Madrasah Diniyah (sekolah keagamaan) dan Madrasah

Tsanawiyah (MTs) Misykatul Ulum. Peranan KH. Moh. Khafifi Mustaqim dalam melakukan transformasi sosial melalui jalur kebudayaan, proses transformasi sosial melalui jalur tersebut sangat penting bagi masyarakat pondok pesantren Misykatul Ulum dengan menyediakan *majelis ta'lim* yang diselenggarakan oleh pihak pondok pesantren maupun atas inisiatif masyarakat. Hal ini diorientasikan sebagai media bersosialisasi berbagai perkembangan hasil-hasil pembahasan ajaran ke-Islaman tentang problematika yang berkembang ditengah masyarakat, sehingga masyarakat terus mengikuti berbagai hasil *ijtihad* yang dilakukan oleh pondok pesantren Misykatul Ulum khususnya kiai dan dapat dijadikan pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bentuk-bentuk kebudayaan yang terdapat didalam masyarakat dan dapat dijadikan media transformasi ajaran Islam melalui jalur kebudayaan antara lain; *Majlis ta'lim*, *Hajian*, *Khitaman* atau *Sunatan* ,*Perkawinan*. Maka dari itu peran kiai sangat diharapkan dalam masyarakat secara umum khususnya dalam hal keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd, 2006, *Pembaharuan Pesantren*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
- Aziz, Abdul Thaba, 1996, *Islam dan Negara, dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press Jakarta.
- Arifin Zainal, Thoha, 2003, *Runtuhnya Singgasana Kiai NU Pesantren dan Kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usai*, Kutub, Yogyakarta.
- Abu, Muhammad Zahra, 1985, *Ushul al Fiqih*, Dar al fikr. Beriut
- Azra, Azyumardi, *Islam Di tengah Arus Transisi Menuju Demokrasi*.
- Anam, Choirul, 1999, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Bisma Satu, Surabaya.
- Abd, Al-Imam, Abu Allah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al Jami' li Abkam al-Qur'an*, Juz XIV, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beriut.
- Brotosiswoyo, B. Suprpto, 2000, *Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Globalisasi, Menggagas Pearadigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi, Sindhunata*,: Kansius, Yogyakarta,

- Depag RI, 2003, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Depag RI, Jakarta.
- , *Pedoman Penyelenggaraan Pusat Informasi Pesantren, Proyek Pembinaan Dan Bantuan Kepala Pondok Pesantren Jakarta, 1985/1986*.
- , 1993, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Perss, Bandung.
- Daulay, Haidar Putra, 2004, *Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Dawam, M. Raharjo, 1988, *Dunia Pesantren Dalam Peta Pembaharuan, Dalam Pesantren dan Pembaharuan*, LP3ES, Jakarta: LP3ES.
- Din Muhammad, Fakh al bin Umar bin al-Shusyani al-Razi, 1984, *'Aja'ib al-Qur'an* cet.I juz XXII, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beriut
- Iskandar A. Muhaimin, 2007, *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia*, KLIK. R Yogyakarta.
- IAIN Syarif Hidayatullah, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Fahmi, M, 2005, *Islam Transendental Menelusuri Jejak-Jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*, Pilar Media, Yogyakarta
- Feillard, Andree, 1999, *NU Vis a Vis Negara*, LKIS, Yogyakarta.
- Fu'ad, Mohammad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Maktanah Dahlan, Indonesia.
- Hasbullah, 1999, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia lintas Sejarah Pertummbuhan dan Perkembangan*, LSIK, Jakarta
- Horikoshi, Hirokho, 1987, *Kiai dan Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta

- Hasan, Nizam al-Din, 1996, *Tafsir Ghara'ib al-Quran Waraghaib al-Furqon*, Juz V, Dar al-Kutub Al-ilmiah, Beriut.
- Hamka, 2002, *Tafsir al-Azaha*, Juz XXII, Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Hikam, Muhammad AS., 1996, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta.
- Geertz, Clillifort, 1983, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Gaffar, A. Karim, *Metamfosis NU Politisasi Islam Indonesia*, LKiS, Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Jakarta.
- Kuntowijoyo, 1991, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Mizan, Bandung
- Muzani, Syaiful, 1994, *Spiritualitas Baru Agama dan Aspirasi Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maschan, Ali Moesa, 2002, *Agama Dan Demokrasi : Komitment Muslim Tradisional Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*, Pustaka Da'i Muda, Surabaya.
- , 1999, *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*, LEPKISS, Surabaya.
- , 2007, *Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, LKiS, Yogyakarta.
- Marwan, Saridjo, 1982, *Sejarah Pondok Peantren di Indonesia*, Dharma Bhakti, Jakarta.
- Muchit, Abdul Muzadi, 2006, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran Refleksi 65 th Ikut NU*, Khalista, Surabaya.

- Ma'mur, Jamal Asmani, 2003, *dalam Dilektika Pesantren dengan Tuntunan Zaman, Dalam Menggagas Pesantren Masa Depan: Geliat Suara Santri Untuk Indonesia Baru*, Qitras, Yogyakarta.
- Mun'in Abdul D.Z. 2000, *Islam di Tengah Arus Transisi*, Kompas, Jakarta.
- M. Dawam Raharjo, 1987, *Pergulatan Dunia Pesantren*, P3M, Jakarta.
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, 1973, *Fath al-Qodir al-jami' bayna fanni al-Riwayat wa al-Dirayat min ilm al-Tafsir*, Juz IV, Dar al-Fikir, Beriut.
- Muhammad, Al- Allamah Husayn al-Thabathaba'i, 1991, *Tafsir al-Mizan*, Juz XVII, Mu'assasah al-A'lami li al-Matbu'at, Beriut.
- Muhammad, Syaik Baqir al-Majisi, *Bihar al-Anwar al-Jami'ah li Dwar Akbhar al-A'immah al-Athar*, Juz II, Dar Ihya al-Turrath al-Arabi, Beriut.
- Mahfudz, Sahal, 1988, *Pengembangan Masyarakat oleh Pesantren, antara Fungsi dan Tantangan, dalam Dinamika Pesantren*, Manfred Oepen dan Wolgan Karcher, P3M, Jakarta P3M
- Nawawi, Syek al-Bantani, *Marah labid li Kasyfi Ma'na Qurainin Madjud*, Dar al-Fikr, tt Jilid 2, Kairo.
- Noer, Dwliar, 1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*, LP3ES Jakarta.
- NU Majalah Khittah, 2007, *Meraih Keteladanan Ulama*, PC Lajnah Ta'lif Wa Nasr NU Jember, Jember.
- Patoni, Achmat, 2007, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- PBNU, 1996, *Hasil-Hasil Mukhtamar Nahdatul Ulama ke-29*, Lajnah Ta'lif Wa An-Nasyr, Jakarta.

- Qoyim, Ibnu Ismail, 1997, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya Dimasa Kolonial*, Gema Insan Press, Jakarta.
- Qomar, Mujamil, 2005, *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*, Erlangga, Jakarta.
- , 2002, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, Erlangga, Jakarta.
- Rofiq, S, 2005, *Pemberdayaan Pesantren, Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri Dengan Metode Dauroh Kebudayaan*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
- Rozaki, Abdur, 2004, *Manabur Karisma Menui Kuasa Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*, Pustaka Marwa, Yogyakarta.
- Rahim, Husni, 2001, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimadnan Prenada Media, Jakarta.
- Suekamto, Soerjono, 1990, *Sosiologi, Suatu Penantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Suprayogo, Imam, 1998, *Kiai Politik, Kiai Advokatif, Kiai Spiritual, Desertasi tidak diterbitkan*, Universitar Airlangga, Surabaya.
- Sulaksamana, Uyung, 2004, *Managemen Perubahan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Syarif, Mustafa, Suparlan S, dan Abdur R. Saleh, *Administyrasi Pesantren*, PT. Paryu Parkah Jakarta.
- Sukamto, 1999, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren*, LP3ES, Jakarta.
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid II, Lentera Hati, Jakarta.

- _____, 2005, *Dia Diman-Mana, Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena*, Lentera Hati, Tangerang.
- Sanaky, Hujair, 2003, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani di Indonesia*, Satria insan Press, Yogyakarta.
- Siddiq, Ahmad, 1980, *Khittah Nahdliyah*, Balai Buku, Surabaya.
- Team, 2005, *Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
- Turmudi, Endang, 2004, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, LKiS, Yogyakarta
- Tilaar, H.A.R., 2002, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan: Pengantar Pedagogic Transformasi Untuk Inbdonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembnaan dan Pengembangan bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet ke 3*, Balai Pustaka Jakarta
- Yacup, M., 1983, *Pondok Pesantren Dan Pepmberdayaan Masyarakat Desa*, Angkasa. Bandung.
- Wahid, Abdurrahman, 1978, *Bunga Rampai Pesantren*, Dharma Bhakti, Jakarta.
- _____, 2007, *Menggerakkan Tradisi*, LKiS, Yogyakarta.
- Wighyosoebroto, Soetanfyo, 1994 *dalam kompas*, 9 Oktober
- Zuhaili, Wahbah 1998, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz XXIII, Dar al Fikr al-Mu'asr, Beriut.
- Ziemek, Manfred, 1986, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta.

Zubaedi, 2007, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

QS al -Syu'ara 197

QS al - Fatir 28,

QS al -Ankabut 43,

QS Yusuf 44,

QS al-Anbiya 51, 81,

QS al-Rum 2.

QS al-Mukminun 92,

QS al-An'am 73,

QS at-Taubah 94, 105,

QS.al-Ra'd 9,

QS al-Sajadah 6,

QS Saba 3,

QS al-Fatir 38

QS al-Zumar 46,

QS al Hasyr 22,

QS al-Jum'ah 8,

QS al-Taqhabun 18,

QS al-Jin 26

Q.S al- Anbiya' 107

TENTANG PENULIS



Dr. H. M. Hadi Purnomo, M.Pd., Lahir di Banyuwangi, 1 Desember 1965. Lulus SD Negeri Kedunggebang I Banyuwangi (1979) dan melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) II Banyuwangi (1982), melanjutkan ke SMA Negeri Genteng Banyuwangi. Pada tahun 1990 menyelesaikan S.1 di Universitas Jember (Unej), menempuh Program S.2 di IKIP Jakarta lulus tahun 1994 dan mendapat gelar doktor S.3 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Semasa kuliah sangat rajin dan menjadi Narasumber diberbagai Seminar, Wrokshop. Pengalaman menjabat Kepala SMA Plus Darus Sholah, Kepala Seksi Mapenda, Kantor Kementrerian Agama Kabupaten Jember dan aktive mengajar di Pascasarjana S2 IAIN Jember.

